

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

(Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana
Pada Fakultas Ilmu Administrasi
Universitas Brawijaya



RAMA NURHUDA

NIM. 0910310289

**JURUSAN ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

MALANG

2013

MOTTO

BELAJAR MENJADI HAMBA YANG

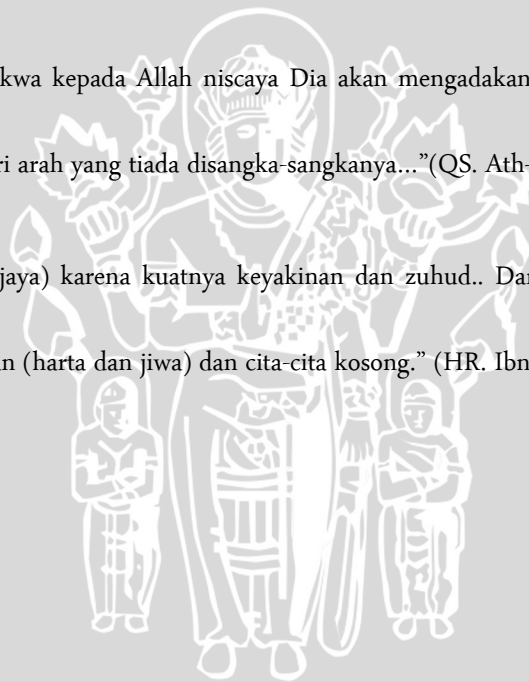
BERTAKWA DAN BERKEYAKINAN KUAT

“...Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar.

Dan memberikan rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya...”(QS. Ath-Thalaaq [65]: 2-3)

“Umat terdahulu selamat (jaya) karena kuatnya keyakinan dan zuhud.. Dan umat terakhir kelak

akan binasa karena kekikiran (harta dan jiwa) dan cita-cita kosong.” (HR. Ibnu Abi ad-Dunya)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Analisis Ketimpangan Pembangunan
(Studi Di Provinsi Jawa Timur 2005-2011)

Disusun oleh : Rama Nurhuda

NIM : 0910310289

Fakultas : Fakultas Ilmu Administrasi

Jurusan : Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, April 2013

Komisi Pembimbing

Ketua

Anggota



Dr. M. R. Khairuk Muluk, S. Sos, M. Si
NIP. 19710510 199803 1 004



Wima Yudo Prasetyo, S. Sos, MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila terdapat di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang sekarang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU Nomor 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 21 April 2013



Rama Nurhuda

0910310289

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 28 Mei 2013

Jam : 10.00

Skripsi atas nama : Rama Nurhuda

Judul : Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa
Timur Tahun 2005-2011)

MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. M. R. Khairul Muluk, S.Sos, M.Si
NIP. 19710510 199803 1 004

Anggota



Wima Yudho Prasetyo, S.Sos, MAP
NIP. 19790523 200604 1 002

Anggota



Drs. Heru Ribawanto, MS
NIP. 19520911 197903 1 002

Anggota



Ike Wanusmawatie, S. Sos, MAP
NIP. 19770101 200502 2 001

RINGKASAN

Rama Nurhuda, 2013. Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011). Dibawah bimbingan Dr. Mujibur Khairul Muluk S. Sos, M. Si dan Wima Yudo Prasetyo, S. Sos, MAP

Ketimpangan pembangunan merupakan permasalahan yang sulit diselesaikan terutama di negara sedang berkembang. Di Indonesia, provinsi Jawa Timur juga tidak lepas dari permasalahan ini. Penelitian ini bertujuan untuk menghitung tingkat ketimpangan wilayah di Provinsi Jawa Timur, membuktikan Hipotesis Kuznets, serta menganalisis pengaruh variabel independen PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan wilayah di Jawa Timur dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2011.

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang terdiri data tahun 2005 sampai dengan data 2011 yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Timur. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis korelasi dan analisis regresi berganda.

Berdasarkan hasil penelitian, disimpulkan bahwa dengan menggunakan rumus indeks Williamson tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2005 sampai 2011 mengalami penurunan. Sedangkan hipotesis Kuznets terbukti pada wilayah ini. Sedangkan dari hasil regresi berganda, variabel PDRB per kapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia tidak lolos dari uji asumsi klasik (uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedastisitas, uji autokolinearitas), sehingga dilakukan pengujian ulang dengan megesampingkan variabel PDRB perkapita dan Dana Alokasi Umum. Setelah dilakukan pengujian ulang dengan variabel Pendapatan Asli Daerah dan Indeks Pembangunan Manusia, didapat hasil negative untuk kedua variabel tersebut dengan tingkat signifikansi $\alpha=5\%$. Nilai F hitung sebesar 57,193 dengan probabilitas 0,001 lebih kecil dari $\alpha=5\%$, sehingga disimpulkan bahwa kedua variabel independent yaitu Pendapatan Asli Daerah, Indeks Pembangunan Manusia secara bersama-sama berpengaruh terhadap tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Nilai R^2 sebesar 0,966 yang menunjukkan bahwa 96,6% variasi ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 dapat dijelaskan dari kedua variabel independen tersebut.

Kata Kunci: Ketimpangan Pembangunan, Hipotesis Kuznets, PDRB Perkapita, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Indeks Pembangunan Manusia.

SUMMARY

Rama Nurhuda. 2013. Analysis Of Development Disparities (A case study at East Java Province). Supervisor Dr. Khairul Muluk S. Sos, M. Si, Co supervisor Yima Wudo Prasetyo, S. Sos, MAP

The development of disparity is a difficult problem solved, especially in developing countries. For Indonesia, in East Java province it also not free from this problem. This study aims to calculate degree of inequality in the region east Java province, proving Kuznets hypothesis, and analyze the influence of the independent variable GDP per capita, Revenue, General Allocation Fund, the Human Development Index of the development lameness in the region of East Java in the period 2005 until 2011.

This study uses secondary data consists of data from 2005 until 2011 with the data obtained from the Central Statistics Agency (BPS) of East Java Province. The method of analysis used in this study is descriptive statistical analysis, correlation analysis and multiple regression analysis.

Based on the research results, it was concluded that by using the index formula Williamson disparity in East Java province during 2005 until 2011 was decreased. While the Kuznets hypothesis proven in this region. While the results of multiple regression, the variable GDP per capita, Revenue, General Allocation Fund, the Human Development Index does not out from the classical assumption test (test for normality, multicollinearity test, heterokedastisity test, autokolinearity test), so to retake reseach with variable override GDP per capita and the General Allocation Fund. After retesting with the revenue variable and the Human Development Index, obtained negative results for both variables with a significance level $\alpha = 5\%$. Calculated F value of 57.193 with a 0.001 probability is smaller than $\alpha = 5\%$, so it was concluded that these two independent variables that are Revenue, Human Development Index jointly affect the level of disparity of development in East Java Province. The value of R^2 about 0.966 which are indicates that 96.6% of the variation disparity of development in East Java province in 2005 until 2011 can be explained from both the independent variables.

Keywords: Development Disparity , Kuznets Hypothesis, GDP per capita, Revenue, General Allocation Fund, Index Development Humans.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan masa belajarnya di Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya dan berhasil menyelesaikan skripsi yang berjudul Analisis Ketimpangan Pembangunan (Studi Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011).

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dan dukungan dari beberapa pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Sumartono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. MR. Khairul Muluk, S.sos, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik dan pembimbing 1.
3. Bapak Wima Yudo Prasetyo selaku pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu dan memberikan masukan serta arahnya untuk skripsi penulis dengan sabar disaat membimbing.
4. Kepala Badan Pusat Statistik dan seluruh pegawai Badan Pusat Statistik yang memberikan informasi data bagi peneliti..
5. Kedua orang tuaku, ayah dan ibuku tersayang beserta adik-adikku yang selalu memberikan cinta, dukungan, arahan, dan motivasi, serta doanya hingga terselesaikan skripsi ini.
6. Ahmad Indra Gunawan selaku sahabatku yang telah membantu dalam proses pengumpulan data sehingga penelitian ini dapat terselesaikan.
7. Seluruh sahabat-sahabatku terutama teman-teman angkatan 2009 yang selalu memberikan semangat dan dukungan, serta doanya selama ini.

8. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu disini, yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan banyak terima kasih.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Malang, April 2013

Penulis

DAFTAR ISI

COVER	
MOTTO	
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	
RINGKASAN	vi
SUMMARY	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori.....	12
1. Administrasi Publik dan Pembangunan.....	12
2. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.....	15
3. Teori pertumbuhan Ekonomi	17
a. Model Pertumbuhan Neo-Klasik.....	17
b. Model Pertumbuhan Endogen.....	20
c. Hipotesis Kuznets.....	23
4. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan.....	26
5. Teori perkembangan Pengeluaran Pemerintah:Teori Musgrave dan Rostow.....	29
6. Ketimpangan Pembangunan Wilayah.....	30
7. Indeks Williamson	35
8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).....	36
9. Hubungan PDRB dengan Ketimpangan Pembangunan.....	40
10. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	41
11. Hubungan PAD dengan Ketimpangan Pembangunan	47
12. Dana Alokasi Umum.....	47
13. Hubungan DAU dengan Ketimpangan Pembangunan.....	51
14. Indeks Pembangunan Manusia.....	53
15. Hubungan IPM dengan Ketimpangan Pembangunan	56
B. Penelitian Terdahulu	56
C. Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian Sebelumnya.....	58
D. Kerangka Berfikir.....	59

E. Hipotesis	62
--------------------	----

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	63
B. Lokasi Penelitian	64
C. Variabel dan Definisi Operasional	64
1. Variabel Penelitian	64
2. Definisi Operasional Variabel.....	64
a. Indeks Ketimpangan Pembangunan	64
b. PDRB.....	65
c. PAD	65
d. DAU	65
e. IPM	66
D. Jenis dan Sumber Data	66
E. Teknik Pengumpulan Data dan Tahap-Tahap Penelitian	67
1. Teknik Pengumpulan Data	67
2. Tahap-Tahap Penelitian.....	68
F. Analisis Data.....	73
1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah	74
2. Korelasi Pearson	75
3. Analisis Regresi Berganda.....	76
4. Estimasi Model Regresi	78
5. Uji Asumsi Klasik	79
a. Uji Normalitas	79
b. Uji Multikolinearitas	80
c. Uji Heteroskedastisitas	80
d. Uji Autokorelasi	81
6. Uji Pengambilan Kesimpulan.....	82
a. Uji F (uji Simultan)	82
b. Uji Parsial (Uji-t).....	82
c. Koefisien Diterminasi (R^2).....	83
G. Keterbatasan Peneliti.....	83

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi	84
1. Kondisi Geografis	84
2. Strategi Pembangunan Jawa Timur.....	85
a. Tujuan.....	85
b. Sasaran	85
c. Visi	85
d. Misi	85
e. Strategi	86
3. Wilayah Administrasi	87
4. Kependudukan	88
5. Kondisi Perekonomian	91
a. Pertumbuhan Ekonomi	91

b. Produk Domestik Regional Bruto	93
c. Pendapatan Asli Daerah.....	95
d. Dana Alokasi Umum	97
6. Keadaan Sosial; IPM	100
B. Analisis Data	102
1. Tingkat Ketimpangan Pembangunan	102
2. Pembuktian Hipotesis Kuznets	105
3. Analisis Variabel-variabel yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan	107
a. Uji Asumsi Klasik.....	107
1. Uji Normalitas	108
2. Uji Multikolinearitas	109
3. Uji Heteroskedastisitas	110
4. Uji Autokrasi	111
b. Hasil Analisis Regresi Berganda.....	114
1. Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	117
2. Uji F(Uji Simultan).....	117
3. Uji Parsial (Uji t)	117
4. Deskripsi Hasil Nilai	119
a. Pengaruh PAD terhadap Ketimpangan Pembangunan	119
b. Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan.....	127
5. Analisis Ketimpangan Pembangunan.....	134
6. Analisis Perbandingan Hasil Penelitian dengan Peneliti Sebelumnya.....	142
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	143
B. Saran	145
DAFTAR PUSTAKA	147

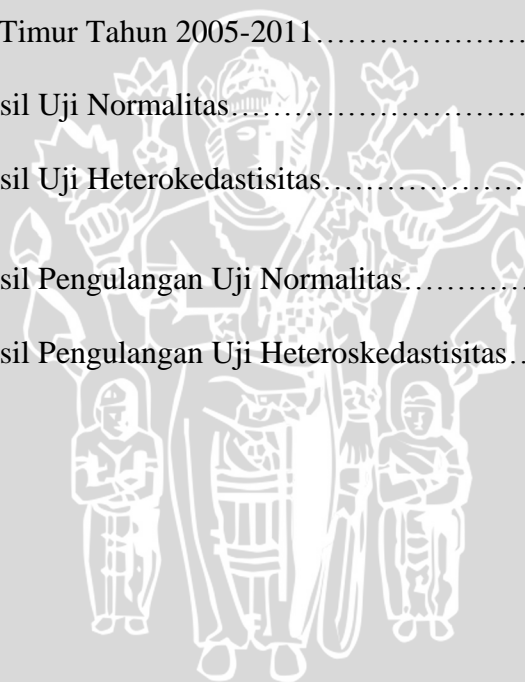
DAFTAR TABEL

1. Tabel 1.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Yang Berlaku Kabupaten/Kota di Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	5
2. Tabel 3.1 Penjelasan Korelasi Pearson.....	76
3. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	89
4. Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	92
5. Tabel 4.3 PDRB Perkapita atas dasar harga yang berlaku kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2005-2010 (Ribu Rupiah).....	94
6. Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011 (jutaan).....	96
7. Tabel 4.5 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	97
8. Tabel 4.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	100
9. Tabel 4.7 Indeks Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	103
10. Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2011.....	106

11. Tabel 4.9 Hasil Analisis Korelasi Pearson.....	107
12. Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas.....	109
13. Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi.....	111
14. Tabel 4.12 Hasil Pengulangan Uji Multikolinearitas.....	113
15. Tabel 4.13 Hasil Pengulangan Uji Autokorelasi.....	114
16. Tabel 4.14 Koefisien Determinasi (Uji R^2).....	115
17. Tabel 4.15 Uji-F (Uji Simultan).....	115
18. Tabel 4.16 Uji Parsial (Uji-t).....	115
19. Tabel 4. 17 Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	123
20. Tabel 4.18 Hasil Analisis Korelasi Pearson.....	123
21. Tabel 4.19 Jumlah Peningkatan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	125
22. Tabel 4.20 IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	130
23. Tabel 4.21 Hasil Analsis Korelasi Pearson.....	130
24. Tabel 4.22 Peningkatan IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	131

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar 2.1 Formulasi DAU tahun 2009.....	51
2. Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis	61
3. Garafik 4.1 Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	104
4. Grafik 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011.....	106
5. Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas.....	108
6. Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas.....	110
7. Gambar 4.4 Hasil Pengulangan Uji Normalitas.....	112
8. Gambar 4.5 Hasil Pengulangan Uji Heteroskedastisitas.....	113



DAFTAR LAMPIRAN

1. Curriculum Vitae
2. Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
3. Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
4. Tabel 4.3 PDRB Perkapita atas dasar harga yang berlaku kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2005-2010 (Ribu Rupiah)
5. Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011 (jutaan)
6. Tabel 4.5 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
7. Tabel 4.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2005-2011
8. Tabel 4.7 Indeks Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
9. Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas
10. Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas
11. Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas
12. Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi
13. Tabel 4.12 Hasil Pengulangan Uji Multikolinearitas

14. Tabel 4.13 Hasil Pengulangan Uji Autokorelasi
15. Gambar 4.4 Hasil Pengulangan Uji Normalitas
16. Gambar 4.5 Hasil Pengulangan Uji Heteroskedastisitas
17. Tabel 4.14 Koefisien Determinasi (Uji R^2)
18. Tabel 4.15 Uji-F (Uji Simultan)
19. Tabel 4.16 Uji Parsial (Uji-t)
20. Tabel 4. 17 Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
21. Tabel 4.18 Hasil Analisis Korelasi Pearson
22. Tabel 4.19 Jumlah Peningkatan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
23. Tabel 4.20 IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
24. Tabel 4.21 Hasil Analisis Korelasi Pearson
25. Tabel 4.22 Peningkatan IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011
26. Tabel Durbin Watson
27. Tabel t dan tabel f

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan merupakan suatu proses mewujudkan cita-cita bernegara, yaitu terwujudnya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera secara merata. Kesejahteraan ditandai dengan kemakmuran yaitu meningkatnya konsumsi disebabkan meningkatnya pendapatan (Sumodiningrat, 2001:13). Hal yang sama seperti yang diungkapkan oleh Todaro (1994:15), bahwa pembangunan adalah proses multidimensional yang melibatkan perubahan-perubahan mendasar dalam struktur sosial, perilaku sosial, dan institusi nasional, disamping akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan ketidakmerataan, dan pemberantasan kemiskinan. Berdasarkan pengertian ini maka pada hakekatnya pembangunan harus diarahkan kepada efisiensi (*efficiency*), pemerataan (*equity*) dan keberlanjutan (*sustainability*).

Dari pengertian tersebut, ada beberapa nilai dasar dari konsep pembangunan. Pertama, pembangunan mengandung makna proses. Ada tahapan-tahapan atau proses tertentu yang harus dilalui ketika pembangunan tersebut dilakukan. Kedua, pembangunan mengandung arti perubahan menuju arah yang lebih baik. Ada penambahan nilai (*value*) dan guna (*utility*) dari obyek pembangunan. Dalam hal ini, dapat juga dikatakan bahwa ada tujuan dan target tertentu dalam pembangunan. Ketiga, terdapat subyek, metode dan obyek dalam pembangunan. Ada subyek yang melakukan pembangunan, ada rangkaian langkah yang menjadi panduan, dan terdapat juga obyek atau sasaran pembangunan.

Untuk menentukan keberhasilan sebuah pembangunan, dapat dilihat dan diukur dengan indikator-indikator berdasarkan dimensi-dimensi pembangunan. Adapun dimensi pembangunan tersebut dikategorikan dalam wilayah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sumber daya manusia, hukum, politik, sarana dan keadilan masyarakat secara umum.

Dalam dimensi ekonomi, pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan per kapita penduduk sesuatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang (Sukirno, 1985). Tujuan pembangunan ekonomi suatu negara adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Negara Dunia Ketiga atau yang lebih sering disebut dengan Negara Sedang Berkembang (NSB) merupakan negara-negara yang memerlukan perhatian lebih dalam aspek pembangunan ekonomi. Penyebab semakin meluasnya perhatian terhadap pembangunan ekonomi di negara sedang berkembang ialah keinginan dari NSB untuk dapat mengejar ketinggalan dan meningkatkan kesejahteraan mereka.

Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat diperlukan pertumbuhan ekonomi yang meningkat dan distribusi pendapatan yang merata. Pertumbuhan ekonomi ini diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan laju pertumbuhannya atas dasar harga konstan (Masli, 2008). Pertumbuhan ekonomi yang cepat yang tidak diimbangi dengan distribusi pendapatan akan menimbulkan ketimpangan distribusi pendapatan hal ini dikarenakan tidak memperhatikan apakah pertumbuhan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau perubahan struktur ekonomi.

Negara Indonesia yang terdiri atas 33 Provinsi, memiliki latar belakang perbedaan antar wilayah. Perbedaan ini berupa perbedaan karakteristik alam, sosial, ekonomi, dan sumber daya alam yang penyebarannya berbeda disetiap provinsi. Perbedaan tersebut menjadi hambatan dalam pemerataan pembangunan ekonomi dikarenakan terkonsentrasinya suatu kegiatan perekonomian yang berdampak meningkatnya pertumbuhan ekonomi di beberapa provinsi atau wilayah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan alam yang dimiliki seharusnya dapat menjadikan nilai tambah dalam meningkatkan pembangunan ekonomi. Kelebihan yang dimiliki tersebut diharapkan memberikan dampak menyebar (*spread effect*). Hanya saja kekayaan alam ini tidak dimiliki oleh seluruh provinsi di Indonesia secara merata. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab timbulnya ketimpangan atau kesenjangan antar daerah.

Ketimpangan memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Seperti yang diungkapkan Keynes dalam (Haq, 1976:40) bahwa dari sudut fungsinya, ketimpangan pendapatan dapat dibenarkan kalau ketimpangan itu menaikkan produksi untuk semua orang dan tidak menaikkan konsumsi untuk segelincir orang saja. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi yang pada umumnya dipandang tidak adil (Todaro, 2004). Ketimpangan menyebabkan inefisiensi ekonomi, sebab ketimpangan yang tinggi, tingkat tabungan secara keseluruhan di

dalam perekonomian cenderung rendah, karena tingkat tabungan yang tinggi biasanya ditemukan pada kelas menengah. Meskipun orang kaya dapat menabung dalam jumlah yang lebih besar, mereka biasanya menabung dalam bagian yang lebih kecil dari pendapatan mereka, dan tentunya menabung dengan bagian yang lebih kecil lagi dari pendapatan marjinal mereka (Todaro, 2006). Dampak negatif inilah yang menyebabkan ketimpangan yang tinggi menjadi salah satu masalah dalam pembangunan dalam menciptakan kesejahteraan di suatu wilayah.

Ketimpangan wilayah (*regional disparity*) yang timbul dikarenakan tidak adanya pemerataan dalam pembangunan ekonomi ini, terlihat dengan adanya wilayah yang maju dengan wilayah yang terbelakang atau kurang maju. Alisjahbana, (2005) mengemukakan salah satu permasalahan ketimpangan yang menonjol di Indonesia adalah kesenjangan antar daerah sebagai konsekuensi dari terkonsentrasinya kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Bali. Berkembangnya provinsi-provinsi baru sejak 2001 dan desentralisasi diduga akan mendorong kesenjangan antar daerah yang lebih lebar. Pada tingkat Provinsi sendiri, antara wilayah kabupaten dan kota masih terjadi ketimpangan dari tahun ke tahun.

Provinsi Jawa Timur merupakan Provinsi Negara Indonesia yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi, juga tidak lepas dari ketimpangan pembangunan. Hal ini terlihat pada (Produk Domestik Bruto) PDRB kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur yang dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1.1 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Yang Berlaku Kabupaten/Kota
di Jawa Timur Tahun 2005-2011**

No	Kabupaten/ kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
KABUPATEN								
1	Pacitan	3410,60	3920,23	4391,58	5033,55	5541,49	6428,97	7056,16
2	Ponorogo	4554,12	5283,39	6000,32	6907,95	7740,33	9268,68	10265
3	Trenggalek	3650,89	4342,98	4892,27	5675,48	6338,48	7171,66	7878,83
4	Tulungagung	9536,30	11228,93	12653,28	14595,52	16092,03	18180,68	19918,62
5	Blitar	6809,24	8097,86	9194,64	10502,90	11579,81	12492,98	13591,26
6	Kediri	5879,78	6908,21	7648,44	8737,76	9543,10	10360,80	11223,95
7	Malang	7401,42	8610,04	9771,49	11235,77	12342,41	13724,47	15003,08
8	Lumajang	7794,44	8858,53	9955,90	11388,64	12521,27	14357,74	15732,54
9	Jember	5940,99	6629,67	7523,62	8845,47	9740,62	10834,30	11885,46
10	Banyuwangi	8663,56	10080,99	11405,63	13298,52	14824,74	16707,08	18363,6
11	Bondowoso	4170,20	4720,44	5339,43	6130,64	6745,62	7265,46	7901,72
12	Situbondo	7723,21	8798,19	9928,96	11407,97	12547,80	13577,35	14772,14
13	Probolinggo	8131,80	9436,91	10766,55	12369,36	13652,71	14817,93	16163,19
14	Pasuruan	6090,92	7162,66	8179,38	9429,73	10375,38	11280,91	12310,47
15	Sidoarjo	20533,59	23017,42	25621,87	28895,82	31271,64	32525,82	34902,92
16	Mojokerto	8246,71	9549,08	10769,99	12285,65	13450,32	15094,50	16480,86
17	Jombang	6379,25	7363,83	8293,20	9451,68	10203,20	12405,77	13666,26
18	Nganjuk	5942,91	6749,02	7706,23	8836,33	9717,60	10797,04	11809,05
19	Madiun	5438,54	6259,58	7066,48	8086,66	8853,42	9619,17	10459,07
20	Magetan	6574,34	7582,21	8527,05	9918,37	10883,30	12239,76	13404,15
21	Ngawi	4818,40	5660,37	6334,80	7240,30	7988,41	9218,17	10107,62
22	Bojonegoro	6268,69	7588,42	9195,54	11201,68	12389,14	15659,88	17677,75
23	Tuban	7711,62	9306,54	10689,00	12481,62	13852,55	15153,15	16614,8
24	Lamongan	4800,11	5693,68	6446,90	7411,14	8233,79	9392,98	10317,81
25	Gresik	17410,66	20565,25	23272,01	26665,64	29453,72	34428,00	37893,69
26	Bangkalan	4834,70	5474,41	6024,64	6758,72	7249,82	8675,31	9475,54
27	Sampang	3996,03	4595,22	4994,51	5574,17	5972,02	6929,62	7513,22
28	Pamekasan	3557,70	4129,07	4523,64	5077,16	5494,84	6588,60	7203,48
29	Sumenep	6608,45	7677,95	8599,64	9790,55	10710,41	11770,06	12793,09
KOTA								
30	Kediri	132351,25	151196,59	165693,18	188061,03	209297,96	242263,63	265030,4
31	Blitar	6692,05	8025,69	9021,35	10272,33	11401,87	13141,38	14420,3
32	Malang	20712,31	24485,13	27706,13	32172,73	34784,17	39292,76	42994,67

33	Probolinggo	12042,06	14047,41	15727,45	17767,28	19096,85	22583,00	24716,9
34	Pasuruan	8079,45	10550,04	11835,29	13470,33	14878,45	15759,58	17061,97
35	Mojokerto	13728,60	16275,54	18373,97	21135,74	23435,88	25134,58	27349,34
36	Madiun	8374,59	11166,82	12649,46	14669,89	16174,12	19380,64	21434,1
37	Surabaya	39801,85	46923,72	53716,43	62310,23	68756,24	74776,14	81739,25
38	Batu	9020,71	10166,16	11609,65	13435,44	14889,60	16898,00	18580,96
Jawa Timur		11057,37	12872,15	14554,10	16751,43	18420,94	20772,11	24360,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Simon Kuznets (Todaro, 2006) mengatakan bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya distribusi pendapatan pun akan membaik. Hal ini sebagian besar dikaitkan dengan kondisi-kondisi dasar perubahan yang bersifat struktural. Observasi inilah yang kemudian dikenal sebagai Kurva Kuznets “U-Terbalik”. Hal yang sama diungkapkan dalam teori Neo-klasik bahwa pada tahap awal pertumbuhan ekonomi akan mengakibatkan ketimpangan pembangunan, namun setelah mengalami titik puncak, maka ketimpangan pembangunan akan semakin menurun meskipun pertumbuhan ekonomi terus meningkat.

Dari tabel PDRB, dapat dilihat bahwa ada beberapa wilayah yang mempunyai PDRB yang sangat tinggi dan ada wilayah yang mempunyai PDRB yang sangat rendah. Jika dilihat wilayah-wilayah kota, ada beberapa wilayah kota yang tingkat perkembangan PDRBnya relatif cukup tinggi, berbeda dengan wilayah-wilayah di kabupaten yang memiliki tingkat perkembangan PDRB rendah. Keadaan ini dari tahun 2005-2011 terus mengalami perbedaan yang sangat jauh. Jika keadaan ini masih terus berlanjut, maka tingkat ketimpangannya akan semakin jauh dan pemerataan pembangunan tidak akan merata keseluruhan wilayah Provinsi Jawa Timur. Sehingga, keadaan ini bisa saja berbanding terbalik dengan pendapat Simon Kuznets dan teori Neo-klasik.

Selain itu juga, ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur tidak hanya ketimpangan pada pertumbuhan ekonomi, tetapi ketimpangan fiskal dan ketimpangan Sumber Daya Manusia (SDM). Ini dilihat dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berbeda-beda pada setiap daerah. Rata-rata daerah yang mempunyai PDRB tinggi, mempunyai PAD dan IPM yang cukup tinggi pula (Lampiran tabel 4.4 dan 4.6). Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka pemerintah memainkan peran desentralisasi fiskal tentang distribusi dari daerah yang kaya ke daerah yang miskin agar tidak terjadi ketimpangan yang tajam. Kebijakan yang diambil adalah dengan dana perimbangan terutama melalui DAU, dan masing-masing daerah akan menerima DAU yang berbeda-beda tergantung pada kapasitas fiskal dan kebutuhan fiskal. Transfer DAU kesetiap daerah harus mempertimbangkan kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal atau yang disebut dengan celah fiskal. Jika kapasitas fiskal suatu daerah rendah sedangkan kebutuhannya tinggi maka besarnya DAU yang diterima akan besar pula.

Peran PAD dan DAU dalam penerimaan daerah sangat berperan penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PAD dan DAU dalam penerimaan daerah dapat berpengaruh terhadap besarnya pengeluaran daerah dalam Anggaran Belanja Daerah (APBD). Anggaran belanja yang semakin besar dalam APBD dapat mengoptimalkan dan menaikkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti industri, perdagangan, sector jasa, dan sector-sektor lainnya. Kegunaan PAD dan DAU juga untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan

pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran Musgrave dan Rostow bahwa diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan (Mangkunsoebroto, 1998).

Selain itu, sudah banyak pendapat bahwa modal manusia (*human capital*) merupakan faktor penting dalam dalam proses pertumbuhan ekonomi. Teori pertumbuhan endogen menjelaskan bahwa pentingnya SDM dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Brata (2002) juga mengatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi maka diperlukan pembangunan manusia, termasuk dalam konteks ekonomi regional. Hal ini sangat penting karena kebijakan manusia yang tidak mendorong peningkatan kualitas manusia hanya akan membuat daerah yang bersangkutan tertinggal dari daerah lain, termasuk dalam bidang ekonomi. Dengan kata lain, peningkatan kualitas modal manusia diharapkan juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi disparitas antar daerah yang merupakan persoalan rumit bagi negara dengan wilayah yang luas dan tingkat keragaman sosial ekonomi yang tinggi.

Data dari BPS pada tahun 2005-2011, DAU Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan dari Rp 10.494.004.000.000 pada tahun 2005 menjadi Rp 22.214.792.000.000 pada tahun 2011. Dan PAD juga mengalami peningkatan dari Rp 1.801.560.000.000 menjadi Rp 5.480.045.000.000 pada tahun 2011. Selain itu juga, IPM Provinsi Jawa Timur juga mengalami peningkatan dari 66,84 pada tahun 2005 menjadi 70,81 pada tahun 2011. Melihat kondisi PAD, DAU dan IPM yang meningkat setiap tahun di Provinsi Jawa Timur, maka dimungkinkan dengan

peningkatan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

Dari latar belakang inilah, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2006-2010**”. Penelitian ini dimaksudkan untuk menghitung seberapa besar tingkat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur dan pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

B. Rumusan Masalah

Dari penjelasan sebelumnya maka pertanyaan penelitian dalam penulisan ini antara lain:

1. Bagaimanakah tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?
2. Apakah hipotesis Kuznets tentang kurva “U terbalik” berlaku di Provinsi Jawa Timur?
3. Bagaimanakah pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang dikemukakan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui dan menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk mengetahui apakah hipotesis Kuznets tentang kurva “U terbalik” berlaku di Provinsi Jawa Timur
3. Mengetahui pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU, dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?

D. Manfaat Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis adalah sebagai informasi dan masukan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur, sebagai bahan pertimbangan dalam mengambil kebijakan yang menyangkut pembangunan, pengembangan wilayah, serta pemerataan pembangunan antar wilayah.
2. Kegunaan ilmiah untuk memberikan sumbangan pemikiran untuk kemajuan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan teori-teori pembangunan.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika dan struktur penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab:

Bab I: Pendahuluan

Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

Bab II: Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua akan diuraikan landasan teoritis menjelaskan teori-teori yang mendukung perumusan hipotesis, yang didukung dengan penelitian terdahulu. Kerangka pemikiran teoritis menjelaskan permasalahan yang

akan diteliti yaitu tentang apa yang seharusnya, sehingga timbul adanya hipotesis (dugaan awal penelitian).

Bab III: Metode Penelitian

Pada bab ketiga dijelaskan definisi operasional yang mendeskripsikan variabel-variabel dalam penelitian. Jenis dan sumber data mendeskripsikan tentang jenis data dari variabel-variabel dalam penelitian. Metode analisis mendeskripsikan jenis atau model analisis yang digunakan dalam penelitian.

Bab IV: Hasil Dan Pembahasan

Pada bab keempat diuraikan tentang deskripsi objek. Analisis data dilakukan untuk menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dibaca dan diinterpretasikan. Setelah data dianalisis, dalam pembahasan dijelaskan implikasi dari hasil analisis data dan interpretasi yang dibuat dalam penelitian.

Bab V : Kesimpulan Dan Saran

Pada bab lima merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penyajian secara singkat apa yang telah diperoleh dari pembahasan. Dan saran sebagai masukan pada penelitian mendatang. Saran saran yang diajukan untuk perbaikan pelaksanaan (praktek di lapangan) dan perbaikan penelitian berikutnya berdasarkan penerapan teori yang digunakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Administrasi Publik dan Pembangunan

Secara umum, hubungan antara administrasi publik dan pembangunan melahirkan suatu disiplin ilmu baru yang disebut sebagai administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan berkembang karena adanya kebutuhan di negara-negara yang sedang membangun untuk mengembangkan lembaga-lembaga dan pranata-pranata sosial, politik, dan ekonomi, agar pembangunan dapat berhasil. Oleh karena itu menurut Kartasasmita (1997), pada dasarnya administrasi pembangunan adalah bidang studi yang mempelajari sistem administrasi negara di negara yang sedang membangun serta upaya untuk meningkatkan kemampuannya.

Secara konsep menurut Suminta (2005), administrasi pembangunan merupakan gabungan dua pengertian, yaitu administrasi, yang berarti segenap proses penyelenggaraan dari setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini merupakan rangkaian usaha perubahan dan pertumbuhan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintahan menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa. Dengan demikian, gabungan antara kedua pengertian tersebut di atas mengandung beberapa pokok pikiran, yaitu:

1. Pembangunan merupakan suatu proses. Oleh karena itu, harus dilaksanakan secara terus-menerus, berkesinambungan, pentahapan, jangka waktu, biaya, dan hasil tertentu yang diharapkan.
2. Pembangunan adalah suatu usaha yang dilakukan secara sadar dan merupakan hasil pemikiran sampai pada tingkat rasionalitas tertentu.
3. Pembangunan dilaksanakan secara berencana.
4. Pembangunan mengarah pada modernitas dan bertujuan untuk menemukan cara hidup yang lebih baik dari sebelumnya, lebih maju, serta dapat menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek.
5. Pembangunan mempunyai tujuan yang bersifat multidimensional, meliputi berbagai aspek kehidupan bangsa dan negara, terutama aspek politik, ekonomi, sosial-budaya, serta pertahanan dan keamanan.
6. Pembangunan ditujukan untuk membina bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan untuk mendukung proses pembangunan, dalam arti untuk keperluan keberhasilan pembangunan, yang meliputi administrasi untuk perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Lebih lanjut, administrasi pembangunan merupakan administrasi publik yang diarahkan untuk penyempurnaan administrasi negara agar berkemampuan mendukung proses pembangunan.

Dengan demikian, administrasi pembangunan lahir dan merupakan penyempurnaan dari administrasi publik untuk dapat diterapkan di negara berkembang. Selain itu, tujuan diterapkannya administrasi pembangunan adalah

untuk mencapai kemajuan pembangunan suatu negara menuju modernisasi. Dapat dikatakan pula bahwa, administrasi publik adalah ditujukan bagi negara yang sudah maju, sedangkan administrasi pembangunan ditujukan untuk negara yang sedang berkembang.

Menurut Tjokroamidjojo (1995), setidaknya terdapat 4 kecenderungan yang mengarahkan administrasi negara kepada administrasi pembangunan. Kecenderungan-kecenderungan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Perhatian administrasi negara mengarah kepada masalah-masalah pelaksanaan dan pencapaian tujuan pembangunan, yang dimulai dari perumusan kebijaksanaan, instrumen pelaksanaannya hingga pelaksanaan pembangunan itu sendiri.
2. Administrasi negara mengembangkan penelaahan mengenai sikap dan peranan birokrasi (*behavioral approach*), serta berbagai masalah hubungan manusia, seseorang atau kelompok dalam birokrasi tersebut, juga ditelaah tentang bagaimana keputusan diambil, dan pengetahuan dikembangkan.
3. Kecenderungan melakukan pendekatan manajemen dalam administrasi negara. Di sini dikembangkan sistem analisis administrasi negara terhadap administrasi pembangunan, penggunaan teknik-teknik kuantitatif dan analitis dalam administrasi negara.
4. Administrasi negara memberikan tekanan kepada ekologi sosial dan kultural. Di sini ditekankan telaah terhadap hubungan dan sikap administratif dengan ekologi sosial dan budaya masyarakat tertentu.

Keempat kecenderungan tersebut saling terkait satu sama lain dan kecenderungan tersebut mengarah kepada administrasi pembangunan. Kecenderungan administrasi pembangunan berorientasi untuk mendukung pembangunan, dan usaha-usaha ke arah modernisasi guna mencapai kehidupan yang sejahtera secara sosial dan ekonomi. Namun, harus pula dipahami bahwa administrasi pembangunan masih mendasarkan diri pada administrasi publik dan peralatan analisis administrasi negara sehingga administrasi pembangunan secara disiplin keilmuan belum dapat dipisahkan dari administrasi negara.

2. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi.

Djojohadikusumo, (1987) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi bertumpu pada proses peningkatan produksi barang dan jasa dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Sedangkan pembangunan ekonomi mengandung pengertian yang lebih luas dan mencakup perubahan pada tata susunan ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Pembangunan merupakan proses transformasi yang dalam perjalanan waktu ditandai dengan perubahan struktural yakni perubahan pada landasan kegiatan ekonomi maupun pada kerangka susunan ekonomi masyarakat yang bersangkutan. Pada umumnya pembangunan selalu disertai dengan pertumbuhan, tetapi pertumbuhan belum tentu disertai dengan pembangunan. Pada tingkat permulaan, pembangunan ekonomi dibarengi pula dengan pertumbuhan dan sebaliknya (Irawan dan Suparmoko, 1988).

Selama tiga dasawarsa perhatian utama pembangunan pada cara mempercepat tingkat pertumbuhan pendapatan nasional, baik negara maju/kaya

maupun negara terbelakang/miskin, baik yang menganut sistem kapitalis, sosialis maupun campuran selalu mengutamakan pertumbuhan ekonomi. Seperti diketahui bahwa suatu keberhasilan program pembangunan di negara berkembang sering dimulai berdasarkan tinggi rendahnya tingkat pertumbuhan output dan pendapatan nasional. Baik buruknya kualitas kebijakan pemerintah dan tinggi rendahnya mutu aparat di bidang ekonomi secara keseluruhan biasanya diukur berdasarkan kecepatan pertumbuhan output yang dihasilkan. Namun demikian penyebaran pertumbuhan pendapatan tersebut masih sangat terbatas jangkauannya, kekuatan antara negara maju dan negara berkembang tidak seimbang sehingga cenderung memperlebar jurang kesenjangan antara kelompok negara kaya dan negara miskin.

Di negara berkembang perhatian utama terfokus pada dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan GNP yang lebih tinggi dan juga pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan suatu pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi masalah adalah bukan hanya soal bagaimana caranya memacu pertumbuhan, tetapi juga siap melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya. Dengan demikian pembangunan ekonomi tidak semata-mata diukur berdasarkan peningkatan GNP secara keseluruhan, tetapi harus memperhatikan distribusi pendapatan telah meyebar ke segenap penduduk/lapisan masyarakat, serta siapa yang telah menikmati hasil-hasilnya (Todaro, 1999).

3. Teori Pertumbuhan Ekonomi

a. Model Pertumbuhan Neo-Klasik

Robert Solow dan Trevor Swan secara sendiri-sendiri mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang sekarang sering disebut dengan nama Model Pertumbuhan Neo-Klasik (Boediono,1992). Model Solow-Swan memusatkan perhatiannya pada bagaimana pertumbuhan penduduk, akumulasi kapital, kemajuan teknologi dan output saling berinteraksi dalam proses pertumbuhan ekonomi. Dalam model neo-klasik Solow-Swan dipergunakan suatu bentuk fungsi produksi yang lebih umum, yang bisa menampung berbagai kemungkinan substitusi antar kapital (K) dan tenaga kerja (L). Dalam bentuknya yang lebih formal, model pertumbuhan neo-klasik Solow memakai fungsi produksi agregat standar, yakni:

$$Y = K^{\alpha} (AL)^{1-\alpha},$$

dimana Y adalah produk domestik bruto, K adalah stok modal fisik dan modal manusia, L adalah tenaga kerja, dan A adalah produktifitas tenaga kerja yang pertumbuhannya ditentukan secara eksogen (Todaro, 2006:150).

Dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik dipelopori oleh George H.Bort (1960) dengan mendasarkan analisisnya pada Teori Ekonomi Neo-Klasik. Menurut model ini, pertumbuhan ekonomi suatu daerah akan sangat ditentukan oleh kemampuan daerah tersebut untuk meningkatkan kegiatan produksinya. Sedangkan kegiatan produksi suatu daerah tidak hanya ditentukan oleh potensi daerah yang bersangkutan, tetapi juga ditentukan pula oleh mobilitas tenaga kerja dan mobilitas modal antar daerah.

Karena kunci utama pertumbuhan ekonomi daerah adalah peningkatan kegiatan produksi, maka mengikuti Richardson (1978) dalam Sjafrizal (2008), model Neo-Klasik ini dapat diformulasikan mulai dari fungsi produksi. Dengan menganggap bahwa fungsi produksi adalah dalam bentuk Cobb-Douglas, maka dapat ditulis (Sjafrizal, 2008) :

$$Y = A K^\alpha L^\beta, \alpha + \beta = 1 \dots\dots\dots(2.1)$$

dimana Y melambangkan PDRB, K dan L melambangkan modal dan tenaga kerja.

Karena analisa mnyangkut pertumbuhan maka semua variabel adalah fungsi waktu (t). Dengan mengambil turunan matematika persamaan (2.1) terhadap variabel t diperoleh :

$$y = a + \alpha k + (1-\alpha) l \dots\dots\dots(2.2)$$

dimana $y = dY/dt$ menunjukkan peningkatan PDRB (pertumbuhan ekonomi), $a = dA/dt$ menunjukkan perubahan teknologi produksi (secara netral), $k = dK/dt$ menunjukkan penambahan modal (investasi) dan $l = dL/dt$ penambahan jumlah dan peningkatan kualitas tenaga kerja.

Selanjutnya, bila aspek daerah dimasukkan ke dalam analisa ini, maka peningkatan modal di suatu daerah tidak hanya berasal dari tabungan di daerah itu saja, tetapi berasal juga dari modal yang masuk dari luar daerah. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$k_i = (s_i/v_i) + \sum_{j=1}^n k_{ji} \dots\dots\dots(2.3)$$

dimana s_i adalah *Marginal Propensity to Save* (MPS) di daerah i, v_i adalah *Incremental Capital Output Ratio* (ICOR) daerah i. Sedangkan k_{ji} adalah jumlah modal yang masuk dari daerah lain ke daerah i.

Sama halnya dengan modal, peningkatan jumlah tenaga kerja daerah i tidak saja disebabkan kerana pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan saja, tetapi juga karena arus perpindahan penduduk masuk (*immigration*) ke daerah yang bersangkutan. Kenyataan ini dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$l_i = n_i + \sum_{j=1}^n m_{ji} \dots\dots\dots(2.4)$$

dimana n_i merupakan pertambahan penduduk daerah yang bersangkutan, m_{ji} adalah penduduk yang masuk (*immigration*) ke daerah i yang datang dari daerah lainnya j. Perpindahan modal (k_{ji}) dari daerah j ke daerah i terutama oleh tingkat pengembalian modal, r , yang tinggi di daerah i dibandingkan dengan daerah j.

Demikian juga dengan perpindahan penduduk yang terjadi karena ada perbedaan tingkat upah, w . Berdasarkan hal ini maka dapat ditulis :

$$k_{ji} = f_k (r_i - r_j) \dots\dots\dots(2.5)$$

$$m_{ji} = f_l (w_i - w_j) \dots\dots\dots(2.6)$$

Penganut Model Neo-Klasik (dalam Sjafrizal, 2008) beranggapan bahwa mobilitas faktor produksi, baik modal maupun tenaga kerja, pada permulaan proses pembangunan adalah kurang lancar. Akibatnya, pada saat itu modal dan tenaga kerja ahli cenderung terkonsentrasi di daerah yang lebih maju sehingga ketimpangan pembangunan regional cenderung melebar (*divergence*). Akan tetapi bila proses pembangunan terus berlanjut, dengan semakin baiknya prasarana dan fasilitas komunikasi maka mobilitas modal dan tenaga kerja tersebut akan semakin lancar. Dengan demikian, nantinya setelah negara yang bersangkutan telah maju maka ketimpangan pembangunan regional akan berkurang (*convergence*).



b. Model Pertumbuhan Endogen

Model pertumbuhan endogen dikembangkan untuk melengkapi teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik. Model pertumbuhan neo-klasik berargumen bahwa pertumbuhan output didorong oleh tingkat perkembangan teknologi. Tanpa perkembangan teknologi, tidak akan ada pertumbuhan jangka panjang. Tetapi karena penyebab perkembangan teknologi tidak dijelaskan dalam model Solow, sehingga dasar terjadinya pertumbuhan masih kurang jelas. Karena Solow menganggap teknologi sebagai faktor eksogen dalam proses pertumbuhan maka model pertumbuhannya tidak memperhatikan bagaimana mendorong kemajuan teknologi melalui proses belajar (*learning by doing*), investasi dalam penelitian dan akumulasi pengetahuan (Capello, 2007).

Teori pertumbuhan endogen pada awalnya berkembang dalam dua cabang pemikiran yang bertumpu pada pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam perekonomian, yaitu:

1. Pemikiran yang percaya bahwa *knowledge stock* adalah sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi.
2. Pemikiran yang menekankan pada pentingnya *learning by doing* dan *human capital* dengan introduksi hal-hal baru (yang bersifat eksternal) dalam perekonomian merupakan faktor pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian.

Pemikiran bahwa stok pengetahuan merupakan salah satu faktor produksi yang semakin meningkat dikembangkan oleh Romer. Tingkat pertumbuhan dapat terus meningkat sesuai dengan kemampuan masing-masing negara dalam

meningkatkan dan menciptakan stok pengetahuan. Oleh karena itu negara maju yang memiliki kemampuan menciptakan pengetahuan yang lebih cepat dibandingkan dengan negara berkembang akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Hal ini sekaligus menolak teori konvergensi dari neo-klasik, karena konvergensi tidak bisa secara otomatis terjadi dalam perekonomian.

Model Romer menekankan pada akumulasi pengetahuan dalam upaya mencapai pertumbuhan jangka sehingga bisa mencapai kondisi konvergen. Oleh karena itu variabel modal dalam pertumbuhan agregat neo-klasik sekarang sudah memperhitungkan unsur akumulasi pengetahuan. Tiga elemen utama dalam model Romer yaitu:

1. Adanya unsur eksternalitas, sebagai akibat kemajuan ilmu pengetahuan.
2. Adanya peningkatan skala hasil yang semakin meningkat, yang menyebabkan peningkatan spesialisasi dan pembagian kerja.
3. Semakin pendeknya waktu pemanfaatan ilmu pengetahuan, karena pesatnya perkembangan di sektor riset.

Secara umum model Romer dirumuskan sebagai berikut:

$$Y_{it} = K_{it}^{\alpha} L_{it}^{1-\alpha} K_t^{\beta} \text{ dengan } 0 < \alpha < 1; 0 < \beta < 1 \quad (2.3)$$

Keterangan:

Y_i : output produksi perusahaan i

K_i : stok modal

L_i : tenaga kerja

K : stok pengetahuan/teknologi (*technical knowledge*) agregat.

K diasumsikan mempunyai efek menyebar yang positif terhadap produksi setiap perusahaan (Todaro, 2006).

Model pertumbuhan endogen berikutnya dikemukakan oleh Lucas melalui model akumulasi *human capital* dengan *learning theory*. *Learning theory* memasukkan unsur eksternalitas yang terkandung dalam peningkatan kapital pada proses produksi. Peningkatan kapital akan meningkatkan stok *publik knowledge*, sehingga secara keseluruhan proses produksi dalam skala yang bersifat *increasing return to scale*. Akumulasi modal manusia dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun bukan jalur pendidikan formal (*on the job training*). Eksternalitas yang dihasilkan oleh investasi dalam pendidikan umum (termasuk kegiatan produksi) serta investasi dalam beberapa kegiatan tertentu inilah yang menyebabkan proses bersifat *learning by doing*.

Model yang dikembangkan oleh Lucas menggunakan dua jenis modal, yaitu modal fisik dan modal manusia. Rumusan yang digunakan Lucas adalah sebagai berikut:

$$Y_t = AK_{it}^\alpha (u_t H_t L_t)^{1-\alpha} H_t^\theta \quad (2.4)$$

Keterangan:

Y_t : output produksi

A : konstanta

K : stok modal

L : tenaga kerja

u : waktu yang digunakan untuk pekerja untuk memproduksi

H : kualitas dari *human capital* yang merupakan rata-rata banyaknya pengetahuan yang dimiliki oleh pekerja.

Dengan Ht yang meningkat sejalan dengan ut maka fungsi produksi akan bersifat *Increasing Return To Scale* dimana Ht bersifat eksternal yang bergantung pada tingkat ketrampilan rata-rata tenaga kerja dalam perusahaan tersebut (Capelo, 2007).

c. Hipotesis Kuznets

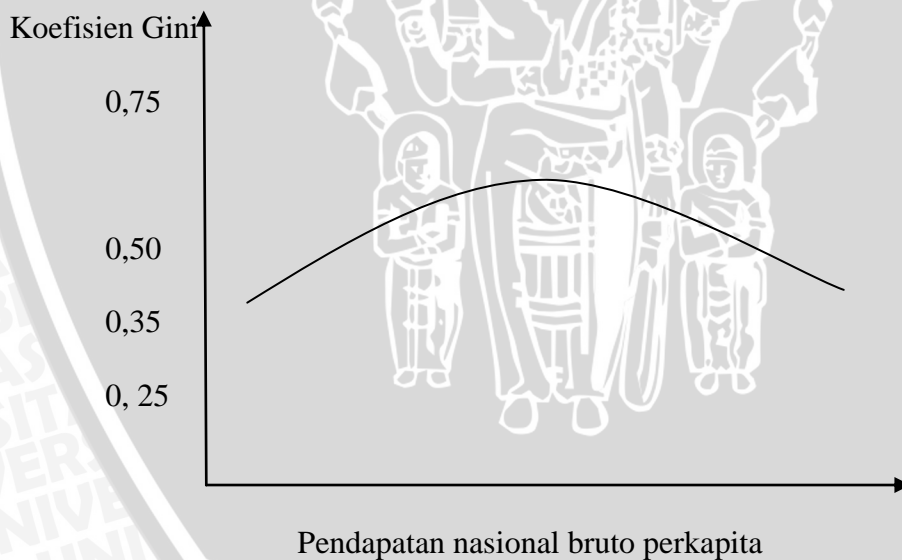
Menurut (Simon Kuznets, 1955) dalam (Kuncoro 2006) membuat hipotesis adanya kurva U terbalik (*Inverted U Curve*) bahwa mula-mula ketika pembangunan dimulai, distribusi pendapatan akan makin tidak merata, namun setelah mencapai suatu tingkat pembangunan tertentu, distribusi pendapatan semakin merata. Menurut Kuznet, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari Negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan atau dimungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologis terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada (Todaro,2004).

Professor Kusnetz mengemukakan enam karakteristik atau ciri proses pertumbuhan ekonomi yang bisa ditemui di hampir semua Negara yang sekarang maju sebagai berikut :

- a) Tingkat pertumbuhan out-put perkapita dan pertumbuhan penduduk tinggi
- b) Tingkat kenaikan produktivitas faktor total tinggi.
- c) Tingkat transformasi struktural ekonomi tinggi.

- d) Tingkat transformasi sosial dan ideologi tinggi.
- e) Adanya kecenderungan Negara-negara yang mulai atau sudah maju perekonomiannya untuk berusaha merambah bagian-bagian dunia lainnya sebagai daerah pemasaran dan sumber bahan baku yang baru.
- f) Terbatasnya penyebaran pertumbuhan ekonomi yang hanya mencapai sepertiga bagian penduduk dunia.

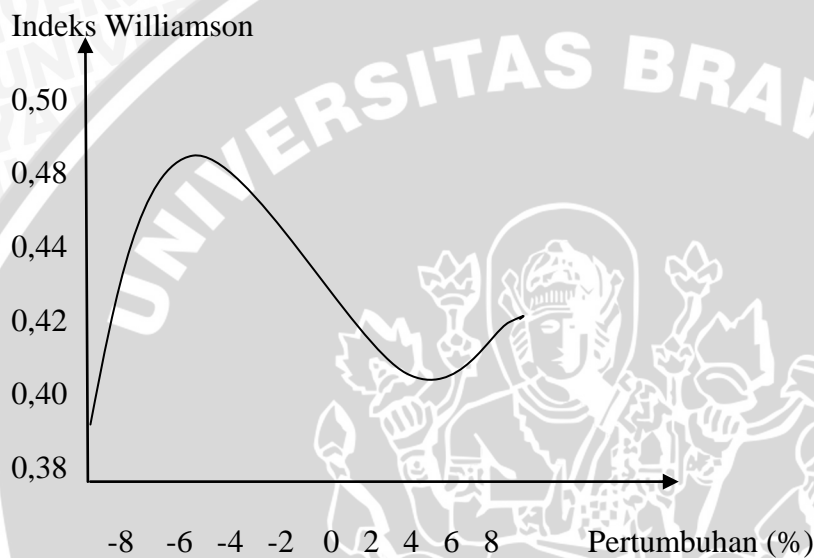
Dua faktor yang pertama lazim disebut sebagai variable-variabel ekonomi agregat. Sedangkan nomor tiga dan empat biasa disebut sebagai variabel-variabel transformasi struktural. Adapun dua faktor yang terakhir disebut sebagai variabel-variabel yang mempengaruhi penyebaran pertumbuhan ekonomi secara internasional (Todaro, 2004).



Sumber: Todaro 2006

Gambar 1 Kurva Kuznets “U-Terbalik”

Sebelumnya Hipotesis Kuznets pernah dibuktikan oleh Sutarno dan Mudrajad Kuncoro pada Kabupaten Banyumas. Pada penelitiannya Sutarno dan Mudrajad Kuncoro (2003) menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan dan melihat hubungannya terhadap pertumbuhan PDRB di Kabupaten Banyumas.



Sumber: Sutarno dan Kuncoro (2003)

**Gambar 2 Kurva Hubungan antara Indeks Williamson dengan
Pertumbuhan PDRB Kabupaten Banyumas, 1994-2000**

Hasil dari penelitian (Sutarno dan Mudrajad Kuncoro, 2003) menunjukkan kurva berbentuk U terbalik, dimana pada pertumbuhan awal ketimpangan memburuk dan pada tahap-tahap berikutnya ketimpangan menurun, namun pada suatu waktu akan terjadi peningkatan ketimpangan lagi dan akhirnya akan menurun lagi sehingga dapat dikatakan peristiwa tersebut seperti berulang kembali. Pada akhirnya analisis kuznets (Todaro, 2006) menyatakan bahwa pertumbuhan di negara-negara maju tidak menyebabkan negara-negara

berkembang ikut tumbuh, hal ini dikarenakan negara berkembang tidak mampu mengikuti pertumbuhan negara-negara maju tersebut, sehingga terjadilah kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang dalam pertumbuhan ekonominya. Kritik utama terhadap kuva Kuznets adalah hasil ini sangat sensitif terhadap ukuran *inequality* dan pemilihan set data. Dengan melakukan pemilihan yang berbeda, seseorang bisa mendapat kurva U, kurva U terbalik, atau tidak ada hubungan sama sekali.

4. Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan

Desentralisasi fiskal merupakan salah satu komponen utama dari desentralisasi, dimana apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya dan diberikan kebebasan dalam mengambil keputusan di sektor publik, maka harus mendapat dukungan dari Pemerintah Pusat berupa subsidi/bantuan maupun pinjaman dari Pemerintah Pusat serta sumber-sumber keuangan yang memadai, baik yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (Suparno, 2010). Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama antara lain fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz, 2000). Fungsi Alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam

mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.

Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Adanya otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan akan lebih pemeratakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing (Sasana, 2009). Otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada transformasi ekonomi, transformasi tenaga kerja dan transformasi kelembagaan. Menurut (Barzelay, 1991) mengatakan pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat.
3. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh dua sumber dana untuk melakukan pembangunan, yaitu yang berasal dari pendapatan asli daerahnya dan dana transfer dari pusat. Dana transfer dari pusat diberikan sebagai dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana perimbangan bertujuan mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan antar pemerintah daerah. Dana perimbangan digunakan untuk melakukan pengembangan ekonomi lokal, dana tersebut bersumber dari:

a) Dana Bagi Hasil (DBH)

Dana bagi hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, misalnya dana bagi hasil pajak (DBHP) dan dana bagi hasil bukan pajak (DBHBP).

b) Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

c) Dana Alokasi Khusus (DAK)

Merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

5. Teori Perkembangan Pengeluaran Pemerintah: Teori Musgrave dan Rostow

Musgrave dan Rostow dalam Mangkunsoebroto (1998) mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sector swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap menengah ini peranan pemerintah masih tetap besar karena peranan swasta yang semakin besar ini akan banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga pemerintah harus banyak menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan kualitas yang

lebih baik. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Musgrave dan Rostow pada tahap lanjutan pembangunan ekonomi, investasi swasta dalam persentase GNP semakin besar, dan investasi pemerintah dalam persentase GNP semakin kecil. Melalui teori ini Musgrave dan Rostow berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah akan beralih dari penyediaan barang dan jasa publik menjadi pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas social, misalnya program kesehatan hari tua, program kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Teori perkembangan pengeluaran pemerintah yang dikemukakan oleh Musgrave dan Rostow ini adalah suatu pandangan yang di dasarkan pada pengamatan-pengamatan di banyak Negara, tetapi tidak didasarkan oleh suatu teori tertentu.

6. Ketimpangan Pembangunan Wilayah

Secara teoritis, permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah mula-mula dimunculkan oleh Douglas C North dalam analisisnya tentang teori pertumbuhan Neo-klasik. Dalam analisa tersebut dimunculkan sebuah prediksi tentang hubungan antara tingkat pembangunan ekonomi nasional suatu Negara dengan ketimpangan pembangunan antar wilayah. Hipotesa ini kemudian lazim dikenal sebagai Hipotesa Neo-klasik (Sjafrizal,2008). Menurut hipotesa Neo-klasik, pada permulaan proses pembangunan suatu Negara, ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung meningkat. Proses ini akan terjadi sampai ketimpangan tersebut mencapai titik puncak. Setelah itu bila proses pembangunan

terus berlanjut, maka secara berangsur-angsur ketimpangan pembangunan antar wilayah akan tersebut akan menurun (Sjafrizal, 2008).

Myrdal dalam Jingham (1990), mengatakan bahwa ketimpangan wilayah berkaitan erat dengan system kapitalis yang dikendalikan oleh motif laba. Motif laba inilah yang mendorong berkembangnya pembangunan terpusat di wilayah-wilayah yang memiliki harapan laba tinggi, sementara wilayah-wilayah yang lainnya tetap terlantar. Lincoln Arsyad (1997) juga berpendapat perbedaan tingkat pembangunan ekonomi antar wilayah menyebabkan perbedaan tingkat kesejahteraan antar wilayah. Ekspansi ekonomi suatu daerah akan mempunyai pengaruh yang merugikan bagi daerah-daerah lain, karena tenaga kerja yang ada, modal, perdagangan akan pindah ke daerah yang melakukan ekspansi tersebut.

Pada kenyataannya ketimpangan tidak dapat dihilangkan dalam pembangunan suatu daerah. disatu sisi dengan adanya ketimpangan, maka akan memberikan dorongan kepada daerah yang terbelakang untuk dapat berusaha meningkatkan kualitas hidupnya agar tidak jauh tertinggal dengan daerah sekitarnya. Disamping itu daerah-daerah tersebut akan bersaing guna meningkatkan kualitas hidupnya, sehingga ketimpangan dalam hal ini memberikan dampak positif. Namun disatu sisi, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan dengan semakin tingginya ketimpangan antar wilayah. Hal tersebut berupa inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi dipandang tidak adil (Todaro, 2006).

Adapun faktor-faktor utama yang menyebabkan terjadinya ketimpangan pembangunan wilayah adalah sebagai berikut :

1. Perbedaan kandungan Sumber Daya Alam

Indonesia yang merupakan suatu Negara kepulauan yang sangat besar. Demikian pula dengan kandungan sumber daya alam yang sangat besar pada masing-masing daerah dengan komposisi yang berbeda-beda juga. Perbedaan kandungan sumber daya alam ini jelas akan mempengaruhi kegiatan produksi daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kandungan sumber daya alam yang cukup tinggi akan dapat memproduksi barang-barang tertentu dengan biaya relatif murah dibandingkan dengan daerah lain yang mempunyai kandungan sumber daya alam lebih rendah. Kondisi ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang bersangkutan menjadi lebih cepat. Sedangkan daerah yang kandungan sumber daya alamnya lebih kecil cenderung akan mengalami pertumbuhan yang lambat.

2. Perbedaan Kondisi Demografis

Kondisi demografis dalam hal ini menyangkut perbedaan tingkat pertumbuhan dan struktur kependudukan, perbedaan tingkat pendidikan dan kesehatan, perbedaan kondisi ketenagakerjaan, dan perbedaan dalam hal tingkah laku serta etos kerja masyarakat daerah yang bersangkutan. Pengaruhnya dalam hal ketimpangan pembangunan wilayah adalah bahwa akan berpengaruh terhadap produktivitas kerja masyarakat pada daerah yang bersangkutan. Daerah dengan kondisi demografis yang baik akan cenderung mempunyai produktivitas kerja yang lebih tinggi sehingga hal ini akan mendorong peningkatan investasi dan selanjutnya akan

meningkatkan penyediaan lapangan kerja dan pertumbuhan daerah yang bersangkutan.

3. Kurang Lancarnya Mobilitas Barang dan Jasa.

Mobilitas barang (perdagangan) antar daerah tentu akan mempengaruhi ketimpangan pembangunan antar wilayah. Sebagaimana ditunjukkan oleh *Teori Heckser-Ohlin* dalam Ilmu ekonomi internasional bahwa apabila kegiatan perdagangan internasional dan antar wilayah kurang lancar maka penyamaan harga faktor produksi (*factor price equalization*) akan terganggu. Akibatnya penyebaran proses pembangunan akan terhambat dan ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung menjadi tinggi. Mobilitas barang dan jasa ini meliputi kegiatan perdagangan antar daerah. kurang lancarnya mobilitas barang dan jasa, maka kelebihan produksi suatu daerah tidak dapat dijual ke daerah lain yang membutuhkan. Demikian pula halnya dengan migrasi yang kurang lancar menyebabkan kelebihan tenaga kerja suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan daerah lain yang sangat membutuhkan. Hal tersebut akan menimbulkan ketimpangan pembangunan antar wilayah karena kelebihan suatu daerah tidak dapat dimanfaatkan oleh yang membutuhkan sehingga daerah terbelakang sulit mendorong proses pembangunannya.

4. Konsentrasi Kegiatan Ekonomi Wilayah

Konsentrasi kegiatan ekonomi antar daerah yang cukup tinggi akan cenderung mendorong meningkatnya ketimpangan pembangunan antar wilayah karena proses pembangunan akan lebih cepat pada daerah dengan

konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih tinggi. Demikian pula sebaliknya, terjadi pada daerah dengan konsentrasi kegiatan ekonomi yang lebih rendah. Pertumbuhan ekonomi akan cenderung lebih cepat pada daerah dimana terdapat konsentrasi kegiatan ekonomi yang cukup besar. Kondisi tersebut selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui peningkatan penyediaan lapangan kerja dan tingkat pendapatan masyarakat. Demikian pula apabila konsentrasi kegiatan ekonomi pada suatu daerah relatif rendah yang selanjutnya juga mendorong terjadinya pengangguran dan rendahnya tingkat pendapatan masyarakat setempat. Konsentrasi kegiatan ekonomi tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, terdapatnya sumberdaya alam yang lebih banyak pada daerah tertentu, misalnya minyak bumi, gas, batu bara, dan bahan mineral lainnya. *Kedua*, meratanya fasilitas transportasi, baik darat, laut, dan udara juga ikut mempengaruhi konsentrasi kegiatan ekonomi antardaerah. *Ketiga*, kondisi demografis (kependudukan) juga ikut mempengaruhi karena kegiatan ekonomi akan cenderung terkonsentrasi dimana sumberdaya manusia tersedia dengan kualitas yang baik.

5. Alokasi Dana Pembangunan Antar Wilayah.

Investasi merupakan salah satu faktor yang sangat menentukan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. karena itu, daerah yang dapat menarik lebih banyak investasi pemerintah dan investasi swasta akan cenderung memiliki tingkata pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Selanjutnya akan mendorong proses pembangunan daerah melalui penyediaan tenaga

kerja yang lebih banyak dan tingkat pendapatan perkapita yang lebih tinggi. Alokasi investasi pemerintah kedaerah lebih banyak ditentukan oleh system pemerintahan daerah yang dianut . bila system pemerintahan daerah yang dianut bersifat sentralistik,maka alokasi dana pemerintah akan cenderung lebih banyak dialokasikan pada pemerintah pusat sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah akan cenderung tinggi. Namun, apabila system pemerintahan yang dianut adalah otonomi daerah atau federal,maka alokasi dana akan lebih banyak dialokasikan ke daerah sehingga ketimpangan pembangunan antar wilayah cenderung lebih rendah. Tidak demikian halnya dengan investasi swasta yang lebih banyak ditentukan oleh kekuatan pasar. Kekuatan yang berperan banyak dalam menarik investasi swasta kesutau daerah adalah keuntungan lokasi yang dimiliki daerah tertentu. Sedangkan keuntungan lokasi tersebut ditetntukan oleh ongkos transportasi,baik untuk bahan baku maupun hasil produksi yang harus dikeluarkan oleh pengusaha,perbedaan upah buruh,konsentrasi pasar,tingkat persaingan usaha,dan sewa tanah. Termasuk keuntungan aglomerasi yang timbul karena terjadinya konsentrasi beberapa kegiatan ekonomi terkait pada suatu daerah tertentu. Karena itu, tidaklah mengherankan apabila investasi cenderung lebih banyak terkonsentrasi didaerah perkotaan dibanding dengan daerah pedesaan sehingga daerah perkotaan cenderung tumbuh lebih cepat dibandingkan daerah pedesaan (Sjafrizal, 2008).

7. Indeks Williamson.

Indeks Williamson merupakan salah satu alat ukur untuk mengukur tingkat ketimpangan daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Safrizal, 1997).

Adapun rumus yang digunakan sebagai berikut (Safrizal, 1997):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}} \quad 0 < V_w < 1$$

Dimana:

V_w = Indeks Williamson.

f_i = Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

n = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur

y_i = PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota.

\bar{y} = PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur.

8. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah pada periode tertentu adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada

dasarnya merupakan nilai tambah (*value added*) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun, sedang PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan harga yang berlaku pada satu waktu tertentu sebagai tahun dasar (BPS, 2000).

Perkembangan PDRB ADHB dari tahun ke tahun menggambarkan perkembangan yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam volume produksi barang dan jasa yang dihasilkan dan perubahan dalam tingkat harganya dan menunjukkan pendapatan yang dapat dinikmati oleh penduduk suatu daerah serta menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada setiap tahun. PDRB ADHB ini digunakan untuk melihat struktur ekonomi pada suatu tahun. Oleh karenanya untuk dapat mengukur perubahan volume produksi atau perkembangan produktivitas secara nyata, faktor pengaruh atas perubahan harga perlu dihilangkan dengan cara menghitung PDRB ADHK.

Penghitungan atas dasar harga konstan ini berguna antara lain dalam perencanaan ekonomi, proyeksi dan untuk menilai pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun sektoral. PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga konstan apabila dikaitkan dengan data mengenai tenaga kerja dan barang modal yang dipakai dalam proses produksi, dapat memberikan gambaran tentang tingkat produktivitas dan kapasitas produksi dari masing-masing lapangan usaha tersebut.

Penghitungan PDRB ada tiga pendekatan yang dapat digunakan, antara lain (BPS, 2000):

a. Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah tertentu pada periode tertentu (biasanya satu tahun). Nilai tambah merupakan hasil pengurangan output dengan input antara.

Unit-unit produksi dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) lapangan usaha (sektor).

PDRB menurut lapangan usaha dikelompokkan dalam sembilan sektor:

- a. Pertanian (tanaman bahan makanan, perkebunan, peternakan, kehutanan dan perikanan)
- b. Pertambangan dan Penggalian
- c. Industri Pengolahan
- d. Listrik, Gas dan Air Bersih
- e. Konstruksi
- f. Perdagangan, Hotel dan Restoran
- g. Pengangkutan dan Komunikasi
- h. Keuangan, Persewaan dan Jasa perusahaan
- i. Jasa-jasa

Untuk tujuan penyederhanaan sembilan sektor tersebut dikelompokkan dalam sektor primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer terdiri atas sektor 1 dan 2 (pertanian; pertambangan dan penggalian), sektor sekunder terdiri atas sektor 3, 4 dan 5 (industri pengolahan; listrik, gas dan air bersih; konstruksi) sedangkan sektor tersier terdiri dari sektor 6, 7, 8 dan 9 (perdagangan, hotel dan restoran; pengangkutan dan komunikasi; keuangan, persewaan dan jasa perusahaan; dan jasa-jasa).

b. Pendekatan Pendapatan

PDRB merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu (biasanya satu tahun). Balas jasa faktor produksi tersebut adalah upah dan gaji (balas jasa tenaga kerja), sewa tanah (balas jasa tanah), bunga modal (balas jasa modal) dan keuntungan (balas jasa kewiraswastaan), semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak tak langsung dikurangi subsidi).

c. Pendekatan Pengeluaran

PDRB adalah jumlah semua komponen permintaan akhir yang terdiri dari: (1) pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta nirlaba, (2) konsumsi pemerintah, (3) pembentukan modal tetap domestik bruto, (4) perubahan stok dan (5) ekspor neto (ekspor dikurangi impor). Dengan kata lain, PDRB merupakan jumlah dari empat kelompok pengeluaran yaitu konsumsi, investasi, pembelian pemerintah, dan ekspor neto (Mankiw, 2007). Jika dituliskan ke dalam suatu formula, dimana PDRB disimbolkan dengan Y, maka

$$Y = C + I + G + NX$$

- a) Konsumsi (C) terdiri barang dan jasa yang dibeli rumah tangga. Konsumsi dibagi menjadi tiga subkelompok yaitu barang tidak tahan lama, barang tahan lama, dan jasa.
- b) Investasi (I) terdiri dari barang-barang yang dibeli untuk penggunaan masa depan.

c) Pembelian pemerintah (G) adalah barang dan jasa yang dibeli oleh pemerintah pusat, negara bagian, dan daerah. Kelompok ini meliputi peralatan militer, jalan layang, dan jasa yang diberikan pegawai pemerintah.

d) Ekspor neto (NX) memperhitungkan perdagangan dengan negara lain. Ekspor neto adalah nilai barang dan jasa yang diekspor ke negara lain dikurangi nilai barang dan jasa yang diimpor dari negara lain.

PDRB per kapita merupakan gambaran nilai tambah yang bisa diciptakan oleh masing-masing penduduk akibat dari adanya aktivitas produksi. Nilai PDRB per kapita didapatkan dari hasil bagi antara total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. PDRB per kapita sering digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran penduduk suatu daerah. Apabila data tersebut disajikan secara berkala akan menunjukkan adanya perubahan kemakmuran. Menurut Jhingan (2010), kenaikan pendapatan per kapita dapat tidak menaikkan standar hidup riil masyarakat apabila pendapatan per kapita meningkat akan tetapi konsumsi per kapita turun. Hal ini disebabkan kenaikan pendapatan tersebut hanya dinikmati oleh beberapa orang kaya dan tidak oleh banyak orang miskin. Di samping itu, rakyat mungkin meningkatkan tingkat tabungan mereka atau bahkan pemerintah sendiri menghabiskan pendapatan yang meningkat itu untuk keperluan militer atau keperluan lain.

9. Hubungan PDRB Dengan Ketimpangan Pembangunan

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dengan kenaikan PDRB per kapita tanpa memandang apakah kenaikan tersebut besar atau kecil dari penambahan penduduk (Arsyad, 1997). Menurut Todaro (2004), laju pertumbuhan pertumbuhan yang tinggi tidak selalu memperburuk distribusi pendapatan. Di dalam bukunya (Todaro, 2006) mengemukakan karakter pertumbuhan ekonomi (*character of economic growth*) yaitu bagaimana cara mencapainya, siapa yang berperan serta, sektor-sektor mana saja yang mendapat prioritas, lembaga-lembaga apa yang menyusun dan yang mengatur, dan sebagainya. Karakter pertumbuhan ekonomi ini yang menentukan apakah pertumbuhan ekonomi mempengaruhi perbaikan taraf kehidupan masyarakat miskin atau tidak. Oleh karena itu, tingkat pertumbuhan ekonomi yang cepat tidak dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan atau perbaikan distribusi keuntungan bagi segenap penduduk.

Mengikuti Hipotesa Neo-Klasik variabel yang dapat digunakan sebagai variabel independen adalah pendapatan perkapita (PDRB perkapita) yang menunjukkan tingkat pembangunan suatu negara (Sjafrizal, 2008). Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dapat mencerminkan keberhasilan pembangunan pada wilayah tersebut. Apabila suatu wilayah dapat meningkatkan laju pertumbuhan ekonominya maka wilayah tersebut dapat dikatakan sudah mampu melaksanakan pembangunan ekonomi dengan baik. Ketika pendapatan per kapita meningkat dan merata maka kesejahteraan masyarakat akan tercipta dan ketimpangan akan

berkurang. Ada teori yang mengatakan bahwa ada *trade off* antara ketidakmerataan dan pertumbuhan (Mudrajad Kuncoro, 2006).

10. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Mardiasmo (2002: 132), “pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”. Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah disebutkan bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak. Pendapatan Asli Daerah sendiri terdiri dari:

1. pajak daerah,
2. retribusi daerah,
3. hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan,
4. lain-lain PAD yang sah.

Klasifikasi PAD yang terbaru berdasarkan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 terdiri dari: pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Jenis pajak daerah dan retribusi daerah dirinci menurut objek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/ BUMD, bagian laba

atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/ BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam pajak daerah, retribusi daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah, penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan / atau jasa oleh daerah, penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing, pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, pendapatan denda pajak, pendapatan denda retribusi. Pendapatan hasil eksekusi atau jaminan, pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Menurut Halim (2004: 67), "PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu: pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah". Klasifikasi PAD yang dinyatakan oleh Halim (2004:67) adalah sesuai dengan klasifikasi PAD berdasarkan Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002.

1. Pajak Daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Saragih (2003:61), yang dimaksud dengan pajak daerah adalah "iuran wajib yang

dilakukan oleh orang pribadi dan badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah”. Menurut Halim (2004:67), “pajak daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari pajak”. Jenis-jenis pajak daerah untuk kabupaten/kota menurut Kadjatmiko (2002:77) antara lain ialah:

1. Pajak hotel,
2. Pajak restoran,
3. Pajak hiburan,
4. Pajak reklame,
5. Pajak penerangan jalan,
6. Pajak pengambilan bahan galian golongan C,
7. Pajak parkir

2. Retribusi Daerah

Yang dimaksud dengan retribusi menurut Saragih (2003:65) adalah “pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemda untuk kepentingan orang pribadi atau badan”. Menurut Halim (2004:67), “Retribusi daerah merupakan pendapatan daerah yang berasal dari retribusi daerah”.

Retribusi untuk kabupaten/kota dapat dibagi menjadi 2, yakni:

1. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai kewenangan masing-masing daerah, terdiri dari: 10 jenis retribusi jasa umum, 4 jenis retribusi perizinan tertentu,

2. Retribusi untuk kabupaten/kota ditetapkan sesuai jasa/pelayanan yang diberikan oleh masing-masing daerah, terdiri dari: 13 jenis retribusi jasa usaha.

(Kadajtmiko,2002:78).

Jenis pendapatan retribusi untuk kabupaten/kota meliputi objek pendapatan berikut:

1. Retribusi pelayanan kesehatan,
2. Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan,
3. Retribusi pergantian biaya cetak KTP,
4. Retribusi pergantian cetak akta catatan sipil,
5. Retribusi pelayanan pemakaman,
6. Retribusi pelayanan pengabuan mayat,
7. Retribusi pelayanan parkir ditepi jalan umum,
8. Retribusi pelayanan pasar,
9. Retribusi pengujian kendaraan bermotor,
10. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran,
11. Retribusi penggantian biaya cetak peta,
12. Retribusi pengujian kapal perikanan,
13. Retribusi pemakaian kekayaan daerah,
14. Retribusi jasa usaha pasar grosir atau pertokoan,
15. Retribusi jasa usaha tempat pelelangan,
16. Retribusi jasa usaha terminal,
17. Retribusi jasa usaha tempat khusus parkir,
18. Retribusi jasa usaha tempat penginapan/pesanggrahan/villa,

19. Retribusi jasa usaha penyedotan kakus,
20. Retribusi jasa usaha rumah potong hewan,
21. Retribusi jasa usaha pelayaran pelabuhan kapal,
22. Retribusi jasa usaha tempat rekreasi dan olah raga,
23. Retribusi jasa usaha penyebrangan diatas air,
24. Retribusi jasa usaha pengolahan limbah cair,
25. Retribusi jasa usaha penjualan produksi usaha daerah,
26. Retribusi izin mendirikan bangunan,
27. Retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol,
28. Retribusi izin gangguan,
29. Retribusi izin trayek. (Halim,2004:68).

3. Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang Dipisahkan

Menurut Halim (2004:68), “Hasil perusahaan milik Daerah dan hasil Pengelolaan kekayaan milik Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik Daerah dan pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan”. Menurut Halim (2004:68), jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut: “1) bagian laba Perusahaan mliki Daerah, 2) bagian laba lembaga keuangan Bank, 3) bagian laba lembaga keuangan non Bank, 4) bagaian laba atas penyertaan modal/investasi”.

4. Lain-Lain PAD yang Sah

Menurut Halim (2004:69), “pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah Daerah”. Menurut Halim (2004:69),

jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut, “1) hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan, 2) penerimaan jasa giro, 3) penerimaan bunga deposito, 4) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan, 5) penerimaan ganti rugi atas kerugian/kehilangan kekayaan Daerah”.

11. Hubungan PAD dengan Ketimpangan Pembangunan

Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan meningkatkan anggaran belanja daerah sehingga akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Ini dikarenakan anggaran tersebut dapat digunakan dalam mengoptimalkan dan menaikkan aktivitas pada sector-sector yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti industri, perdagangan, sektor jasa, dan sector-sector lainnya dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran Musgrave dan Rostow. Kegunaan PAD juga untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, dan pendidikan,. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia. Meskipun peran PAD yang tidak begitu besar dibanding dengan DAU, tetapi setidaknya peran PAD dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.

12. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU adalah transfer dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah otonom dalam bentuk blok, artinya penggunaan dari DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Penggunaan DAU diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar kepada masyarakat daerah. DAU ini dapat dianggap pengganti subsidi daerah otonom dan sebagian dana inpres di masa lalu (pada masa pemberlakuan UU No. 32/1956).

Dalam UU No. 25 tahun 1999 tujuan alokasi DAU adalah menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga daerah kurang mampu akan mendapat alokasi DAU yang relatif besar. Penetapan DAU menurut UU No. 33/2004 dialokasikan minimum sebesar 26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto yang ditetapkan dalam APBN. Selanjutnya 10% dari dana tersebut akan diberikan kepada pemerintah provinsi dan 90% kepada pemerintah kabupaten dan kota. Perumusan besaran transfer dana DAU dilakukan oleh DPOD dan menteri keuangan. DPOD memberikan pertimbangan atas rancangan kebijakan formula dan perhitungan DAU kepada presiden sebelum penyampaian nota keuangan dan RAPBN tahun anggaran berikutnya. Menteri keuangan melakukan perumusan formula dan penghitungan alokasi DAU dengan memperhatikan pertimbangan DPOD. Menteri Keuangan menyampaikan formula dan perhitungan DAU sebagai bahan penyusunan RAPBN. Rumus DAU sebaiknya didasarkan atas formula

sederhana, mudah dipahami dan dihitung oleh daerah bila data tersedia. Selain itu perhitungan yang dibuat juga harus logis, dalam pengertian memenuhi kaidah prinsip teori serta harus konsisten. Formula alokasi DAU harus memiliki variabel yang datanya terdapat di setiap daerah dan harus dapat dipertanggungjawabkan. Alokasi DAU untuk daerah dihitung dengan menggunakan formula, celah fiskal dan alokasi dasar. Celah fiskal adalah kondisi keuangan pemerintah daerah yang terkait dengan kebutuhan fiskalnya dan kapasitas fiskal. Sedangkan alokasi dasar adalah kebutuhan dana daerah untuk membayar gaji dan tunjangan PNS.

Secara umum formulasi dasar dari DAU ke suatu daerah adalah sebagai berikut:

$$\text{DAU} = \text{CF} + \text{AD}$$

dimana,

DAU = Dana Alokasi Umum

CF = Celah Fiskal = Kebutuhan Fiskal – Kapasitas Fiskal

AD = Alokasi Dasar

Operasionalisasi perhitungan DAU, baik untuk tingkat provinsi maupun tingkat kabupaten/kota, didasarkan atas perumusan umum sebagai berikut:

$$\text{DAU Prov}_{(i)} = \frac{\text{CF Prov}_{(i)}}{\sum \text{CF Prov}} \times \text{Alokasi DAU Prov}$$

$$\text{DAU Kab/Kota } (i) = \frac{\text{CF Kab/Kota } (i)}{\sum \text{CF Kab/Kota}} \times \text{Alokasi DAU Kab/Kota}$$

Sedangkan penetapan kebutuhan dan kapasitas fiskal daerah diperoleh melalui perumusan sebagai berikut:

Kebutuhan Fiskal = TBDR x

- α_1 Indeks PDRB per kapita
- α_2 Indeks pembangunan manusia
- α_3 Indeks kemahalan konstruksi
- α_4 Indeks luas wilayah
- α_5 Indeks jumlah penduduk

dimana:

TBDR = Total Belanja Daerah Rata-rata = $\frac{B. Pegawai + B. Barang + B. Modal}{Jmlh Prov atau Kab/Kota}$

α = Bobot masing-masing indeks yang didapat dari hasil uji ekonometrika

Indeks Jumlah Penduduk_(i) = $\frac{\text{Jumlah penduduk daerah}_{(i)}}{\text{Jumlah penduduk secara nasional}}$

Indeks Luas Wilayah_(i) = $\frac{\text{Luas wilayah daerah}_{(i)}}{\text{Luas wilayah secara nasional}}$

Indeks Kemahalan Konstruksi Wilayah_(i) = $\frac{\text{Indeks kemahalan konstruksi daerah}_{(i)}}{\text{Rata-rata indeks kemahalan secara nasional}}$

Indeks Pembangunan Manusia Wilayah_(i) = $\frac{\text{Indeks Pemb Manusia daerah}_{(i)}}{\text{Rata-rata indeks Pemb Manusia nasional}}$

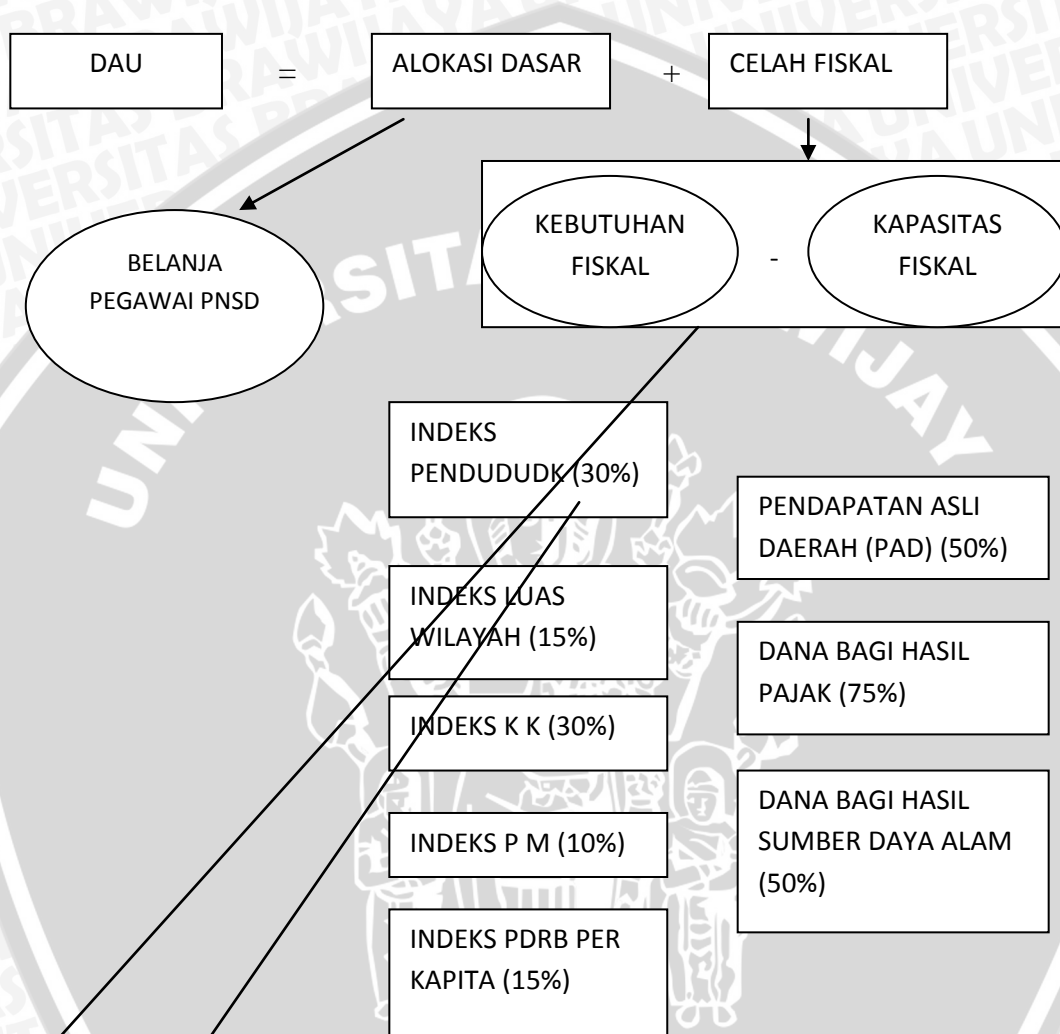
Indeks PDRB per kapita Wilayah_(i) = $\frac{\text{PDRB per kapita daerah}_{(i)}}{\text{Rata-rata PDRB per kapita nasional}}$

Sedangkan kapasitas fiskal daerah merupakan fungsi penerimaan potensial daerah yang berasal dari sumber-sumber resmi yang telah ditetapkan oleh UU.

Adapun perhitungan kapasitas fiskal daerah dapat dirumuskan sebagai berikut:

Kapasitas Fiskal = PAD + Dana Bagi Hasil

Formulasi dana alokasi umum 2009 di hitung dengan adalah sebagai berikut:



$$\text{KbF} = \text{TBR}(a_1 \text{ IP} + a_2 \text{ LW} + a_3 \text{ IKK} + a_4 \text{ IPM} + a_5 \text{ PDRB Per Kapita})$$

Gambar 2.1 Formulasi DAU tahun 2009

Sumber: Kemenkeu (2011)

13. Hubungan DAU dengan Ketimpangan Pembangunan

Dana Alokasi Umum, selanjutnya disebut DAU, adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU adalah transfer dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah otonom dalam bentuk blok, artinya penggunaan dari DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Penggunaan DAU diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar kepada masyarakat daerah.

Menurut Sidik *et al.* (2002), Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Penggunaan dana alokasi umum ditetapkan oleh daerah, termasuk di dalam pengertian pemerataan kemampuan keuangan daerah adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemerintah daerah dalam penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan satu kesatuan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Terkait dengan perhitungan DAU dimana DAU digunakan sebagai instrument perimbangan keuangan antar daerah dengan konsep yang dipakai adalah kesenjangan fiskal (*fiscal gap*). Secara konsep, DAU digunakan untuk menutup kesenjangan yang terjadi karena kebutuhan daerah ternyata lebih besar dari potensi daerah (kapasitas fiskal). Dengan demikian, daerah-daerah yang mempunyai kapasitas fiskal relatif besar akan memperoleh DAU yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah-daerah yang miskin (kapasitas fiskal rendah).

Sama halnya dengan PAD, penggunaan DAU yang meningkat akan membuat anggaran belanja daerah meningkat juga. Menurut teori pengeluaran

seperti yang diungkapkan Musgrave dan Rostow bahwa pengeluaran pemerintah digunakan untuk peningkatan pembangunan manusia, pembangunan infrastruktur, dan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Sehingga daerah miskin yang mendapat DAU yang lebih besar, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat dan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi yang tercermin dari PDRB. Dengan kata lain, peningkatan DAU diharapkan juga akan memberikan manfaat dalam mengurangi ketimpangan antar daerah.

14. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Indeks ini pada 1990 dikembangkan oleh pemenang nobel India Amartya Sen dan Mahbub ul Haq seorang ekonom Pakistan dibantu oleh Gustav Ranis dari Yale University dan Lord Meghnad Desai dari London School of Economics dan sejak itu dipakai oleh Program Pembangunan PBB pada laporan HDI tahunannya. Digambarkan sebagai "pengukuran vulgar" oleh Amartya Sen karena batasannya indeks ini lebih fokus

pada hal-hal yang lebih sensitif dan berguna daripada hanya sekedar pendapatan perkapita yang selama ini digunakan, dan indeks ini juga berguna sebagai jembatan bagi peneliti yang serius untuk mengetahui hal-hal yang lebih terinci dalam membuat laporan pembangunan manusianya.

HDI mengukur pencapaian rata-rata sebuah negara dalam 3 dimensi dasar pembangunan manusia:

1. Hidup yang sehat dan panjang umur yang diukur dengan harapan hidup saatkelahiran.
2. Pengetahuan yang diukur dengan angka tingkat baca tulis pada orang dewasa (bobotnya dua per tiga) dan kombinasi pendidikan dasar, menengah, atas *gross enrollment ratio* (bobot satu per tiga).
3. Standar kehidupan yang layak diukur dengan GDP per kapita *gross domestic product*/produk domestik bruto dalam paritas kekuatan beli *purchasing power parity* dalam Dollar AS.

Komponen penyusunan IPM

1. Usia Hidup

Usia hidup diukur dengan angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*) yang dihitung dengan metode tidak langsung. Metode ini menggunakan dua macam data dasar yaitu rata-rata anak yang dilahirkan hidup (*live births*) dan rata-rata anak yang masih hidup (*still living*) per wanita usia 15-49 tahun menurut kelompok umur lima tahunan. Pada komponen angka umur harapan hidup, angka tertinggi sebagai batas atas untuk penghitungan indeks dipakai 85 tahun dan terendah adalah 25 tahun.

2. Pengetahuan

Untuk mengukur dimensi pengetahuan penduduk digunakan 2 indikator yaitu rata-rata lama sekolah (*mean year schooling*) dan angka melek huruf. Angka rata-rata lama sekolah menggambarkan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sedangkan angka melek huruf adalah persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin dan atau huruf lainnya. Proses penghitungannya, kedua indikator tersebut digabung setelah masing-masing diberi bobot. Rata-rata lama sekolah diberi bobot sepertiga dan angka melek huruf diberi bobot dua pertiga. Untuk penghitungan indeks, batas maksimum untuk angka melek huruf dipakai 100 dan minimum 0 (nol), yang menggambarkan kondisi 100 persen atau semua masyarakat mampu membaca dan menulis dan nilai 0 mencerminkan sebaliknya.

3. Standard Hidup Layak

Angka standard hidup layak bisa menggunakan indikator GDP perkapita riil yang telah disesuaikan (*adjusted real GDP per capita*) atau menggunakan indikator rata-rata pengeluaran perkapita riil yang disesuaikan (*adjusted real per capita expenditure*). Konsep Pembangunan Manusia yang dikembangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menetapkan peringkat kinerja pembangunan manusia pada skala 0,0 - 100,0 dengan kategori sebagai berikut:

1. Tinggi : IPM lebih dari 80,0

2. Menengah Atas : IPM antara 66,0 . 79,9
3. Menengah Bawah : IPM antara 50,0 . 65,9
4. Rendah : IPM kurang dari 50,0

15. Hubungan IPM dengan Ketimpangan Pembangunan

Seperti pada teori diatas, bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pembangunan manusia dapat diukur dengan nilai IPM. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Oleh karena, apabila tingkat nilai IPM tinggi, maka tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut juga tinggi.

Mengacu pada teori pertumbuhan endogen, bahwa modal manusia merupakan faktor penting dan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Maka dimungkinkan bahwa dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketimpangan pembangunan dapat berkurang.

B. Penelitian Terdahulu

Wantchhekon dan Tamar (2002), meneliti tentang *Transfer Dependence and Regional Disparitas: the Case of Nigeria*. Tujuan dari penelitian ini adalah meneliti dampak dari desentralisasi fiskal terhadap adanya dana transfer yang diberikan oleh pemerintah pusat dalam mengurangi disparitas antar daerah. Metode yang digunakan adalah Indeks Williamson, hasil penelitian yang dilakukan adalah semakin tingginya ketergantungan setiap daerah di Nigeria terhadap pusat khususnya bagian transfer, pengalokasian dana transfer tidak berdasarkan pada kriteria yang jelas seperti SDA (potensi daerah). Korelasi yang paling tinggi pengaruhnya dalam pengalokasian dana transfer adalah indikator jumlah penduduk (populasi) jika dibandingkan dengan indikator yang lain.

Mopanga (2010) melakukan penelitian Ketimpangan Pembangunan Dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo, dimana hasil penelitiannya menunjukkan bahwa perbedaan pada PDRB per kapita, Indeks Pembangunan Manusia dan Rasio Belanja Infrastruktur signifikan sebagai sumber utama ketimpangan. Lebih lanjut secara deskriptif, Mopanga (2010) mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan (Indeks Gini). Artinya secara vertikal pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang positif dengan ketimpangan pembangunan.

Soekarno. 2011. Analisis Dampak Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pendapatan di Provinsi Aceh Tahun 2004-2009. Menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan. Analisis menggunakan model regresi panel. Hasil dari penelitian ini pada model menunjukkan bahwa rasio pengeluaran pendidikan memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan

perkapita. Pada model kedua terlihat bahwa DAU/APBD memberikan pengaruh signifikan terhadap penurunan ketimpangan demikian halnya pendapatan perkapita. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa perlu pengawasan dan penetapan standar penggunaan dana alokasi umum agar tepat pada tujuan dari desentralisasi yaitu memperkecil kesenjangan fiskal daerah yang pada akhirnya memperkecil ketimpangan pendapatan

Filzah Wajdi, Analisis Ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2007-2009. Analisis ketimpangan menggunakan indeks Williamson dan Indeks Theil. Kemudian untuk mengidentifikasi ketersediaan infrastruktur yang ada di Prov. Sulawesi Selatan adalah dengan menggunakan Analisis Skalogram, serta untuk mengidentifikasi pola intreraksi yang ada di Kabupaten/kota adalah dengan menggunakan *Doubly Constrained Entropy Model*. Hasil analisis indeks Williamson menginformasikan bahwa terdapat ketimpangan yang terjadi di Provinsi Sulawesi Selatan dengan kecenderungan yang meningkat. Ditunjukkan oleh nilai entropi yang belum mencapai maksimal serta perkembangan sektor yang belum merata, Sedangkan dari realisasi belanja APBD Prov. Sulawesi Selatan diperoleh hasil penurunan selain pertumbuhan PDRB yang dapat menurunkan ketimpangan.

C. **Persamaan dan Perbedaan Peneliti dengan Penelitian Sebelumnya**

Dalam penelitian ini, peneliti memiliki persamaan dan perbedaan dengan peneliti sebelumnya. Adapun perbedaan ini adalah sebagai berikut;

No	Persamaan	Perbedaan
1	Menggunakan indikator indeks	Menggunakan teori hipotesis

	wiliamson dalam mengukur ketimpangan.	Kuznets tentang U-terbalik dan menggunakan korelasi pearson untuk menganalisisnya.
2	Dari ketiga peneliti sebelumnya, menggunakan indikator PDRB, IPM, dan DAU	Menggunakan indikator PAD sebagai tambahan variabel.
3		Penambahan teori pertumbuhan endogen dan teori pengeluaran untuk menentukan hipotesis sementara.
4		Menggunakan metode SPSS 17

D. Kerangka Berfikir

Pembangunan ekonomi suatu wilayah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat wilayah yang bersangkutan. Salah satu cara untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan meningkatkan PDRB khususnya PDRB per kapita pada suatu wilayah. Harapan pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Ketika pendapatan per kapita meningkat, diharapkan tercipta masyarakat yang sejahtera. Akan tetapi yang masih menjadi masalah dalam pembangunan ekonomi ini adalah apakah pendapatan per kapita pada suatu wilayah sudah merata diseluruh lapisan masyarakat. Karena jika pendapatan perkapita disuatu wilayah tidak merata, maka dapat menimbulkan ketimpangan.

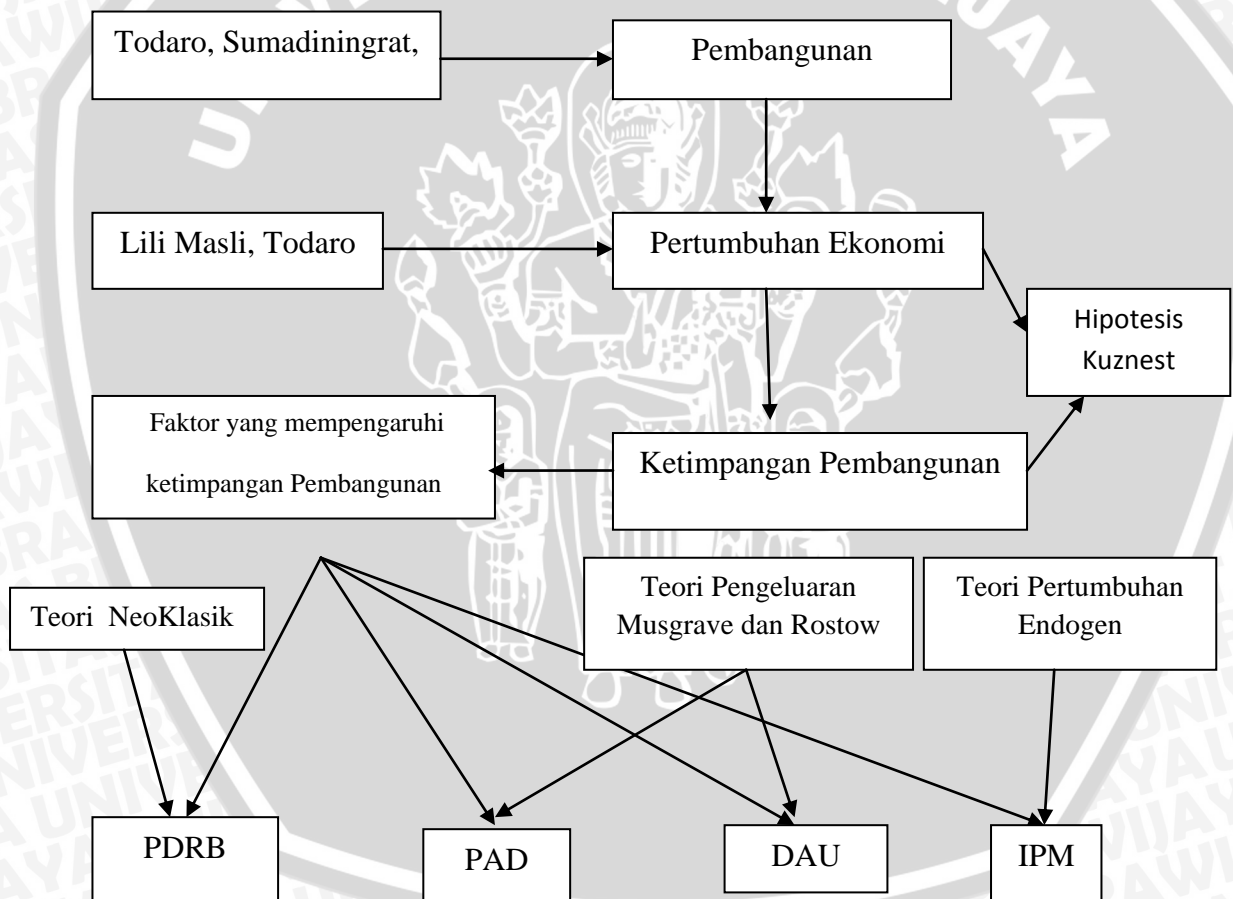
Peningkatan PAD dalam penerimaan daerah akan mempengaruhi besarnya belanja daerah yang digunakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena belanja daerah yang meningkat akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya.

Kenaikan tersebut juga dapat mengoptimalkan dan menaikkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti industri, perdagangan, sector jasa, dan sektor-sektor lainnya. Kegunaan juga untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran menurut Musgrave dan Rostow. Meskipun peran PAD yang tidak begitu besar dibanding dengan DAU, tetapi setidaknya peran PAD dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.

Menurut Sidik *et al.* (2002), Dana Alokasi Umum (DAU) dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan daerah dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah sehingga perbedaan antara daerah yang maju dengan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil. Sama halnya dengan PAD, penggunaan DAU dan penerimaan umum lainnya dalam APBD digunakan untuk membiayai pembangunan manusia, pengadaan infrastruktur, dan peningkatan pelayanan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, seperti pelayanan di bidang kesehatan dan pendidikan. Dengan demikian daerah miskin yang mendapat DAU yang lebih besar, dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pembangunan manusia yang tercermin dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meningkat. Sehingga DAU dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.

Sama halnya dengan IPM. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah mencapai sasaran yang

ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Oleh karena, apabila tingkat nilai IPM tinggi, maka tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut juga tinggi. Sesuai dengan teori pertumbuhan endogen, dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketimpangan pembangunan dapat berkurang.

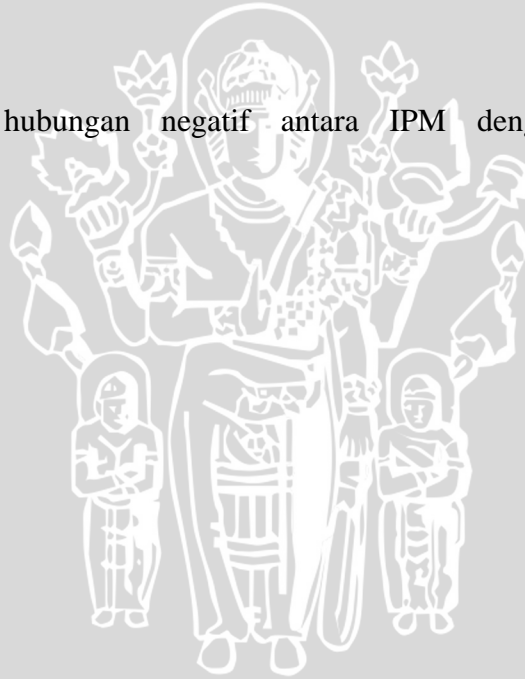


Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teoritis

E. Hipotesis

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, maka hipotesis atau jawaban sementara dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

- a. Diduga terdapat hubungan negatif antara PDRB dengan ketimpangan pembangunan.
- b. Diduga terdapat hubungan negatif antara PAD dengan ketimpangan pembangunan.
- c. Diduga terdapat hubungan negatif antara DAU dengan ketimpangan pembangunan.
- d. Diduga terdapat hubungan negatif antara IPM dengan ketimpangan pembangunan.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian deskriptif dan eksplanatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian deskriptif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang pertama. Menurut Nazir (2005:89), penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam meneliti status kelompok manusia, objek, set kondisi, sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, akurat mengenai fakta, sifat serta hubungan fenomena yang diselidiki. Sehingga nantinya akan diketahui deskripsi atau gambaran ketimpangan pembangunan yang ada di Provinsi Jawa Timur

Sedangkan untuk penelitian eksplanatif digunakan untuk menjawab rumusan masalah yang kedua dan ketiga. Menurut Bungin, (2008:46), “format eksplanasi dimaksud untuk menjelaskan suatu generalisasi sampel terhadap populasinya atau menjelaskan hubungan perbedaan atau pengaruh satu variabel dengan variabel yang lain. Oleh karena itu penelitian ini harus menggunakan sampel dan hipotesis”. Jadi dalam rumusan masalah yang kedua nantinya akan diketahui apakah hipotesis Kuznets tentang U-terbalik berlaku di Provinsi Jawa Timur. Dan untuk rumusan yang ketiga akan diketahui hubungan antara variabel-variabel dalam penelitian yaitu pengaruh PDRB, PAD, DAU dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan ruang atau tempat dimana peneliti akan mengungkapkan keadaan yang sebenarnya dari obyek yang akan diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 kabupaten dan 9 kota.

C. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

1. Variabel Penelitian

Variabel diartikan sebagai objek pengamatan penelitian atau faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa dan fenomena-fenomena yang akan diteliti. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Satu variabel dependen (*dependent variable*), yaitu Ketimpangan Pembangunan (KP)
2. Variabel bebasnya (*independent variabel*) antara lain: Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Umum (DAU), Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

2. Definisi Operasional Variabel.

Untuk memberikan kesamaan pemahaman terhadap variabel independen maupun variabel dependen dalam penelitian ketimpangan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, maka diperlukan suatu definisi operasional variabel, yakni:

a. Indeks Ketimpangan Pembangunan.

Ketimpangan Pembangunan Ekonomi diukur dengan menggunakan rumus Indeks Williamson, dimana pendapatan diukur dengan menggunakan PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku dan jumlah penduduk

untuk setiap kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2005 sampai tahun 2011. Sedangkan Indeks Ketimpangan Pembangunan Ekonomi ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$.

b. PDRB

PDRB diukur dengan menjumlahkan nilai tambah atau barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi pada periode tertentu pada daerah tersebut. Data dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya PDRB yang terjadi di Jawa Timur dari tahun 2005-2011.

c. PAD

PAD diperoleh dari semua penerimaan yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Data dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), khususnya jumlah PAD yang terjadi di Jawa Timur dari tahun 2005-2011.

d. .DAU

DAU diukur dengan melihat semua DAU yang diperoleh dari setiap kabupaten/kota di provinsi Jawa Timur. Data dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya DAU yang terjadi di Jawa Timur dari tahun 2005-2011.

e. IPM

IPM diukur dengan menggunakan indikator dampak sebagai komponen dasar penghitungannya yaitu angka harapan hidup waktu lahir, pencapaian

tingkat pendidikan yang diukur dengan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak yang diukur dengan rata-rata konsumsi riil yang telah disesuaikan . Data dalam penelitian ini diambil dari data yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) khususnya IPM yang terjadi di Jawa Timur dari tahun 2005-2011.

D. Jenis dan Sumber Data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan informasi yang telah disusun dan dipublikasikan oleh instansi tertentu (Soeratno dan Arsyad, 2003). Jenis data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel (*pooling data*) atau data longitudinal. Data panel (data longitudinal) adalah sekelompok data individu yang diteliti selama rentang waktu tertentu.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber, antara lain:

1. Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur dalam beberapa terbitan.
2. Literatur-literatur serta informasi-informasi tertulis baik yang berasal dari instansi terkait maupun internet, yang berhubungan dengan topik penelitian untuk memperoleh data sekunder.

Adapun data yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain :

1. Data PDRB per kapita atas dasar harga yang berlaku kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011.

2. Data jumlah penduduk kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011.
3. Data pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011
4. Data IPM kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011.
5. Data jumlah PAD kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011.
6. Data jumlah DAU kabupaten/kota Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah diolah oleh Badan Pusat Statistik yang terdiri dari data jumlah penduduk kabupaten/kota, PDRB per kabupaten/kota, pertumbuhan ekonomi, PAD, DAU, dan IPM di Provinsi Jawa Timur, Tahun 2005-2011.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Tahap-Tahap Penelitian

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka, dokumentasi dan internet. Studi pustaka dilakukan dengan mempelajari literatur-literatur yang berisikan informasi berhubungan dengan permasalahan yang tengah diteliti dan buku yang berhubungan dengan tema penelitian. Teknik dokumentasi dilakukan dengan menelusuri dan mendokumentasikan data-data dan informasi yang berkaitan dengan objek studi.

2. Tahap-Tahap Penelitian

Pada umumnya suatu penelitian dapat diperinci dalam beberapa tahap yang satu sama lain saling bergantung dan berhubungan. Dengan kata lain masing-masing tahap itu saling mempengaruhi dan dipengaruhi oleh tahap-tahap yang lain. Kesadaran terhadap keadaan ini membuat seorang peneliti lebih bijaksana dalam mengambil keputusan pada setiap tahap penelitian. Adapun tujuh tahap itu sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi Masalah

Yang dimaksud dengan mengidentifikasi masalah ialah peneliti melakukan tahap pertama dalam melakukan penelitian, yaitu merumuskan masalah yang akan diteliti. Tahap ini merupakan tahap yang paling penting dalam penelitian, karena semua jalannya penelitian akan dituntun oleh perumusan masalah. Tanpa perumusan masalah yang jelas, maka peneliti akan kehilangan arah dalam melakukan penelitian. Dalam penelitian ini, permasalahan yang ada adalah ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa Timur. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Seberapa besar ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2011?
- b. Apakah hipotesis Kuznets tentang kurva “U terbalik” berlaku di Provinsi Jawa Timur?
- c. Bagaimanakah pengaruh variabel PDRB, PAD, DAU dan IPM terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur?

2. Membuat Hipotesa

Hipotesa merupakan jawaban sementara dari persoalan yang kita teliti. Perumusan hipotesa biasanya dibagi menjadi tiga tahapan: pertama, tentukan hipotesa penelitian yang didasari oleh asumsi penulis terhadap hubungan variable yang sedang diteliti. Kedua, tentukan hipotesa operasional yang terdiri dari Hipotesa 0 (H_0) dan Hipotesa 1 (H_1). H_0 bersifat negatif dan H_1 bersifat positif.

Berdasarkan teori dan hubungan antara tujuan penelitian, kerangka pemikiran terhadap rumusan masalah, maka hipotesis atau jawaban sementara dari peneliti ini adalah sebagai berikut:

1. Diduga terdapat hubungan negatif antara PDRB dengan ketimpangan pembangunan.
2. Diduga terdapat hubungan negatif antara PAD dengan ketimpangan pembangunan.
3. Diduga terdapat hubungan negatif antara DAU dengan ketimpangan pembangunan.
4. Diduga terdapat hubungan negatif antara IPM dengan ketimpangan pembangunan.

3. Studi Literature

Pada tahapan ini peneliti melakukan apa yang disebut dengan kajian pustaka, yaitu mempelajari buku-buku referensi dan hasil penelitian sejenis sebelumnya yang pernah dilakukan oleh orang lain. Tujuannya ialah untuk mendapatkan landasan teori mengenai masalah yang akan diteliti. Teori

merupakan pijakan bagi peneliti untuk memahami persoalan yang diteliti dengan benar dan sesuai dengan kerangka berpikir ilmiah.

Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Administrasi Publik dan Pembangunan
2. Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi
3. Teori Pertumbuhan Dan Pembangunan Ekonomi
 - a. Model Pertumbuhan Neo-klasik
 - b. Model Pertumbuhan Endogen
 - c. Hipotesis Kuznets
4. Desentralisasi Fiskal
 - a. Teori Pengeluaran Musgrave dan Rostow
5. Ketimpangan Pembangunan Wilayah
6. Indeks Williamson
7. PDRB
8. Hubungan antara PDRB dan Ketimpangan Pembangunan
9. PAD
10. Hubungan antara PAD dan Ketimpangan Pembangunan
11. DAU
12. Hubungan antara DAU dan Ketimpangan Pembangunan
13. IPM
14. Hubungan antara IPM dan Ketimpangan Pembangunan

4. Mengidentifikasi dan Menamai Variabel

Melakukan identifikasi dan menamai variable merupakan salah satu tahapan yang penting karena hanya dengan mengenal variabel yang sedang diteliti seorang peneliti dapat memahami hubungan dan makna variable-variabel yang sedang diteliti.

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Satu variabel dependen (*dependent variable*), yaitu Ketimpangan Pembangunan (KP)
2. Variabel bebasnya (*independent variabel*) antara lain: PDRB (PDRB), PAD (PAD), DAU (DAU) dan IPM (IPM).

5. Membuat Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menjadikan variable-variabel yang sedang diteliti menjadi bersifat operasional dalam kaitannya dengan proses pengukuran variable-variabel tersebut. Definisi operasional memungkinkan sebuah konsep yang bersifat abstrak dijadikan suatu yang operasional sehingga memudahkan peneliti dalam melakukan pengukuran. Definisi operasional dalam penelitian ini adalah indeks ketimpangan pembangunan, PDRB, PAD, DAU dan IPM.

6. Mengumpulkan Data

Dalam penelitian kuantitatif maupun kualitatif, data merupakan hal yang sangat terpenting dalam menjawab semua permasalahan dalam sebuah penelitian. Oleh karena perlu ditentukan jenis, sumber, dan cara mengumpulkan data tersebut. Dalam penelitian ini jenis datanya adalah data panel atau data

longitudinal. Sumber datanya adalah BPS Provinsi Jawa Timur, dan metode pengumpulan datanya adalah dengan cara dokumentasi. Data yang dikumpulkan antara lain jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi, PDRB, PAD, DAU, dan IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011.

7. Melakukan Analisa Statistik

Salah satu keutamaan dalam penelitian yang menggunakan pendekatan kuantitatif adalah dengan adanya analisa statistik. Analisa statistik digunakan untuk membantu peneliti mengetahui makna hubungan antar variable. Sampai saat ini, analisa statistik merupakan satu-satunya alat yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah untuk menghitung besarnya hubungan antar variable, untuk memprediksi pengaruh variable bebas terhadap variable tergantung, untuk melihat besarnya pesentase atau rata-rata besarnya suatu variable yang kita ukur.

Hal yang pertama perlu dilakukan dalam penelitian ini adalah mengetahui besar ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menggunakan rumus indeks Williamson. Kemudian melakukan pembuktian tentang hipotesis Kuznets. Setelah itu melakukan uji regresi berganda antara indeks ketimpangan Provinsi Jawa Timur dengan faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan, diantaranya adalah PDRB, PAD, DAU dan IPM. Tetapi sebelum itu dilakukan uji asumsi klasik.

8. Menggunakan Komputer untuk Analisa Data

Dengan berkembangnya teknologi komputer yang semakin canggih dan dituntutnya melakukan penelitian secara lebih cepat serta kemungkinan besarnya jumlah data, maka seorang peneliti memerlukan bantuan komputer untuk

melakukan analisa data. Banyak perangkat lunak yang telah dikembangkan untuk membantu peneliti dalam melakukan analisa data, baik yang bersifat pengolahan data maupun analisisnya. Salah satunya adalah SPSS 17 seperti yang digunakan dalam penelitian ini.

9. Menulis Laporan Hasil Penelitian

Tahap terakhir dalam penelitian adalah membuat laporan mengenai hasil penelitian secara tertulis. Laporan secara tertulis perlu dibuat agar peneliti dapat mengkomunikasikan hasil penelitiannya kepada para pembaca.

F. Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis korelasi, dan analisis regresi berganda. Statistik deskriptif digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama yakni perhitungan tingkat ketimpangan wilayah menggunakan pendekatan PDRB per kapita relatif. Sedangkan analisis regresi berganda digunakan untuk menganalisa informasi kuantitatif yaitu estimasi model regresi dengan menggunakan data panel yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian kedua, yaitu pengaruh variabel PDRB (PDRB), PAD (PAD), DAU (DAU) dan IPM (IPM), terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Untuk menganalisis data yang telah dikumpulkan akan digunakan model ekonometrika.

Ekonometrika didefinisikan sebagai analisis kuantitatif dari fenomena ekonomi yang sebenarnya (aktual) yang didasarkan pada pengembangan yang bersamaan dari teori dan pengamatan, dihubungkan dengan metode inferensi yang

sesuai. Ekonometrika merupakan campuran dari teori ekonomi, ekonomi matematis, statistika ekonomi, dan statistika matematis.

1. Ketimpangan Pembangunan Wilayah.

Untuk dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang perkembangan masing-masing daerah dari segi pemerataan pembangunan, dapat diamati dengan menggunakan indeks ketimpangan pembangunan antar daerah yang semula dipergunakan oleh Jeffrey G. Williamson. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus sebagai berikut (Safrizal, 1997):

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i/n)}}{\bar{y}} \quad 0 < V_w < 1$$

Dimana:

V_w = Indeks Williamson.

f_i = Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

n = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur.

y_i = PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota.

\bar{y} = PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur.

Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < V_w < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi.

2. Korelasi Pearson

Korelasi Pearson sering disebut dengan korelasi produk momen atau korelasi saja. Kegunaannya untuk mengetahui derajat hubungan dan kontribusi variabel bebas (independen) dengan variabel terikat (dependent). Adapun rumus dari Korelasi Pearson (Husaini Usman dalam Mulyanto Sudarmono, 2006) yaitu;

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - (\sum X)(\sum Y)}{\sqrt{\{n \sum X^2 - (\sum X)^2\} \{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2\}}}$$

Dimana :

r_{xy} = Koefisien korelasi yang dicari

$\sum xy$ = Jumlah perkalian variabel x dan y

$\sum x$ = Jumlah nilai variabel x

$\sum y$ = Jumlah nilai variabel y

$\sum x^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel x

$\sum y^2$ = Jumlah pangkat dua nilai variabel y

n = Banyaknya sampel

Nilai dari koefisien korelasi ini adalah r yang besarnya antara -1 hingga 1. Jika $r < 0$ maka dikatakan berkorelasi negatif, artinya jika nilai salah satu peubah semakin besar maka peubah yang lain akan semakin kecil. Sebaliknya jika $r > 0$ dikatakan terjadi hubungan linear yang positif. Jika $r = 0$ dikatakan tidak berkorelasi tetapi bukan berarti tidak berhubungan. Mungkin berhubungan namun tidak linear. Semakin dekat nilai r dengan 1 atau -1 maka semakin erat hubungan linear antar peubah tersebut.

Tabel 3.1 Penjelasan Korelasi Pearson

Koefisien Korelasi	Arti
0	Tidak ada hubungan
Mendekati 0	Semakin lemah
+1	Korelasi sempurna positif/linier sempurna positif. Jika nilai X naik, maka Y juga naik.
Mendekati 1	Semakin kuat
-1	Korelasi sempurna negatif/linier sempurna negative. Jika nilai X naik, maka Y turun (dan sebaliknya).

Sumber: (Ghozali,2006)

Pada analisis ini peneliti menggunakan SPSS 17 sebagai alat analisis.

3. Analisis Regresi Berganda

Untuk mengetahui sumber ketimpangan pembangunan digunakan model regresi berganda (*multiple regression model*) yang memiliki asumsi bahwa peubah tak bebas (respons) Y merupakan fungsi linear dari beberapa peubah bebas X_1, X_2, \dots, X_k dan komponen sisaan ϵ (*error*). Secara umum model regresi adalah sebagai berikut :

$$Y_i = \beta_1 X_{1i} + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i \dots \dots \dots (8)$$

Subskrip i menunjukkan nomor pengamatan dari 1 sampai N untuk data populasi, atau sampai n untuk data contoh. X_{ki} merupakan pengamatan ke-i untuk peubah bebas X_k . Koefisien β_1 dapat merupakan intersep model regresi sehingga model (8) menjadi:

$$Y_i = \beta_1 + \beta_2 X_{2i} + \beta_3 X_{3i} + \dots + \beta_k X_{ki} + \epsilon_i \dots \dots \dots (9)$$



Sumber ketimpangan pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur dianalisis dengan mengembangkan model pada persamaan (9) menjadi sebagai berikut:

$$KP_{it} = \alpha + b_1 PDRB_{lit} + b_2 PAD_{2it} + b_3 DAU_{3it} + b_4 IPM_{4it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (10)$$

Dimana:

KP_{it} = Dekomposisi Indeks Williamson kabupaten/kota ke-i tahun 2005-2011

$PDRB_{it}$ = Jumlah rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011

PAD = Jumlah total PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011

DAU_{it} = Jumlah total DAU Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011

IPM_{it} = Jumlah rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011

α = Intersep/dugaan parameter koefisien α ; yaitu rata-rata nilai KP jika

$$PDRB_1 = PAD_2 = DAU_3 = IPM_4 = 0$$

b_1 = Dugaan parameter koefisien β_1 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai KP bila X_1 berbeda 1 unit dengan asumsi X_2, X_3, X_4 konstan

b_2 = Dugaan parameter koefisien β_2 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai KP bila X_2 berbeda 1 unit dengan asumsi X_1, X_3, X_4 konstan

b_3 = Dugaan parameter koefisien β_3 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai KP bila X_3 berbeda 1 unit dengan asumsi X_1, X_2, X_4 konstan

b_4 = Dugaan parameter koefisien β_4 ; yaitu rata-rata perbedaan nilai KP bila X_4 berbeda 1 unit dengan asumsi X_1, X_2, X_3 konstan



$$\varepsilon_{it} = \text{Sisaan dengan nilai dugaan } \varepsilon_{it} = KP_{it} - (\alpha + b_1 X_{1it} + b_2 X_{2it} + b_3 X_{3it})$$

Indeks Williamson digunakan sebagai variabel tak bebas karena dekomposisi dari Indeks Williamson kabupaten/kota merupakan Indeks Williamson total rata-rata Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011. Selanjutnya untuk mengetahui apakah model tersebut dapat menjelaskan permasalahan ketimpangan pembangunan, maka akan dilakukan beberapa uji asumsi klasik (Juanda, 2009).

4. Estimasi Model Regresi

Estimasi data berikut ini akan membahas mengenai analisis statistik dan ekonomi dari hasil persamaan regresi pengaruh ketimpangan proporsional pada PDRB (PDRB), PAD (PAD), DAU (DAU), IPM (IPM) yang merupakan *independent variable* terhadap ketimpangan pembangunan *dependent variable* yang dalam analisis ini adalah nilai dekomposisi ketimpangan kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dari Indeks Williamson (KP) dengan menggunakan pendekatan analisis panel data. Selain itu akan dilakukan pengujian-pengujian terhadap masalah regresi linear berganda.

Model dasar dari persamaan (10) tadi, kemudian diturunkan menjadi model ekonometrika sebagai berikut:

$$KP_{it} = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \varepsilon_{it} \dots \dots \dots (11)$$

Dimana :

KP_{it} = Dekomposisi Indeks Williamson kabupaten/kota ke-i tahun 2005-2011

α = Intersep

X_{1it} = Jumlah rata-rata PDRB Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011



X_{2it} = Jumlah total PAD Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011

X_{3it} = Jumlah Total DAU Jawa Timur tahun 2005-2011

X_{4it} = Jumlah rata-rata IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011

$\beta_1 \dots \beta_4$ = Koefisien Regresi

ε_{it} = Sisaan

Karena bentuk data yang diamati berupa *pooled data* yang merupakan gabungan antara unit *cross-section* (kabupaten/kota) dan *time-series* (periode pengamatan) maka teknik analisis yang digunakan untuk mengestimasi model ekonometrik tersebut adalah analisis regresi data panel. Penaksiran model dilakukan dengan menggunakan bantuan software SPSS 17.

5. Uji Asumsi Klasik

Pengujian regresi linier berganda dapat dilakukan setelah model dari penelitian ini memenuhi syarat-syarat yaitu lolos dari uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, dan heteroskedastisitas. Untuk itu sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda perlu dilakukan lebih dahulu pengujian asumsi klasik (Ghozali, 2006), yang terdiri dari:

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Caranya adalah dengan melihat normal probability plot yang

membandingkan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya.

b. Uji Gejala Multikolinearitas

Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel bebas. Jika variabel bebas saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel bebas yang nilai korelasi antar sesama variabel bebas sama dengan nol. Untuk mendeteksinya yaitu dengan cara menganalisis nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Apabila nilai VIF lebih kecil dari 10 dan nilai toleransinya di atas 0,1 atau 10% maka dapat disimpulkan dalam model bebas dari penyimpangan asumsi klasik. Multikolinieritas (Ghozali, 2005; Gujarati, 2003).

c. Uji Gejala Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas. Salam mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik scatterplot antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu

X adalah residual ($Y.Pred - Y$. Sesungguhnya) yang telah distudentized analisisnya:

- a. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas.
- b. Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas.

d. Uji Gejala Autokorelasi

Salah satu asumsi dari model regresi linear adalah bahwa tidak ada autokorelasi atau korelasi serial antara antara sisaan (ϵ). Dengan pengertian lain, sisaan menyebar bebas atau $Cov(\epsilon_i, \epsilon_j) = E(\epsilon_i, \epsilon_j) = 0$ untuk semua $i \neq j$. Masalah autokorelasi terjadi jika antar sisaan tidak bebas atau $E(\epsilon_i, \epsilon_j) \neq 0$ untuk $i \neq j$, dan sering terjadi pada data *time series*. Untuk mengetahui ada tidaknya gejala autokorelasi dapat dilakukan dengan uji Durbin-Watson dengan kisaran nilai 0 sampai 4. Daerah keputusan H_0 dan H_1 untuk uji Durbin-Watson adalah:

Nilai Dw	Keputusan
$4 - d_L < DW < 4$	Tolak H_0 ; jika autokrasi negatif
$4 - d_u < DW < 4 - d_L$	Tidak tentu, coba uji yang lain
$d^u < DW < 4 - d^u$	Terima H_0
$d_L < DW < d_u$	Tidak tentu, coba ujj yang lain
$0 < DW < d^L$	Tolak H_0 ; ada autokrasi positif

6. Uji Pengambilan Kesimpulan

a. Uji-F (Uji Simultan)

Uji-F digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independent secara simultan terhadap variable dependent dengan hipotesis statistik sebagai berikut:

$H_0 : \alpha_n = 0$ $H_1 : \text{setidaknya satu } \alpha_n \neq 0$ Untuk menguji kedua hipotesis tersebut,

dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika nilai $F_{\text{hitung}} > F_{\text{tabel}}$

maka tolak H_0 . Atau pengujian dapat pula menggunakan *probability value* dengan

kriteria tolak H_0 jika *probability value* < nilai α .

e. Uji Parsial (Uji-t)

Uji-t dilakukan untuk mengetahui signifikansi setiap variable independen dalam mempengaruhi variable dependen dengan uji satu arah. Hipotesis yang akan diuji adalah:

$H_0 : \alpha_n \leq 0$, setiap variabel independen tidak signifikan mempengaruhi variable dependen

$H_1 : \alpha_n > 0$, setiap variabel independen signifikan mempengaruhi variabel dependen

Dengan membandingkan nilai t_{hitung} dari persamaan regresi dengan nilai kritis dari t_{tabel} pada taraf kepercayaan tertentu. Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ maka tolak H_0 .

Pengujian dapat pula menggunakan *probability value* dengan kriteria tolak H_0 jika *probability value* < nilai α .

f. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Nilai R^2 berada antara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$). Jika nilai R^2 yang semakin mendekati 1 berarti model regresi tersebut mampu menjelaskan hubungan antara variabel dependen dan variabel independen secara lebih baik.

G. Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah jumlah tahun penelitian yang relative singkat yaitu 7 tahun. Selain itu, analisis yang dikembangkan dalam penelitian ini masih terbatas karena hanya melihat pengaruh dari PDRB, PAD, DAU, IPM terhadap ketimpangan pembangunan. Dan untuk hasilnya pun juga hanya PAD dan IPM saja yang berpengaruh terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Untuk PDRB dan DAU tidak diketahui hasilnya karena mengalami gejala asumsi klasik. Berdasarkan teori yang berkembang lainnya, masih banyak lagi pengaruh yang lain yang dapat mempengaruhi ketimpangan pembangunan seperti jumlah tenaga kerja, jumlah investasi, aglomerasi, migrasi, sarana prasana dan lain sebagainya. Oleh karenanya diperlukan studi lanjutan yang lebih mendalam dengan data dan metode yang lebih lengkap sehingga dapat melengkapi hasil penelitian yang sudah ada, dan hasilnya dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan berbagai pihak dalam mengatasi permasalahan tentang ketimpangan pembangunan.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi

1. Kondisi Geografis

Provinsi Jawa Timur membentang antara $111^{\circ} 0' \text{ BT}$ - $114^{\circ} 4' \text{ BT}$ dan $7^{\circ} 12' \text{ LS}$ - $8^{\circ} 48' \text{ LS}$, dengan ibukota yang terletak di Kota Surabaya. Bagian utara Provinsi Jawa Timur berbatasan dengan Laut Jawa. Bagian selatan berbatasan dengan Samudera Indonesia, sebelah timur berbatasan dengan Selat Bali, dan daerah Barat berbatasan dengan Provinsi Jawa Tengah. Letak Jawa Timur yang strategis memberikan keuntungan bagi daerah ini karena menjadi penghubung antara wilayah Indonesia bagian barat dengan bagian tengah.

Topografi di Provinsi Jawa Timur ada yang berupa pegunungan, perbukitan, dan kepulauan. Oleh karena itu, wilayah ini memiliki sumber daya pertanian, kelautan, kehutanan, dan pertambangan yang potensial. Iklim di daerah Jawa Timur termasuk dalam tropis lembab dengan curah hujan rata-rata 2,100 mm setiap tahun. Suhu udara di daerah ini berkisar antara 18° - 35° Celcius.

Struktur geologi di Provinsi Jawa Timur didominasi oleh batuan sedimen Alluvium. Batuan hasil gunung berapi juga tersebar di bagian tengah wilayah Jawa Timur sehingga daerah ini relatif subur. Beragam jenis batuan yang tersebar di Jawa Timur menyebabkan besarnya ketersediaan bahan tambang di wilayah ini.

2. Strategi Pembangunan Jawa Timur

a. Tujuan

Tujuan pembangunan Jawa Timur untuk mewujudkan masyarakat yang maju, berdaya saing, demokratis, berkeadilan, damai dan sejahtera dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia yang didukung oleh sumberdaya manusia yang beriman, bertakwa, sehat, mandiri, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdisiplin dan beretos kerja tinggi.

b. Sasaran

1. Terciptanya kualitas manusia dan kualitas masyarakat Jawa Timur yang maju dan mandiri.
2. Memiliki basis ekonomi yang kuat berdasarkan diversifikasi sektor unggulan dan mengglobal serta daya saing.
3. Partisipasi aktif masyarakat pada berbagai bidang pembangunan.
4. Tertatanya kondisi sosial budaya masyarakat.
5. Pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, luas utuh dan bertanggung jawab.

c. Visi

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang maju, sejahtera, dan berakhlak mulia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia.

d. Misi

1. Peningkatan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai agama diiringi dengan penghayatan dan pengalaman nilai-nilai Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

2. Penegakan supremasi hukum dan hak asasi manusia yang didasari kepada Tuhan Yang Maha Esa.
3. Pemantapan kehidupan politik yang demokrasi dengan melibatkan peran serta seluruh komponen masyarakat dalam pemerintahan otonom yang berwawasan kesatuan.
4. Peningkatan perekonomian daerah secara terpadu dengan pemberdayaan potensi masyarakat serta pemanfaatan teknologi maupun potensi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.
5. Perwujudan aparatur pemerintahan yang amanah, professional dan berjiwa kewirausahaan yang mengutamakan kepentingan rakyat.
6. Peningkatan peranan muda dan perempuan serta menjamin kesetaraan gender dalam aspek kehidupan berbangsa dan bernegara.

e. Strategi

Sesuai dengan Program Pembangunan Daerah (PROPERDA), telah ditetapkan delapan prioritas yaitu:

1. Pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan dan peningkatan kualitas produk pendidikan.
2. Percepatan pemulihan ekonomi dan peningkatan produktifitas melalui pengembangan ekonomi kerakyatan, penguatan unit-unit usaha dan lembaga-lembaga ekonomi.
3. Pelembagaan nilai-nilai agama dan kehidupan demokratis dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
4. Pemanfaatan budaya, supremasi hukum serta HAM.

5. Peningkatan pelayanan kesehatan dan kualitas kesejahteraan sosial, perluasan lapangan kerja, peningkatan peranan pemuda dan pembinaan olah raga sertapenyetaraan gender.
6. Peningkatan peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan untuk pemantapan ekonomi daerah dan kemudahan ekonomi publik serta peluasan informasi komunikasi.
7. Pengendalian eksplorasi SDA, pelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan hidup, penataan pemukiman serta penataan ruang.
8. Peningkatan kapasitas perlindungan masyarakat dari gangguan keamanan dan ketertiban serta peningkatan kesadaran rakyat dalam bela negara.

3. Wilayah Administratif

Provinsi Jawa Timur memiliki 229 pulau dengan luas wilayah daratan sebesar 47,130,15 km² dan wilayah lautan seluas 110,764,28 km². Provinsi ini terbagi menjadi 29 kabupaten, meliputi Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Kediri, Malang, Lumajang, Jember, Banyuwangi, Bondowoso, Situbondo, Probolinggo, Pasuruan, Sidoarjo, Mojokerto, Jombang, Nganjuk, Madiun, Magetan, Ngawi, Bojonegoro, Tuban, Lamongan, Gresik, Bangkalan, Sampang, Pamekasan dan Sumenep, serta 9 kota, yaitu Surabaya, Madiun, Kediri, Blitar, Malang, Batu, Pasuruan, Probolinggo dan Mojokerto

Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Jawa Timur (Bakorwil) dibentuk guna memantapkan dan meningkatkan koordinasi pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat di seluruh wilayah Jawa Timur. Terdapat empat Bakorwil yaitu, Bakorwil-I yang berkedudukan di Kota Madiun, dengan wilayah kerja meliputi Kota Madiun, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Nganjuk. Bakorwil-II berkedudukan di Kabupaten Bojonegoro, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Tuban, Kabupaten Jombang, Kabupaten Mojokerto, Kota Mojokerto, Kabupaten Kediri, dan Kota Kediri.

Bakorwil-III berkedudukan di Kota Malang, dengan wilayah kerja meliputi Kota Malang, Kabupaten Malang, Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, Kota Pasuruan, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Situbondo, dan Kabupaten Bondowoso. Bakorwil-IV berkedudukan di Kabupaten Pamekasan, dengan wilayah kerja meliputi Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sumenep, Kabupaten Sampang, Kota Surabaya, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Sidoarjo.

4. Kependudukan

Penduduk merupakan salah satu modal dasar dalam pelaksanaan pembangunan. Kesejahteraan penduduk merupakan sasaran utama dari pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Sasaran ini tidak mungkin tercapai bila Pemerintah tidak

dapat memecahkan masalah kependudukan, seperti besarnya jumlah penduduk dan tidak meratanya penyebaran penduduk. Berbagai usaha untuk menekan laju pertumbuhan penduduk yang tinggi telah dilakukan pemerintah melalui berbagai program Keluarga Berencana (KB) maupun program transmigrasi. Selain itu, dengan telah diberlakukannya program otonomi daerah diharapkan dapat mengurangi perpindahan penduduk dari desa ke kota.

Berdasarkan data BPS, dapat diketahui bahwa jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan sejak tahun 2005-2011. Namun, konsentrasi penduduk lebih banyak berada di wilayah yang maju dan yang mempunyai luas wilayah yang besar. Contohnya kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo dan kabupaten Malang. Konsentrasi penduduk terjadi karena Kota Surabaya merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur dan terkonsentrasi sektor-sektor perekonomian, sehingga mobilitas penduduk di wilayah tersebut cukup tinggi. Begitu juga yang terjadi dengan kabupaten Sidoarjo. Sehingga dua daerah tersebut terjadi peningkatan yang sangat pesat, baik dari sisi penambahan penduduk maupun perkembangan ekonominya. Hal ini dapat terlihat dalam tabel jumlah penduduk kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 berikut ini:

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

no	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kabupaten								
1	Pacitan	551290	553321	555262	557029	558644	560421	562204
2	Ponorogo	885047	888857	892527	895921	899074	902492	905923
3	Trenggalek	673102	673920	674620	675380	675765	676526	677288
4	Tulungagung	977211	981257	985147	988731	992048	995657	999279
5	Blitar	1069151	1069569	1069798	1070122	1070446	1070770	1071094
6	Kediri	1450937	1451028	1451119	1451630	1451861	1452372	1452883

7	Malang	2375537	2388755	2401624	2413779	2425311	2437585	2449924
8	Lumajang	1013454	1017467	1021317	1024849	1028103	1031658	1035255
9	Jember	2295795	2304634	2313100	2320844	2327957	2335750	2343569
10	Banyuwangi	1517432	1522534	1527384	1531753	1535701	1540063	1544468
11	Bondowoso	701105	703303	705384	707242	708905	710772	712644
12	Situbondo	616505	618816	621026	623042	624888	626916	628951
13	Probolinggo	1040234	1041370	1042323	1043671	1044237	1045587	1046939
14	Pasuruan	1433270	1438610	1443716	1448370	1452629	1457311	1462008
15	Sidoarjo	1715439	1737543	1759623	1781405	1802948	1825266	1847860
16	Mojokerto	978769	987817	996774	1005486	1013988	1022850	1031789
17	Jombang	1237640	1253752	1269851	1285739	1301459	1317742	1334237
18	Nganjuk	991313	994468	997458	1000132	1002530	1005217	1007911
19	Madiun	642159	642225	642398	642518	642638	642758	642878
20	Magetan	622384	623536	624581	625424	626092	626937	627783
21	Ngawi	827728	830281	832696	834847	836767	838298	840433
22	Bojonegoro	1239756	1247919	1255914	1263551	1270876	1278603	1286377
23	Tuban	1069935	1073071	1076027	1078641	1080956	1083581	1086213
24	Lamongan	1187504	1188136	1188559	1189087	1189615	1190143	1190671
25	Gresik	1132689	1153292	1174063	1194821	1215603	1237095	1258967
26	Bangkalan	907119	923657	940331	956996	973681	990937	973956
27	Sampang	851537	868370	885379	902429	919548	937256	955305
28	Pamekasan	785932	802172	818604	835101	851690	868853	886365
29	Sumenep	1016187	1016418	1016471	1016907	1017147	1017583	1018019
Kota								
71	Kediri	263335	265721	268081	270374	272610	274941	277292
72	Blitar	128731	129932	131121	132278	133480	134657	135845
73	Malang	802763	807543	812209	816637	820857	825332	829831
74	Probolinggo	215195	218995	222822	226643	230464	234416	238435
75	Pasuruan	173774	173872	173940	174073	174173	174306	174439
76	Mojokerto	112823	112959	113075	113201	113327	113453	113579
77	Madiun	174739	175955	177148	178291	179391	180548	181712
78	Surabaya	2622023	2625298	2628113	2630079	2631305	2633273	2635242
79	Batu	182235	184117	185986	187813	189604	191466	193346
Jawa Timur		36481779	36690490	36895571	37094836	37286246	37489391	37660914

Sumber data: Data penduduk berdasarkan hasil proyeksi Supas 2005, BPS
Provinsi Jawa Timur

5. Kondisi Perekonomian

a. Pertumbuhan Ekonomi

Salah satu cara melihat keberhasilan pembangunan adalah dengan melihat laju pertumbuhan ekonomi. Jika laju pertumbuhan ekonomi tersebut tinggi, maka

maka dapat dikatakan bahwa proses pembangunan tersebut jika tinggi. Di Provinsi Jawa Timur, tingkat pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005-2011 rata-rata mengalami fluktuasi. Ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di kabupaten dan kota juga mengalami perkembangan yang naik turun, Tingkat rata-rata pertumbuhan ekonomi tertinggi ada pada tahun 2011 yaitu sekitar 6,67%, sedangkan tingkat pertumbuhan terendah ada pada tahun 2005 yaitu 5,46%. Meskipun mengalami naik-turun, namun dari tahun 2005-2011 pertumbuhan ekonomi di provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan.

Wilayah yang mempunyai tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi terletak pada kabupaten Bojonegoro yang berkisar 12,98% pada tahun 2011, kemudian kota Surabaya yang merupakan ibukota provinsi sekitar 7,29%, dan yang ketiga yaitu kota Madiun yang berkisar 7,24%. Hal ini dapat terlihat dalam tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 berikut ini:

Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011 (Persen)

No	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kabupaten								
1	Pacitan	3,97	4,55	5,23	5,33	5,1	6,52	7,01
2	Ponorogo	4,55	4,69	6,51	5,58	5,01	6,13	6,49
3	Trenggalek	4,36	4,95	5,47	5,64	5	6,1	6,39
4	Tulungagung	5,22	5,75	5,94	5,87	5,15	6,82	7,09
5	Blitar	5,57	5,57	5,86	6,01	5,03	6,81	7,12
6	Kediri	3,27	4,87	4,7	4,91	4,4	6,53	7,04
7	Malang	5,05	5,86	6,26	5,83	5,02	6,22	6,38
8	Lumajang	5,18	5,37	5,67	5,45	5,04	5,92	6,06
9	Jember	5,65	5,88	5,94	6,04	5,04	6,16	6,23
10	Banyuwangi	5,28	5,41	5,63	5,63	5,36	6,63	6,93
11	Bondowoso	5,40	5,71	5,59	5,18	4,96	5,64	5,62

12	Situbondo	5,53	5,4	5,8	5,44	4,98	5,62	5,68
13	Probolinggo	4,75	5,6	5,97	5,92	5,19	6,46	5,68
14	Pasuruan	6,32	5,68	6,25	5,92	5,03	6,76	7,03
15	Sidoarjo	6,59	5,1	5,58	4,58	4,53	6,19	6,46
16	Mojokerto	6,93	5,35	5,98	5,76	5,01	6,81	7,18
17	Jombang	5,49	5,67	6,21	5,93	5,01	6,31	6,47
18	Nganjuk	5,64	6,02	6,13	5,58	5,29	6,75	6,93
19	Madiun	4,53	4,54	5,34	5,29	5,01	5,92	6,27
20	Magetan	4,85	5,12	5,26	5,5	5,04	5,83	6
21	Ngawi	4,82	5,17	5,2	5,59	5,08	6,19	6,45
22	Bojonegoro	8,88	9,38	10,68	12,32	6,07	12,26	12,98
23	Tuban	5,86	5,79	6,4	6,61	5,75	6,62	6,83
24	Lamongan	5,81	5,77	5,98	6,23	5,8	6,9	7,18
25	Gresik	7,88	6,86	6,85	6,04	5,61	6,93	6,95
26	Bangkalan	4,67	4,86	5,11	4,79	4,27	5,44	5,59
27	Sampang	3,84	4,81	4,43	4,79	4,12	5,33	5,46
28	Pamekasan	4,99	4,75	4,63	5,51	5,03	5,84	6,11
29	Sumenep	3,31	4,86	4,9	4,5	4,1	5,73	5,95
Kota								
30	Kediri	1,58	5,11	4,49	4,89	4,5	5,91	6,11
31	Blitar	6,07	5,9	6,16	6,6	5,52	6,33	6,43
32	Malang	6,67	6,2	6,37	6,28	4,43	6,52	6,6
33	Probolinggo	6,27	6,4	6,45	6,39	5,01	6,04	5,95
34	Pasuruan	6,15	5,75	5,63	5,62	5,01	6,33	6,48
35	Mojokerto	6,08	6	6,12	5,87	5,11	6,56	6,7
36	Madiun	5,94	5,64	6,35	6,76	5,92	6,92	7,24
37	Surabaya	7,35	6,24	6,78	6,5	5,14	7,08	7,29
38	Batu	7,32	6,62	6,36	6,86	6,1	7,06	7,17
	Jawa Timur	5,46	5,61	5,9	5,88	5,07	6,48	6,67

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

b. Produk Domestik Regional Bruto

Salah satu yang lain untuk mengukur keberhasilan pembangunan dari aspek ekonomi suatu wilayah adalah dengan cara melihat perkembangan dari nilai Produk Domestik Regional Bruto. Menurut BPS (2008) Produk Domestik Regional Bruto Perkapita (PDRB per kapita) adalah besaran kasar yang menunjukkan tingkat kesejahteraan penduduk disuatu wilayah pada suatu waktu tertentu. PDRB per kapita didapat dengan membagi PDRB dengan jumlah

penduduk pertengahan tahun di wilayah tersebut. Peningkatan jumlah PDRB per kapita tersebut menggambarkan peningkatan tingkat kemajuan perekonomian dan pembangunan daerah tersebut.

PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan pada tahun 2005-2011. Ini dapat dilihat dari setiap kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur, rata-rata mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, meskipun mengalami peningkatan, terjadi perbedaan PDRB yang sangat tinggi. Ada beberapa wilayah yang mempunyai PDRB yang sangat rendah dan ada yang mempunyai PDRB yang sangat tinggi. Dan wilayah yang mempunyai PDRB tinggi, rata-rata dimiliki oleh wilayah kota. Ini dapat dilihat dalam tabel PDRB Perkapita atas dasar harga yang berlaku kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2005-2011 berikut:

Tabel 4.3 PDRB Perkapita atas dasar harga yang berlaku kabupaten/kota di Jawa Timur Tahun 2005-2010 (Ribu Rupiah)

No	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
KABUPATEN								
1	Pacitan	3410,60	3920,23	4391,58	5033,55	5541,49	6428,97	7056,16
2	Ponorogo	4554,12	5283,39	6000,32	6907,95	7740,33	9268,68	10265
3	Trenggalek	3650,89	4342,98	4892,27	5675,48	6338,48	7171,66	7878,83
4	Tulungagung	9536,30	11228,93	12653,28	14595,52	16092,03	18180,68	19918,62
5	Blitar	6809,24	8097,86	9194,64	10502,90	11579,81	12492,98	13591,26
6	Kediri	5879,78	6908,21	7648,44	8737,76	9543,10	10360,80	11223,95
7	Malang	7401,42	8610,04	9771,49	11235,77	12342,41	13724,47	15003,08
8	Lumajang	7794,44	8858,53	9955,90	11388,64	12521,27	14357,74	15732,54
9	Jember	5940,99	6629,67	7523,62	8845,47	9740,62	10834,30	11885,46
10	Banyuwangi	8663,56	10080,99	11405,63	13298,52	14824,74	16707,08	18363,6
11	Bondowoso	4170,20	4720,44	5339,43	6130,64	6745,62	7265,46	7901,72
12	Situbondo	7723,21	8798,19	9928,96	11407,97	12547,80	13577,35	14772,14

13	Probolinggo	8131,80	9436,91	10766,55	12369,36	13652,71	14817,93	16163,19
14	Pasuruan	6090,92	7162,66	8179,38	9429,73	10375,38	11280,91	12310,47
15	Sidoarjo	20533,59	23017,42	25621,87	28895,82	31271,64	32525,82	34902,92
16	Mojokerto	8246,71	9549,08	10769,99	12285,65	13450,32	15094,50	16480,86
17	Jombang	6379,25	7363,83	8293,20	9451,68	10203,20	12405,77	13666,26
18	Nganjuk	5942,91	6749,02	7706,23	8836,33	9717,60	10797,04	11809,05
19	Madiun	5438,54	6259,58	7066,48	8086,66	8853,42	9619,17	10459,07
20	Magetan	6574,34	7582,21	8527,05	9918,37	10883,30	12239,76	13404,15
21	Ngawi	4818,40	5660,37	6334,80	7240,30	7988,41	9218,17	10107,62
22	Bojonegoro	6268,69	7588,42	9195,54	11201,68	12389,14	15659,88	17677,75
23	Tuban	7711,62	9306,54	10689,00	12481,62	13852,55	15153,15	16614,8
24	Lamongan	4800,11	5693,68	6446,90	7411,14	8233,79	9392,98	10317,81
25	Gresik	17410,66	20565,25	23272,01	26665,64	29453,72	34428,00	37893,69
26	Bangkalan	4834,70	5474,41	6024,64	6758,72	7249,82	8675,31	9475,54
27	Sampang	3996,03	4595,22	4994,51	5574,17	5972,02	6929,62	7513,22
28	Pamekasan	3557,70	4129,07	4523,64	5077,16	5494,84	6588,60	7203,48
29	Sumenep	6608,45	7677,95	8599,64	9790,55	10710,41	11770,06	12793,09
KOTA								
30	Kediri	132351,25	151196,59	165693,18	188061,03	209297,96	242263,63	265030,4
31	Blitar	6692,05	8025,69	9021,35	10272,33	11401,87	13141,38	14420,3
32	Malang	20712,31	24485,13	27706,13	32172,73	34784,17	39292,76	42994,67
33	Probolinggo	12042,06	14047,41	15727,45	17767,28	19096,85	22583,00	24716,9
34	Pasuruan	8079,45	10550,04	11835,29	13470,33	14878,45	15759,58	17061,97
35	Mojokerto	13728,60	16275,54	18373,97	21135,74	23435,88	25134,58	27349,34
36	Madiun	8374,59	11166,82	12649,46	14669,89	16174,12	19380,64	21434,1
37	Surabaya	39801,85	46923,72	53716,43	62310,23	68756,24	74776,14	81739,25
38	Batu	9020,71	10166,16	11609,65	13435,44	14889,60	16898,00	18580,96
Jawa Timur		11057,37	12872,15	14554,10	16751,43	18420,94	20772,11	24360,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, wilayah yang mempunyai PDRB tertinggi adalah kota Kediri yang merupakan pusat industri rokok terbesar yaitu 265030,4 pada tahun 2011. Sedangkan yang kedua adalah kota Surabaya yang merupakan pusat ibukota provinsi yaitu sekitar 81739,25 pada tahun 2011. Dan PDRB terendah pada tahun 2011 adalah kabupaten Pamekasan sekitar 7203,48. Ini menandakan

bahwa terjadi suatu pemusatan kegiatan ekonomi pada suatu daerah tertentu atau sering disebut aglomerasi pada kota Kediri dan Surabaya.

c. Pendapatan Asli Daerah

Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan menaikkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti industri, perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. Kegunaan PAD juga untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia.

Di Provinsi Jawa Timur, PAD dari tahun 2005-2011 mengalami peningkatan yang signifikan. Namun, meskipun mengalami peningkatan, PAD tersebut diantara daerah satu dengan yang lainnya berbeda. Kebanyakan wilayah yang maju dan menjadi pusat perekonomian rata-rata memiliki PAD yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilihat dalam tabel PAD kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011 berikut:

Tabel 4.4 Pendapatan Asli Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2005-2011 (jutaan)

No	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kabupaten								
1	Pacitan	12196	16413	21983	23692	27665	25218	48360
2	Ponorogo	28494	35398	40529	40474	48084	49777	65937
3	Trenggalek	20196	23419	30982	34887	40435	50611	63083
4	Tulungagung	31006	36234	50995	59275	86821	70955	124874
5	Blitar	28082	38666	39896	48025	56204	61999	76240
6	Kediri	36106	53483	57046	62964	77811	62318	96834
7	Malang	52665	68299	84353	102705	146502	124388	138410
8	Lumajang	34157	45999	53684	54971	65442	66052	84277
9	Jember	51687	66952	89253	136522	146550	146452	182797
10	Banyuwangi	42635	52239	60843	73780	85920	79048	113262
11	Bondowoso	20333	23570	29350	32833	40122	46483	66930
12	Situbondo	24364	23030	29431	34335	34174	36440	61651
13	Probolinggo	21037	28373	35217	39268	42526	37294	75654
14	Pasuruan	64864	64670	68351	77286	87316	87686	155276
15	Sidoarjo	135495	178070	190905	213692	284661	288731	411360
16	Mojokerto	38279	44640	50791	55423	59655	62850	158297
17	Jombang	49205	65355	78674	97598	90214	100611	124800
18	Nganjuk	40510	52034	53169	58843	72270	71846	83490
19	Madiun	15921	24270	27441	27359	30113	36057	57999
20	Magetan	23591	31404	37026	39669	49030	45000	48399
21	Ngawi	13623	19954	20736	22861	25894	26562	61538
22	Bojonegoro	38355	51868	56436	58605	69630	73200	78533
23	Tuban	61701	82073	79206	88774	102573	84205	84871
24	Lamongan	40278	42442	55746	66512	71312	94066	99546
25	Gresik	88176	101603	115311	131821	168302	160961	274034
26	Bangkalan	22934	28761	87926	32096	34477	35355	65039
27	Sampang	14556	19627	26344	33930	36765	35119	46974
28	Pamekasan	22842	34733	32313	36862	40268	38146	21032
29	Sumenep	32423	38991	41546	28007	44290	37039	42703
Kota								
30	Kediri	39399	55150	75564	72953	87487	77606	117491
31	Blitar	19678	27907	30995	47710	35856	40838	52565
32	Malang	58955	62312	87345	83401	91991	101519	185818
33	Probolinggo	21614	29504	35429	50345	42417	40071	57457
34	Pasuruan	14568	19372	18405	27089	35678	34613	45215

35	Mojokerto	13509	20580	20169	68159	28783	29519	30596
36	Madiun	22602	20514	23206	68159	43872	28146	61333
37	Surabaya	496406	538370	609926	728393	809784	1036167	1887113
38	Batu	9118	12245	16332	22913	17386	30000	30257
	Total	1801560	2178519	2504136	2934344	3359329	3527730	5480045

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan tabel diatas, jumlah PAD yang tertinggi tahun 2011 adalah kota Surabaya yang memperoleh Rp 1,887,113,000,000,00. Ini karena kota Surabaya merupakan pusat kota provinsi dan pusat perekonomian. Sehingga sumber PAD yang didapat juga besar. Kemudian PAD terendah adalah kabupaten Pamekasan yang memperoleh Rp 21,032,000,000,00.

d. Dana Alokasi Umum

DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU adalah transfer dari pemerintahan pusat ke pemerintah daerah otonom dalam bentuk blok, artinya penggunaan dari DAU ditetapkan sendiri oleh daerah. Penggunaan DAU diutamakan untuk membiayai pelayanan dasar kepada masyarakat daerah. DAU ini dapat dianggap pengganti subsidi daerah otonom dan sebagian dana inpres di masa lalu (pada masa pemberlakuan UU No. 32/1956). Dalam UU No. 25 tahun 1999 tujuan alokasi DAU adalah menciptakan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah sehingga daerah kurang mampu akan mendapat alokasi DAU yang relatif besar. Perumusan besaran transfer dana

DAU dilakukan oleh DPOD dan menteri keuangan. Hal ini dapat dilihat dalam tabel DAU kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011 berikut:

Tabel 4.5 Dana Alokasi Umum Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur

Tahun 2005-2011 (jutaan)

no	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kabupaten								
1	Pacitan	222.922	338.655	371.997	406.718	429.137	435.691	480.825
2	Ponorogo	288.950	442.634	490.926	538.560	550.746	563.868	634.712
3	Trenggalek	256.498	384.418	431.681	465.748	465.948	472.360	535.503
4	Tulungagung	320.158	513.252	564.916	628.425	625.040	648.991	724.035
5	Blitar	335.944	539.135	194.040	634.378	629.882	639.739	698.002
6	Kediri	380.907	583.284	635.830	682.047	701.502	693.062	750.629
7	Malang	513.563	795.059	880.921	967.647	959.099	967.107	1.049.562
8	Lumajang	283.848	438.186	479.591	537.879	534.208	557.173	606.141
9	Jember	500.843	770.394	861.126	942.533	940.397	955.007	1.059.232
10	Banyuwangi	398.823	629.281	698.228	771.132	766.830	761.897	815.653
11	Bondowoso	251.718	362.750	397.430	447.561	455.451	479.820	540.205
12	Situbondo	221.834	346.403	383.831	427.846	433.443	447.610	516.045
13	Probolinggo	279.153	438.188	484.750	531.085	537.641	568.850	639.207
14	Pasuruan	378.252	455.713	532.901	599.548	606.163	636.119	714.590
15	Sidoarjo	365.661	524.136	588.073	643.016	666.154	666.336	759.044
16	Mojokerto	270.558	398.584	450.454	501.520	502.177	244.970	598.972
17	Jombang	313.443	465.429	450.454	587.179	601.450	606.943	664.825
18	Nganjuk	318.323	492.050	539.899	580.060	590.835	598.046	669.917
19	Madiun	246.292	386.273	421.464	468.644	463.554	476.031	523.294
20	Magetan	261.901	405.061	451.962	490.164	489.555	503.708	546.569
21	Ngawi	284.397	450.160	493.983	544.878	555.625	572.965	654.720
22	Bojonegoro	321.111	493.589	552.361	586.814	596.430	583.764	665.540
23	Tuban	295.978	425.062	470.385	512.349	520.020	541.454	606.248
24	Lamongan	324.917	493.991	540.603	599.292	581.719	606.700	680.162
25	Gresik	261.283	392.884	452.286	532.824	511.324	513.482	561.391
26	Bangkalan	258.229	387.429	430.851	472.872	478.768	497.594	565.946
27	Sampang	231.753	330.911	370.902	422.388	428.946	454.854	499.762
28	Pamekasan	244.186	373.618	410.702	447.935	458.240	475.711	513.549
29	Sumenep	363.407	432.473	492.667	552.280	565.851	580.852	664.760
Kota								
30	Kediri	131.453	359.132	350.377	400.162	408.247	421.790	399.398
31	Blitar	121.252	170.379	194.040	217.166	225.700	223.964	250.236
32	Malang	221.130	367.435	417.300	473.050	471.739	494.911	533.804
33	Probolinggo	117.368	199.720	225.555	250.880	259.533	268.393	311.527
34	Pasuruan	125.070	183.644	203.153	225.590	230.765	231.964	264.131
35	Mojokerto	111.550	198.635	212.039	222.502	238.045	244.970	265.655

36	Madiun	207.320	214.486	238.456	266.187	272.306	271.396	297.864
37	Surabaya	359.520	453.753	639.590	713.590	765.886	652.532	679.450
38	Batu	104.489	159.797	188.025	215.978	218.135	232.146	273.688
	Jumlah Total	10.494.004	15.795.984	17.193.749	19.508.429	19.736.493	19.792.770	22.214.792

Sumber: Undang-undang tentang Penetapan DAU

Dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa wilayah-wilayah yang kurang maju mendapat DAU yang cukup besar dibanding dengan daerah yang maju. Karena mengacu pada tujuan DAU itu sendiri yaitu pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Transfer DAU tertinggi pada tahun 2011 adalah kabupaten Jember dan kabupaten Malang yang berjumlah Rp 1,049,561,624,000,00 dan Rp1,059,232,324,000,00. Dan yang mendapat transfer terendah adalah kota Blitar dan Kota Batu yang berjumlah Rp250,235,761,000,00 dan Rp 273,688,209,000,00. Ini karena kebutuhan fiskal kota Blitar dan Kota Batu memiliki kebutuhan fiskal yang sedikit.

6. Keadaan Sosial : IPM

Salah satu indikator yang dilihat untuk melihat keberhasilan pembangunan di suatu wilayah adalah tersedianya cukup sumberdaya manusia yang berkualitas. Ini dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada suatu wilayah tersebut. Dari tahun 2005-2011, IPM Provinsi Jawa Timur mengalami peningkatan yang signifikan meskipun peningkatan tersebut tidak terlalu tinggi. Ini dapat dilihat di tabel IPM Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011.

Tabel 4.6 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kabupaten/kota di Jawa**Timur Tahun 2005-2011 (persen)**

no	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
kabupaten								
1	Pacitan	67,02	68,09	69,77	70,48	70,91	71,45	72,29
2	Ponorogo	65,15	66,45	67,13	68,55	69,07	69,75	70,58
3	Trenggalek	68,69	70,18	71,21	71,68	72,15	72,72	73,36
4	Tulungagung	69,59	70,48	70,7	72	72,45	72,93	73,54
5	Blitar	68,46	70,33	72,05	72,28	72,74	73,22	73,94
6	Kediri	67,9	68,67	69,34	70,39	70,85	71,33	72
7	Malang	65,92	66,92	68,39	69,07	69,55	70,09	70,88
8	Lumajang	62,25	64,5	65,9	66,2	66,65	67,26	67,95
9	Jember	60,05	61,72	63,04	63,27	63,71	64,33	64,98
10	Banyuwangi	64,52	66,02	66,8	67,24	67,8	68,36	68,95
11	Bondowoso	58,27	59,9	60,36	60,76	61,26	62,11	62,66
12	Situbondo	59,14	60,23	61,79	62,64	63,06	63,69	64,56
13	Probolinggo	58,01	59,75	60,63	60,97	61,44	62,13	62,73
14	Pasuruan	63,09	64,17	65,28	65,52	66,02	66,84	67,51
15	Sidoarjo	72,33	73,98	74,54	74,87	75,35	75,88	76,36
16	Mojokerto	68,83	70,26	70,61	71,99	72,51	72,93	73,6
17	Jombang	69,03	69,43	70,29	71,44	71,85	72,33	73,06
18	Nganjuk	67,03	67,51	68,47	69,25	69,73	70,27	70,96
19	Madiun	66,55	66,9	67,75	68,24	68,63	69,28	69,88
20	Magetan	68,75	69,91	70,54	71,2	71,79	72,32	72,92
21	Ngawi	64,64	65,15	65,96	67,52	68,02	68,41	69,23
22	Bojonegoro	64,09	63,6	64,93	65,5	65,83	66,38	67,08
23	Tuban	64,36	64,21	66,46	66,61	67,02	67,68	68,55
24	Lamongan	66,06	66,86	67,41	67,88	68,33	69,03	69,57
25	Gresik	71	71,64	72,51	73	73,49	73,98	74,57
26	Bangkalan	60,03	60,24	62,72	62,97	63,4	64	64,94
27	Sampang	53,83	54,98	56,27	56,99	57,66	58,68	59,61
28	Pamekasan	60,06	61,78	61,98	62,49	63,13	63,81	64,32
29	Sumenep	61,24	61,19	63,08	63,71	64,24	64,82	65,72
Kota								
30	Kediri	71,57	73,22	73,59	74,45	75,11	75,68	76,3
31	Blitar	73,19	75,1	75,58	75,88	76,6	76,98	77,5
32	Malang	72,42	73,85	75,34	75,72	76,19	76,69	77,4
33	Probolinggo	68,55	71,31	71,51	72,76	73,29	73,73	74,34
34	Pasuruan	68,96	71,44	71,98	72,2	72,6	73,01	73,4
35	Mojokerto	73,22	74,64	75,15	75,66	76,11	76,43	76,87
36	Madiun	73,59	73,88	74,35	75,42	75,89	76,23	76,81

37	Surabaya	74,21	74,6	75,11	75,87	76,36	76,82	77,38
38	Batu	69,51	71	71,45	72,83	73,33	73,88	74,6
	Jawa Timur	66,84	67,48	68,42	69,09	69,58	70,14	70,81

Sumber: BPS Jawa Timur

Dengan melihat tabel diatas, dapat dilihat pada tahun 2011 bahwa kota Blitar mempunyai nilai IPM tertinggi yaitu 77,45, dan yang kedua adalah wilayah kota Surabaya yang mempunyai nilai IPM 77,38. Sedangkan untuk nilai terendah adalah kabupaten Pamekasan dengan nilai IPM 64,32. Dengan begitu, disimpulkan bahwa Provinsi Jawa Timur harus lebih mengoptimalkan lagi pembangunan dalam hal peningkatan sumber daya manusia khususnya wilayah yang nilai IPMnya rendah. Karena dengan pembangunan sumber daya manusia diharapkan dapat meningkatkan produktivitas angkatan kerja, yang secara langsung berpengaruh positif terhadap tingkat kesejahteraan penduduk, melalui membaiknya tingkat pendapatan.

B. Analisis Data

1. Tingkat Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan hasil perhitungan dengan rumus Indeks Williamson, dapat diketahui tingkat ketimpangan di Provinsi Jawa Timur selama tahun 2005-2011. Perhitungan indeks Williamson didasarkan pada data PDRB masing-masing daerah digunakan rumus sebagai berikut;

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum_i (y_i - \bar{y})^2 (f_i : n)}}{\bar{y}} \quad 0 < V_w < 1$$

Dimana:

V_w = Indeks Williamson.

f_i = Jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur.

n = Jumlah penduduk di Provinsi Jawa Timur.

y_i = PDRB per kapita masing-masing Kabupaten/Kota.

\bar{y} = PDRB per kapita di Provinsi Jawa Timur.

Hasil pengukuran dari nilai Indeks Williamson ditunjukkan oleh angka 0 sampai angka 1 atau $0 < VW < 1$. Jika indeks Williamson semakin mendekati angka 0 maka semakin kecil ketimpangan pembangunan ekonomi dan jika indeks Williamson semakin mendekati angka 1 maka semakin melebar ketimpangan pembangunan ekonomi (Safrizal, 1997). Hasil dari perhitungan tersebut dapat kita ketahui seperti dalam tabel sebagai berikut:

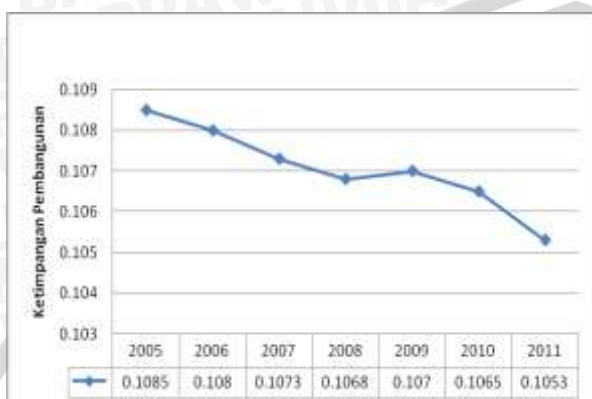
Tabel 4.7 Indeks Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

No	Kabupaten/kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kabupaten								
1	Pacitan	0,0850	0,0854	0,0856	0,0857	0,0855	0,0844	0,0867
2	Ponorogo	0,0916	0,0917	0,0914	0,0913	0,0900	0,0859	0,0896
3	Trenggalek	0,0909	0,0898	0,0897	0,0892	0,0883	0,0879	0,0905
4	Tulungagung	0,0225	0,0208	0,0213	0,0210	0,0206	0,0203	0,0296
5	Blitar	0,0657	0,0633	0,0627	0,0633	0,0629	0,0673	0,0745
6	Kediri	0,0933	0,0921	0,0940	0,0946	0,0951	0,0986	0,1058
7	Malang	0,0843	0,0844	0,0838	0,0839	0,0841	0,0865	0,0979
8	Lumajang	0,0491	0,0519	0,0525	0,0532	0,0531	0,0512	0,0586
9	Jember	0,1160	0,1215	0,1209	0,1180	0,1177	0,1194	0,1277
10	Banyuwangi	0,0442	0,0441	0,0440	0,0418	0,0396	0,0396	0,0498
11	Bondowoso	0,0863	0,0876	0,0875	0,0875	0,0873	0,0895	0,0928
12	Situbondo	0,0391	0,0411	0,0412	0,0413	0,0412	0,0447	0,0508
13	Probolinggo	0,0446	0,0449	0,0437	0,0438	0,0433	0,0478	0,0560
14	Pasuruan	0,0890	0,0878	0,0866	0,0863	0,0862	0,0900	0,0974
15	Sidoarjo	0,1858	0,1715	0,1660	0,1588	0,1534	0,1248	0,0957
16	Mojokerto	0,0416	0,0423	0,0427	0,0438	0,0444	0,0451	0,0534
17	Jombang	0,0779	0,0791	0,0798	0,0811	0,0833	0,0755	0,0825

18	Nganjuk	0,0762	0,0783	0,0773	0,0775	0,0774	0,0900	0,0841
19	Madiun	0,0674	0,0679	0,0678	0,0680	0,0681	0,0703	0,0744
20	Magetan	0,0529	0,0535	0,0538	0,0529	0,0530	0,0531	0,0579
21	Ngawi	0,0849	0,0842	0,0848	0,0851	0,0848	0,0831	0,0873
22	Bojonegoro	0,0798	0,0757	0,0679	0,0611	0,0604	0,0454	0,0506
23	Tuban	0,0518	0,0473	0,0453	0,0434	0,0422	0,0459	0,0539
24	Lamongan	0,1020	0,1003	0,0999	0,0998	0,0987	0,0976	0,1052
25	Gresik	0,1012	0,1059	0,1068	0,1062	0,1081	0,1194	0,1015
26	Bangkalan	0,0887	0,0911	0,0935	0,0958	0,0979	0,0946	0,0981
27	Sampang	0,0975	0,0989	0,1017	0,1003	0,1060	0,1053	0,1100
28	Pamekasan	0,0995	0,1004	0,1026	0,1045	0,1060	0,1039	0,1079
29	Sumenep	0,0671	0,0671	0,0679	0,0688	0,0691	0,0713	0,0780
Kota								
30	Kediri	0,9319	0,9144	0,8851	0,8730	0,8860	0,9131	0,8440
31	Blitar	0,0234	0,0244	0,0226	0,0230	0,0227	0,0220	0,0244
32	Malang	0,1295	0,1338	0,1340	0,1365	0,1318	0,1322	0,1134
33	Probolinggo	0,0067	0,0070	0,0062	0,0047	0,0028	0,0068	0,0011
34	Pasuruan	0,0185	0,0124	0,0128	0,0134	0,0131	0,0164	0,0200
35	Mojokerto	0,0134	0,0146	0,0145	0,0144	0,0150	0,0115	0,0067
36	Madiun	0,0167	0,0091	0,0090	0,0086	0,0084	0,0046	0,0083
37	Surabaya	0,6969	0,7076	0,7181	0,7241	0,7250	0,6890	0,6227
38	Batu	0,0130	0,0148	0,0143	0,0140	0,0136	0,0133	0,0169
Jawa Timur		0,1085	0,1080	0,1073	0,1068	0,1070	0,1065	0,1053

Berdasarkan hasil diatas, tingkat ketimpangan pembangunan di provinsi jawa timur dari tahun 2005-2011 mengalami penurunan meskipun terjadi peningkatan pada tahun 2009. Ini dibuktikan pada tahun 2005 hingga 2006 mengalami penurunan dari 0,1085 menjadi 0,1080. Pada tahun 2006 hingga 2007 mengalami penurunan dari 0,1080 menjadi 0,1073. Terjadi penurunan lagi sebesar 0,0007 pada tahun 2007. Kemudian menurun kembali pada tahun 2008 sebesar 0,0005, sehingga menjadi 0,1068. Namun pada tahun 2009 terjadi peningkatan sebesar 0,0002 sehingga indeks ketimpangannya naik menjadi 0,1070. Untuk tahun 2010 terjadi penurunan lagi sebesar 0,0005 sehingga nilai indeks

ketimpangannya menjadi 0,1065. Dan untuk tahun 2011 terjadi penurunan yang signifikan sebesar 0,0012 sehingga nilai indeks ketimpangannya menjadi 0,1053. Hasil tersebut juga dapat dilihat dalam grafik sebagai berikut;



Grafik 4.1 Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

Ada dua kota yang nilai ketimpangannya jauh diatas nilai ketimpangan Provinsi Jawa Timur. Dua kota tersebut adalah kota Kediri dan Kota Surabaya, Kota Kediri mempunyai nilai ketimpangan 0,9319, 0,9144, 0,8851, 0,8730, 0,8860, 0,9131 0,8440 pada tahun 2005-2011. Sedangkan pada kota Surabaya, mempunyai nilai ketimpangan 0,6969, 0,7076, 0,7181, 0,7241, 0,7250, 0,6890, 0,6227 pada tahun 2005-2011. Ini menandakan bahwa tingkat kemajuan pembangunan pada 2 kota tersebut jauh diatas kota dan kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Jawa Timur. Hanya saja bila dirata-rata dengan semua kabupaten dan kota yang di Provinsi Jawa Timur, ketimpangan yang terjadi di 2 kota tersebut tidak terlalu dominan karena semua kabupaten kota selain 2 kota tersebut ketimpangannya sangat rendah.

Dengan melihat nilai indeks Williamson Provinsi Jawa Timur yang nilainya rata-rata sekitar 0,1 pada tahun 2005-2011, ini menandakan bahwa

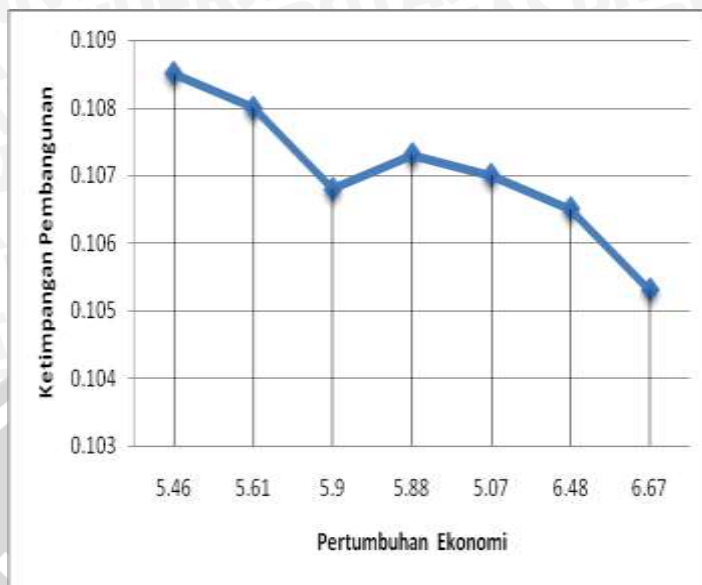
ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa Timur tergolong rendah. Ini dikarenakan nilai indeks Williamsonnya mendekati nilai 0.

2. Pembuktian Hipotesis Kuznets

Menurut Hipotesis Kuznets (Todaro, 2006) mengenai Kurva U-terbalik yang menjelaskan pada tahap awal pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan cenderung memburuk, namun pada tahap selanjutnya atau pada titik puncak, distribusi pendapatan pun akan membaik. Maka benarkah keadaan seperti ini akan dialami oleh Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2011. Untuk itu dapat kita lihat pada tabel dan grafik sebagai berikut:

Tabel 4.8 Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

Tahun	Pertumbuhan Ekonomi	Ketimpangan Pembangunan
2005	5,46	0,1085
2006	5,61	0,1080
2007	5,9	0,1073
2008	5,88	0,1068
2009	5,07	0,1070
2010	6,48	0,1065
2011	6,67	0,1053



Grafik 4.2 Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

Berdasarkan tabel diatas, pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami fluktuasi, Ini terlihat pada tahun 2005-2011 yang nilainya antara lain; 5,46, 5,61, 5,9, 5,88, 5,07, 6,48, 6,67. Hal yang sama ditunjukkan oleh ketimpangan pembangunan yang nilai indeks wiliamsonnya antara lain; 0,1085, 0,1080, 0,1073, 0,1068, 0,1070, 0,1065, 0,1053. Untuk membuktikan hipotesis Kuznets tentang U-terbalik, maka menggunakan korelasi Pearson dengan bantuan SPSS 17, Adapaun hasil dari korelasi tersebut adalah sebagai berikut;

Tabel 4.9 Hasil Analisis Korelasi Pearson

		PE	KP
PE	Pearson Correlation	1	-,723
	Sig, (2-tailed)		,067
	N	7	7
KP	Pearson Correlation	-,723	1
	Sig, (2-tailed)	,067	

Correlations

		PE	KP
PE	Pearson Correlation	1	-,723
	Sig. (2-tailed)		,067
	N	7	7
KP	Pearson Correlation	-,723	1
	Sig. (2-tailed)	,067	
	N	7	7

Dari matrik korelasi Pearson, diperoleh hasil bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan adalah negatif yaitu -0,723, dan nilai signifikansinya 0,067 lebih besar 0,05. Ini berarti bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dimana pertumbuhan ekonomi naik akan menyebabkan ketimpangan pembangunan turun. Sehingga hipotesis Kuznets tentang U-terbalik di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2011 terbukti.

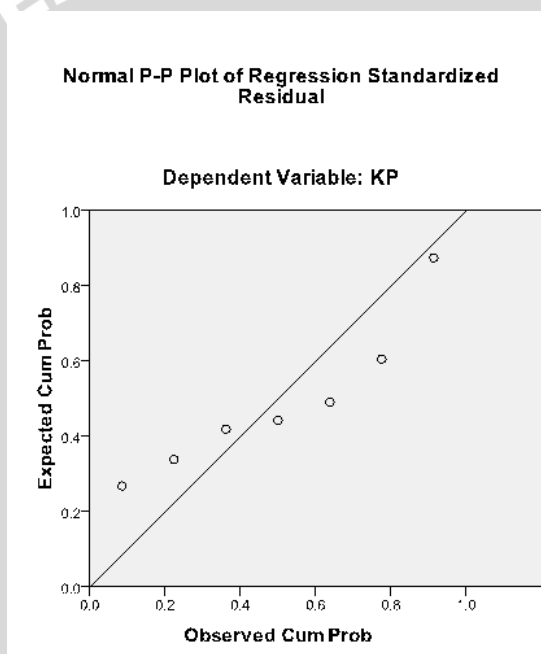
3. Analisis Variabel-Variabel yang Mempengaruhi Ketimpangan Pembangunan

a. Uji Asumsi Klasik

Sebelum melakukan pengujian regresi linier berganda, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah data tersebut harus terdistribusikan secara normal, tidak mengandung multikolinieritas, autokolerasi, dan heteroskedastisitas (Ghozali, 2006).

1) Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel terikat dan variabel bebas keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Arti dari berdistribusi normal adalah nilai tersebut lebih banyak berada pada nilai tengah atau rata-rata. Jika distribusi data adalah normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Hasil regresi uji normalitas dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 4.2 Hasil Uji Normalitas

Pada gambar diatas dapat dilihat bahwa distribusi data tidak mengikuti garis diagonal. Sehingga nilai tersebut lebih banyak berada pada nilai tengah atau rata-rata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dan variabel bebas, keduanya tidak berdistribusi normal.

2) Uji Multikolinearitas

Uji Multikolinearitas digunakan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi yang kuat di antara variabel-variabel *independen* yang diikutsertakan dalam pembentukan model. Untuk mendeteksi apakah model regresi linier mengalami multikolinearitas dapat diperiksa menggunakan *Variance Inflation Factor* (VIF) untuk masing-masing variabel independen, yaitu jika suatu variabel independen mempunyai nilai $VIF > 10$ berarti telah terjadi multikolinearitas.

Tabel 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficients ^a			
Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PDRB	.006	181.241
	PAD	.031	31.849
	DAU	.080	12.506
	IPM	.008	125.048

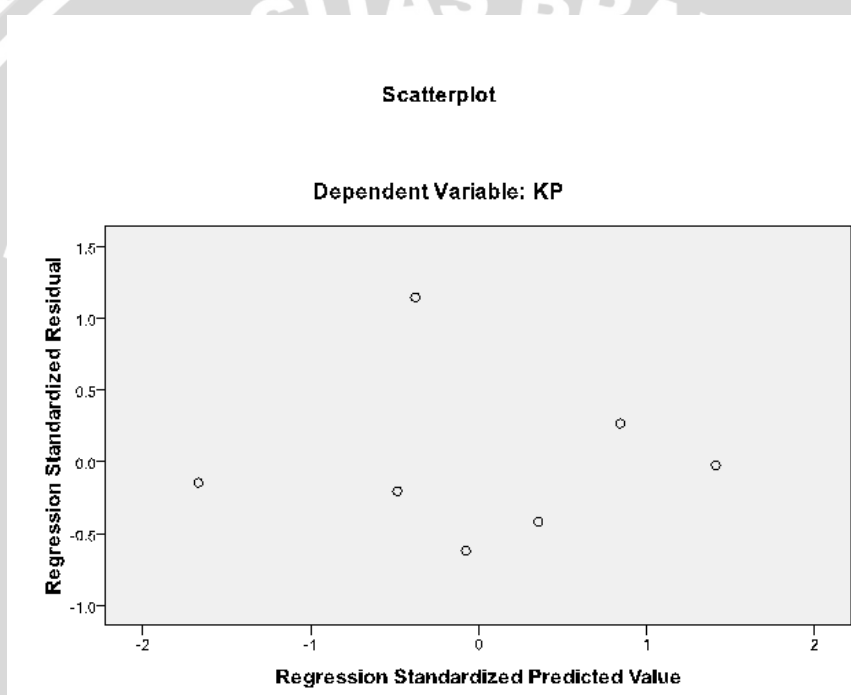
a. Dependent Variable: KP

Berdasarkan hasil regresi diatas, diketahui bahwa nilai VIF masing-masing variabel diatas 10 yaitu 181,241, 31,849, 12,506, 125,048. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diantara variabel *independent* ada korelasi atau terjadi gejala Multikolinearitas pada model regresi linier berganda.

3) Uji Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan

yang lain. Jika ada pola tertentu seperti titik-titik yang ada membentuk pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar, kemudian menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Dan jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Adapun hasil regresi untuk uji heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar berikut;



Gambar 4.3 Hasil Uji Heterokedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, dapat dilihat bahwa ada titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Dan lebih banyak ada di bawah sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat gejala Heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda.

4) Uji Autokorelasi

Uji Autokorelasi digunakan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi linier terdapat korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pada periode $t-1$ (sebelumnya). Untuk menguji Autokorelasi dapat dilihat dari nilai Durbin Waston (DW), yaitu jika nilai DW terletak antara d_U dan $(4 - d_U)$ atau $d_U \leq DW \leq (4 - d_U)$ berarti bebas dari Autokorelasi, sebaliknya jika nilai $DW < d_L$ atau $DW > (4 - d_L)$ berarti terdapat Autokorelasi. Nilai d_L dan d_U dapat dilihat pada tabel Durbin Waston, yaitu nilai d_L ; d_U ; α ; n ; $(k - 1)$. Keterangan: n adalah jumlah sampel, k adalah jumlah variabel, dan α adalah taraf signifikan. Adapun hasil dari uji autokorelasi adalah sebagai berikut;

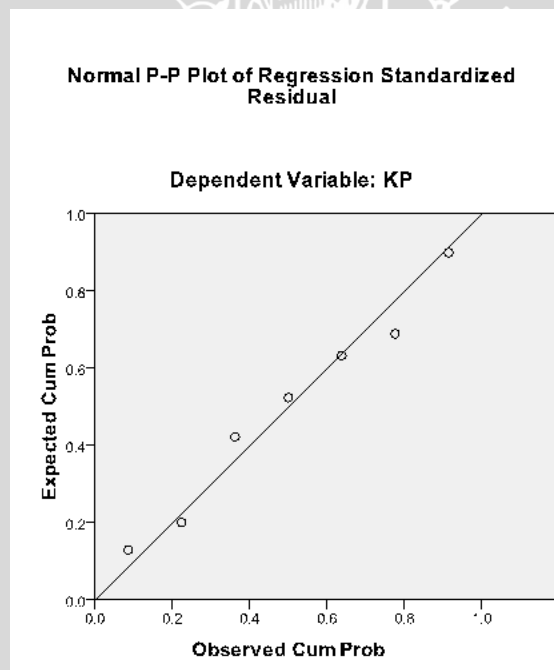
Tabel 4.11 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.987 ^a	.974	.923	.0002893	2.761

a. Predictors: (Constant), IPM, PAD, DAU, PDRB
b. Dependent Variable: KP

Nilai tabel Durbin Watson pada $\alpha=5\%$; $n=7$; $k-1=4$, d_L dan d_U untuk hasil itu tidak terdapat dalam tabel dikarenakan jumlah n -nya kurang. Hasil pengolahan data pada tabel diatas menunjukkan tabel Durbin Watson sebesar 2,761 dan nilai tersebut sangat besar bila dibandingkan dengan nilai d_U dan nilai $(4-d_U)$ meskipun nilainya tidak terdapat dalam tabel Durbin Watson. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier tersebut terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi diantara kesalahan pengganggu.

Berdasarkan hasil uji asumsi klasik diatas, maka variabel ketimpangan pembangunan, PDRB, PAD, DAU, IPM tidak dapat dilakukan uji regresi berganda dikarenakan mengalami gejala normalitas, multikolinearitas, heterokedastisitas, dan autokorelasi (Ghozali, 2006). Sehingga dilakukan pengujian ulang dengan membuang beberapa variabel. Variabel yang dibuang agar dapat lolos dalam uji asumsi klasik ini adalah variabel PDRB dan DAU. Sehingga untuk analisis selanjutannya, variabel yang digunakan hanya ketimpangan pembangunan, PAD, dan IPM saja. Adapun hasil dari pengulangan uji asumsi klasik tersebut adalah sebagai berikut;



Gambar 4.4 Hasil Pengulangan Uji Normalitas

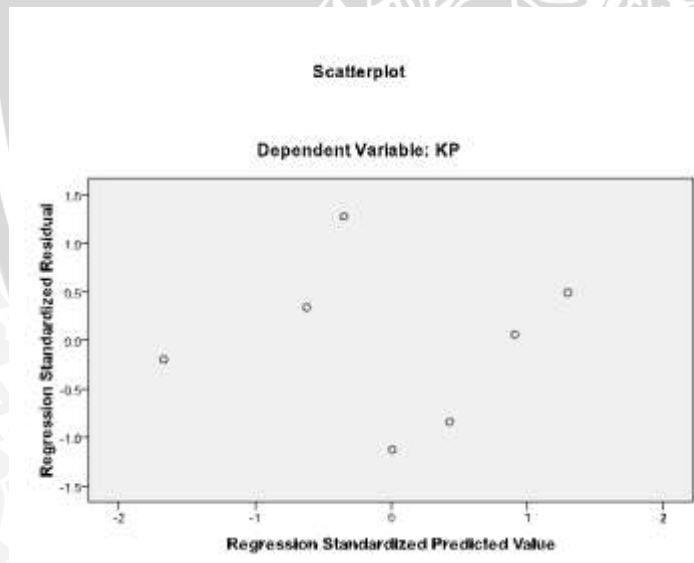
Pada gambar diatas dapat kita lihat bahwa distribusi data mengikuti garis diagonal. Sehingga nilai tersebut lebih banyak berada pada nilai tengah atau rata-rata. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel terikat dan variabel bebas, keduanya mempunyai distribusi normal.

Tabel 4.12 Hasil Pengulangan Uji Multikolinieritas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	PAD	.162	6.158
	IPM	.162	6.158

a. Dependent Variable: KP

Berdasarkan hasil regresi diatas, diketahui bahwa nialai VIF masing-masing variabel dibawah 10 yaitu 6,158. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa diantara variabel independen tidak ada korelasi atau tidak terjadi Multikolinieritas pada model regresi linier berganda.



Gambar 4.5 Hasil Pengulangan Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan gambar diatas, dapat kita lihat bahwa tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik yang menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat Heteroskedastisitas pada model regresi linier berganda.

Tabel 4.13 Hasil Pengulangan Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.983 ^a	.966	.949	.0002343	2.003

a. Predictors: (Constant), IPM, PAD

b. Dependent Variable: KP

Nilai tabel Durbin Watson pada $\alpha=5\%$; $n=7$; $k-1=2$ adalah $d_L=0,4672$ dan $d_U=1,8964$. hasil pengolahan data pada tabel diatas menunjukkan tabel Durbin Watson sebesar 2,003 dan nilai tersebut berada diantara d_U dan $(4 - d_U)$ atau $1,8964 < 2,003 < 2,1036$, maka dapat disimpulkan bahwa dalam regresi linier tersebut tidak terdapat autokorelasi atau tidak terjadi korelasi diantara kesalahan pengganggu.

b. Hasil Analisis Regresi Berganda

Berdasarkan hipotesis diatas, teknik analisis data menggunakan Analisis regresi berganda dengan model persamaan: $Y = a + b_1 X_1 + b_2 X_2 + b_3 X_3 + b_4 X_4 + \varepsilon$ seperti yang dijelaskan pada bab 3. Untuk menguji hipotesis digunakan Uji T (parsial), Uji F (serempak) dan R^2 . Sedangkan jenis uji hipotesis menggunakan uji satu arah dengan tingkat signifikan (α) sebesar 5%. Hasil analisis regresi berganda dapat dilihat pada tabel sebagai berikut;

Tabel 4.14 Koefisien Determinasi (Uji R²)

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.983 ^a	.966	.949	.0002343	2.003

a. Predictors: (Constant), IPM, PAD

b. Dependent Variable: KP

Tabel 4.15 Uji-F (Uji Simultan)

ANOVA^b

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.000	2	.000	57.193	.001 ^a
	Residual	.000	4	.000		
	Total	.000	6			

a. Predictors: (Constant), IPM, PAD

b. Dependent Variable: KP

Tabel 4.16 Uji Parsial (Uji-t)

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.134	.011		12.278	.000
	PAD	-4.220E-7	.000	-.492	-2.157	.097
	IPM	.000	.000	-.512	-2.247	.088

a. Dependent Variable: KP

Berdasarkan tabel 4.16 bagian *unstandardized coefficients* diatas, maka dapat dibuat model regresi dengan persamaan sebagai berikut:

$$Y = 0,134 - 4.220E-7X_1 - 0,000X_2$$

Dari persamaan diatas, maka ketimpangan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta sebesar 0,134, ini menunjukkan nilai indeks Williamson bila variabel bebasnya pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia.
2. Koefisien regresi untuk variabel pendapatan asli daerah memberikan nilai negatif sebesar $-4,220E-7$ atau $-0,0000004220$. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 1000000,00 per kapita, maka indeks wiliamson akan turun sebesar $0,0000004220$. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin besar dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.
3. Koefisien regresi untuk variabel IPM memberikan nilai sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa IPM meningkat sebesar 1% per kapita, maka indeks wiliamson tidak akan mengalami penurunan dikarenakan nilainya 0,000. Namun untuk kenaikan lebih dari 1% dimungkinkan indeks wiliamson akan mengalami penurunan dikarenakan nilai signifikansi atau nilai tabel t-nya negative dengan asumsi variabel lainnya dianggap konstan.

1) Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Dari tabel 4.14 menunjukkan bahwa nilai R^2 sebesar 0,966 (cukup tinggi). Nilai koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,966 artinya variasi variabel ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur dapat dijelaskan oleh variabel-variabel pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia sebesar 96,6% sedangkan sisanya sebesar 3,4% dijelaskan faktor-faktor lainnya di luar model.

2) Uji-F (Uji Simultan)

Uji-F digunakan untuk menguji pengaruh dari variabel independent secara simultan terhadap variable dependent. Untuk menguji kedua hipotesis tersebut, dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dan F_{tabel} . Jika nilai $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka tolak H_0 . Nilai F_{tabel} dengan tingkat signifikan $\alpha = 5\%$ dan Degrees of Freedom (df) sebesar 4 adalah 7,7086. Hasil regresi data dari tabel 4.15 diketahui bahwa nilai F_{hitung} adalah 57,193 dan nilai F_{hitung} tersebut lebih besar dari pada F_{tabel} maka dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak dan hipotesis peneliti diterima. Artinya variabel pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia secara keseluruhan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel ketimpangan pembangunan.

3) Uji Parsial (Uji-t)

Uji hipotesis secara parsial digunakan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing variabel *independen* terhadap variabel *dependent*. Uji ini dilakukan dengan membandingkan nilai T_{hitung} dengan nilai T_{tabel} . Nilai T_{hitung}

dari hasil pengolahan data dengan program SPSS dapat dilihat pada Tabel 4.16 bagian t. Hipotesis yang diajukan dengan membandingkan nilai t_{hitung} dari persamaan regresi dengan nilai kritis dari t_{tabel} pada taraf kepercayaan tertentu.

Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $-t_{hitung} < -t_{tabel}$ maka tolak H_0 . Untuk memperoleh nilai T_{tabel} , dapat dilihat pada tabel T Student, yaitu pada Degrees of Freedom (df) sebesar 4 (dengan rumus $n - k$, dimana n = banyak observasi sedangkan k = banyaknya variabel (bebas dan terikat)). Sehingga nilai t sebesar 2.1318.

Dengan membandingkan nilai T hitung dengan T tabel maka dapat disimpulkan:

1. Hipotesis kedua (H_1) mengatakan bahwa Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negative terhadap ketimpangan pembangunan. Nilai t hitung variabel pendapatan asli daerah sebesar -2,157 yang lebih kecil dari -2,1318, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh negative terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Maka hipotesis peneliti diterima.
2. Hipotesis keempat (H_1) mengatakan bahwa IPM berpengaruh negative terhadap ketimpangan pembangunan. Nilai t hitung variabel IPM sebesar -2,247 yang lebih kecil dari -2,1318, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel IPM berpengaruh negative terhadap pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Maka hipotesis peneliti diterima.

4. Deskripsi Hasil Nilai

a. Pengaruh PAD terhadap Ketimpangan Pembangunan

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama antara lain fungsi distribusi, alokasi dan stabilisasi (Stiglitz, 2000). Fungsi Alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu adanya peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam pengaturan distribusi pendapatan. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga.

Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Apabila Pemerintah Daerah melaksanakan fungsinya secara efektif, dan diberikan kebebasan dalam pengambilan keputusan penyediaan pelayanan di sektor publik, maka mereka harus didukung sumber-sumber keuangan yang memadai baik yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) termasuk *surcharge of taxes*, pinjaman, maupun dana perimbangan dari Pemerintah Pusat.

Adanya otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan akan lebih memeratakan pembangunan dengan mengoptimalkan potensi daerahnya masing-masing (Sasana, 2009). Otonomi dan desentralisasi fiskal diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi daerah serta mengurangi kesenjangan antar daerah. Kebijakan ini diharapkan akan memberikan dampak positif pada

transformasi ekonomi, transformasi tenaga kerja dan transformasi kelembagaan.

Menurut (Barzelay, 1991) mengatakan pemberian otonomi daerah melalui desentralisasi fiskal memiliki tiga misi utama, yaitu:

1. Menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam mengelola sumber daya daerah yang dimiliki.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan rakyat.
3. Menciptakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk bisa ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan.

Desentralisasi fiskal juga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas pembangunan dan penyediaan pelayanan umum karena semakin dekatnya masyarakat dengan pemerintah sehingga mampu mengakomodasi kondisi masyarakat dan wilayah yang heterogen. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk memperoleh dua sumber dana untuk melakukan pembangunan, yaitu yang berasal dari pendapatan asli daerahnya dan dana transfer dari pusat.

Musgrave dan Rostow dalam Mangkunsoebroto (1998) mengembangkan model pembangunan tentang pengeluaran pemerintah, yang menghubungkan perkembangan pengeluaran pemerintah dengan dengan tahap-tahap pembangunan ekonomi. Perkembangan pengeluaran negara sejalan dengan tahap perkembangan ekonomi dari negara tersebut. Pada tahap awal perkembangan ekonomi diperlukan pengeluaran negara yang besar untuk investasi pemerintah, utamanya untuk menyediakan infrastruktur. Pada tahap ini pemerintah harus menyediakan sarana dan prasarana publik, misalnya pendidikan, kesehatan, transportasi, dan

sebagainya. Pada tahap menengah pembangunan ekonomi, investasi tetap diperlukan untuk pertumbuhan ekonomi, namun diharapkan investasi sector swasta sudah mulai berkembang. Pada tahap menengah ini peranan pemerintah masih tetap besar karena peranan swasta yang semakin besar ini akan banyak menimbulkan kegagalan pasar dan juga pemerintah harus banyak menyediakan barang dan jasa publik dalam jumlah yang lebih banyak dan dengan kualitas yang lebih baik. Pada tahap lanjut pembangunan ekonomi, pengeluaran pemerintah tetap diperlukan, utamanya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Musgrave dan Rostow pada tahap lanjutan pembangunan ekonomi, investasi swasta dalam persentase GNP semakin besar, dan investasi pemerintah dalam persentase GNP semakin kecil. Melalui teori ini Musgrave dan Rostow berpendapat bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah akan beralih dari penyediaan barang dan jasa publik menjadi pengeluaran untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan aktivitas social, misalnya program kesehatan hari tua, program kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Oleh karena itu diperlukan, dana anggaran pengeluaran yang besar agar pembangunan yang seperti dijelaskan oleh Musgrave dan Rostow terwujud. Dan anggaran pengeluaran yang besar tersebut diperlukan anggaran penerimaan yang besar yang terdiri dari pendapatan daerah dan transfer dari pusat.

Menurut Mardiasmo (2002:132), pendapatan asli daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Peningkatan PAD akan mendorong

pertumbuhan ekonomi daerah. Adanya kenaikan PAD akan meningkatkan anggaran belanja daerah sehingga akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Ini dikarenakan anggaran tersebut dapat digunakan dalam mengoptimalkan dan menaikkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti industri, perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada. Hal ini sesuai dengan teori pengeluaran Musgrave dan Rostow. Kegunaan PAD juga untuk pemenuhan pelayanan dasar seperti kesehatan, dan pendidikan. Sehingga dapat meningkatkan pembangunan manusia. Meskipun peran PAD yang tidak begitu besar dibanding dengan DAU, tetapi setidaknya peran PAD dapat mengurangi ketimpangan pembangunan.

Berdasarkan hasil analisis regresi, besarnya pendapatan asli daerah berhasil menurunkan ketimpangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Jawa Timur. hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh PAD terhadap ketimpangan pembangunan, dimana pada hasil SPSS persamaan ketimpangan pembangunan koefisien PAD sebesar $-4,220E-7$ atau $-0,0000004220$. Ini berarti pendapatan asli daerah meningkat sebesar 1.000.000,00 per kapita, maka ketimpangan wilayah akan turun sebesar 0,0000004220. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin besar dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya penurunan ketimpangan pembangunan. Ini dikarenakan kenaikan PAD dapat memicu dan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur sehingga akan mengurangi ketimpangan pembangunan antar kabupaten dan kota di Provinsi

Jawa Timur. Adapun tabel Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan, kabupaten kota Provinsi Jawa Timur sebagai berikut.

Tabel 4. 17 Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

No	Jawa Timur	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	PAD	1.801.560	2.178.519	2.504.136	2.934.344	3.359.329	3.527.730	5.480.045
2	PE	5,46	5,61	5,9	5,88	5,07	6,48	6,67
3	KP	0,1085	0,1080	0,1073	0,1068	0,1070	0,1065	0,1053

Keterangan: PAD: Pendapatan Asli Daerah (jutaan)
 PE: Pertumbuhan Ekonomi (persen)
 KP: Ketimpangan Pembangunan

Berdasarkan tabel diatas, terlihat bahwa pada tahun 2005-2011 PAD Provinsi Jawa Timur mengalami kenaikan. Yaitu Rp 1.801.560.000.000,00 pada tahun 2005 menjadi Rp 5.480.045.000.000,00 pada tahun 2011. Pada tabel pertumbuhan ekonomi, juga mengalami kenaikan yang signifikan. Yaitu 5, 46% pada tahun 2005 menjadi 6,67% pada tahun 2011. Selain itu juga, tabel ketimpangan pembangunan pada tahun 2005-2011 mengalami penurunan. 0,1085 pada tahun 2005 menjadi 0,1053 pada tahun 2011. Jika dihubungkan antara PAD, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan, maka kenaikan PAD yang digunakan sebagai sumber APBD dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi dapat menurunkan ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan analisis korelasi pearson sebagai berikut;

Tabel 4.18 Hasil Analisis Korelasi Pearson

Correlations		
	PAD	PE
PAD	Pearson Correlation	1
		0,664

	Sig. (2-tailed)		.104
	N	7	7
PE	Pearson Correlation	.664	1
	Sig. (2-tailed)	.104	
	N	7	7

Correlations			
		PE	KP
PE	Pearson Correlation	1	-.723
	Sig. (2-tailed)		.067
	N	7	7
KP	Pearson Correlation	-.723	1
	Sig. (2-tailed)	.067	
	N	7	7

Dari analisis diatas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini dibuktikan dengan nilai positif sebesar 0,664 yang artinya kenaikan PAD akan meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak negative pada ketimpangan pembangunan karena dari tabel koefisien korelasi person tersebut pertumbuhan ekonomi mempunyai nilai negative -0,723 yang artinya kenaikan pertumbuhan ekonomi akan mengurangi ketimpangan pembangunan. Adapun tabel dari jumlah peningkatan Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Pembangunan di kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut;

**Tabel 4.19 Jumlah Peningkatan PAD dan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten
Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011**

No	Kabupaten/kota	2005-2011	2005-2011	2005-2011
Kabupaten		PAD	PE	KP
1	Pacitan	36164	3,04	0,0017
2	Ponorogo	37443	1,94	-0,002
3	Trenggalek	42887	2,03	-0,0004
4	Tulungagung	93868	1,87	0,0071
5	Blitar	48158	1,55	0,0088
6	Kediri	60728	3,77	0,0125
7	Malang	85745	1,33	0,0136
8	Lumajang	50120	0,88	0,0095
9	Jember	131110	0,58	0,0117
10	Banyuwangi	70627	1,65	0,0056
11	Bondowoso	46597	0,22	0,0065
12	Situbondo	37287	0,15	0,0117
13	Probolinggo	54617	0,93	0,0114
14	Pasuruan	90412	0,71	0,0084
15	Sidoarjo	275865	-0,13	-0,0901
16	Mojokerto	120018	0,25	0,0118
17	Jombang	75595	0,98	0,0046
18	Nganjuk	42980	1,29	0,0079
19	Madiun	42078	1,74	0,007
20	Magetan	24808	1,15	0,005
21	Ngawi	47915	1,63	0,0024
22	Bojonegoro	40178	4,1	-0,0292
23	Tuban	23170	0,97	0,0021
24	Lamongan	59268	1,37	0,0032
25	Gresik	185858	-0,93	0,0003
26	Bangkalan	42105	0,92	0,0094
27	Sampang	32418	1,62	0,0125
28	Pamekasan	-1810	1,12	0,0084
29	Sumenep	10280	2,64	0,0109
Rata rata kabupaten		65741	1.357586	0,002493
30	Kediri	78092	4,53	-0,0879
31	Blitar	32887	0,36	0,001
32	Malang	126863	-0,07	-0,0161
33	Probolinggo	35843	-0,32	-0,0056

34	Pasuruan	30647	0,33	0,0015
35	Mojokerto	17087	0,62	-0,0067
36	Madiun	38731	1,3	-0,0084
37	Surabaya	1390707	-0,06	-0,0742
38	Batu	21139	-0,15	0,0039
Rata-rata kota		196888,4	0.726667	-0,02139

Keterangan: PAD: Pendapatan Asli Daerah (jutaan)

PE: Pertumbuhan Ekonomi (persen)

KP: Ketimpangan Pembangunan

Dari tabel diatas, bila dilihat dari setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur, ada wilayah yang mengalami peningkatan ketimpangan pembangunan apabila PAD dan pertumbuhan ekonomi mengalami peningkatan. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten, Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan. Selain itu, ada juga wilayah yang mengalami peningkatan PAD, namun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Wilayah tersebut adalah Kabupaten Sidoarjo, Kabutan Gresik, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya dan Kota Batu. Dan hanya satu wilayah yang mengalami peningkatan PAD, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan ketimpangan pembangunan, yaitu Kabupaten Gresik.

Namun perbedaan tersebut apabila dirata-rata disetiap wilayah kabupaten dan kota, maka rata-rata wilayah kabupaten mengalami pertumbuhan ekonomi lebih besar dibanding dengan kota. Dengan begitu, wilayah kabupaten akan

semakin berkembang dan ketimpangan pembangunan antara kabupaten dengan kota akan semakin berkurang. Oleh karena itu, dari studi teori dan empiris tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

b. Pengaruh IPM terhadap Ketimpangan Pembangunan

Model pertumbuhan endogen dikembangkan untuk melengkapi teori pertumbuhan ekonomi neo-klasik (Capello, 2007). Teori pertumbuhan endogen pada awalnya berkembang dalam dua cabang pemikiran yang bertumpu pada pentingnya sumber daya manusia sebagai kunci utama dalam perekonomian, yaitu:

1. Pemikiran yang percaya bahwa *knowledge stock* adalah sumber utama bagi peningkatan produktivitas ekonomi.
2. Pemikiran yang menekankan pada pentingnya *learning by doing* dan *human capital* dengan introduksi hal-hal baru (yang bersifat eksternal) dalam perekonomian merupakan faktor pendorong bagi peningkatan produktivitas perekonomian.

Pemikiran bahwa stok pengetahuan merupakan salah satu faktor produksi yang semakin meningkat dikembangkan oleh Romer. Tingkat pertumbuhan dapat terus meningkat sesuai dengan kemampuan masing-masing negara dalam meningkatkan dan menciptakan stok pengetahuan. Oleh karena itu negara maju yang memiliki kemampuan menciptakan pengetahuan yang lebih cepat

dibandingkan dengan negara berkembang akan mengalami pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat.

Model Romer menekankan pada akumulasi pengetahuan dalam upaya mencapai pertumbuhan jangka sehingga bisa mencapai kondisi konvergen. Model pertumbuhan endogen berikutnya dikemukakan oleh Lucas melalui model akumulasi *human capital* dengan *learning theory*. *Learning theory* memasukkan unsur eksternalitas yang terkandung dalam peningkatan modal pada proses produksi. Peningkatan modal akan meningkatkan stok *public knowledge*, sehingga secara keseluruhan proses produksi dalam skala yang bersifat *increasing return to scale*. Akumulasi modal manusia dapat dilakukan melalui pendidikan formal maupun bukan jalur pendidikan formal (*on the job training*). Eksternalitas yang dihasilkan oleh investasi dalam pendidikan umum (termasuk kegiatan produksi) serta investasi dalam beberapa kegiatan tertentu inilah yang menyebabkan proses bersifat *learning by doing*. Dengan kedua pendapat tersebut dapat meningkatkan kualitas manusia yang dinyatakan dengan peningkatan IPM.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM)/*Human Development Index* (HDI) adalah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, buta huruf, pendidikan dan standar hidup untuk semua negara seluruh dunia. HDI digunakan untuk mengklasifikasikan apakah sebuah negara adalah negara maju, negara berkembang atau negara terbelakang dan juga untuk mengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup.

Pembangunan manusia dapat diukur dengan nilai IPM. Nilai IPM suatu negara atau wilayah menunjukkan seberapa jauh negara atau wilayah itu telah

mencapai sasaran yang ditentukan yaitu angka harapan hidup 85 tahun, pendidikan dasar bagi semua lapisan masyarakat (tanpa kecuali), dan tingkat pengeluaran dan konsumsi yang telah mencapai standar hidup yang layak. Oleh karena, apabila tingkat nilai IPM tinggi, maka tingkat pembangunan manusia di wilayah tersebut juga tinggi.

Mengacu pada teori pertumbuhan endogen, bahwa modal manusia merupakan faktor penting dan utama dalam pertumbuhan ekonomi. Maka dimungkinkan bahwa dengan tingkat pembangunan manusia yang tinggi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga ketimpangan pembangunan dapat berkurang.

Pada Provinsi Jawa Timur, kenaikan IPM dapat menurunkan ketimpangan pembangunan. Hal ini dapat dibuktikan dari perhitungan pengaruh tingkat rasio IPM daerah terhadap ketimpangan pembangunan, dimana pada hasil SPSS persamaan ketimpangan pembangunana koefisien IPM sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi t-nya negative. Artinya jika nilai IPM meningkat 1%perkapita tidak akan mengalami penurunan ketimpangan, tetapi jika mengalami kenaikan lebih dari 1% dimungkinkan akan mengalami penurunan ketimpangan pembangunan dikarenakan nilai t-nya negatif. Hal ini membuktikan bahwa peningkatan IPM di Jawa Timur dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan. Adapun tabel dari IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan adalah sebagai berikut;

**Tabel 4.20 IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan
Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011**

NO	JAWA TIMUR	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
1	IPM	66,84	67,48	68,42	69,09	69,58	70,14	70,81
2	PE	5,46	5,61	5,9	5,88	5,07	6,48	6,67
3	KP	0,1085	0,1080	0,1073	0,1068	0,1070	0,1065	0,1053

Keterangan: IPM: Indeks Pembangunan Manusia (persen)

PE: Pertumbuhan Ekonomi (persen)

KP: Ketimpangan Pembangunan

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa pada tahun 2005-2011 terjadi peningkatan IPM dari 66,84% menjadi 70,81%. Sedangkan pertumbuhan ekonomi juga mengalami peningkatan dari 5,46% pada tahun 2005 menjadi 6,67% pada tahun 2011. Dan pada kolom Ketimpangan pembangunan pada tahun 2005-2011, mengalami penurunan dari 0,1085 menjadi 0,1053. Dari tabel tersebut maka dapat disimpulkan bahwa peningkatan IPM akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan. Hal ini juga dapat dibuktikan dengan analisis korelasi pearson sebagai berikut;

Tabel 4.21 Hasil Analisis Korelasi Pearson

Correlations		IPM	PE
IPM	Pearson Correlation	1	.614
	Sig. (2-tailed)		.143
	N	7	7
PE	Pearson Correlation	.614	1
	Sig. (2-tailed)	.143	
	N	7	7

Correlations

		PE	KP
PE	Pearson Correlation	1	-.723
	Sig. (2-tailed)		.067
	N	7	7
KP	Pearson Correlation	-.723	1
	Sig. (2-tailed)	.067	
	N	7	7

Dari tabel korelasi pearson tersebut dapat dijelaskan bahwa IPM dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan pembangunan. Ini dibuktikan dengan nilai IPM yang positif sebesar 0,614 yang artinya peningkatan IPM akan berdampak peningkatan pada pertumbuhan ekonomi. Dan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan dibuktikan dengan nilai negatif sebesar -0,723. Oleh karena itu, jelas bahwa ada hubungan antara peningkatan IPM, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pembangunan. Adapun tabel dari peningkatan IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 sebagai berikut;

Tabel 4.22 Peningkatan IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

No	Kabupaten/kota	2005-2011	2005-2011	2005-2011
Kabupaten		IPM	PE	KP
1	Pacitan	5,27	3,04	0,0017
2	Ponorogo	5,43	1,94	-0,002
3	Trenggalek	4,67	2,03	-0,0004
4	Tulungagung	3,95	1,87	0,0071
5	Blitar	5,48	1,55	0,0088

6	Kediri	4,1	3,77	0,0125
7	Malang	4,96	1,33	0,0136
8	Lumajang	5,7	0,88	0,0095
9	Jember	4,93	0,58	0,0117
10	Banyuwangi	4,43	1,65	0,0056
11	Bondowoso	4,39	0,22	0,0065
12	Situbondo	5,42	0,15	0,0117
13	Probolinggo	4,72	0,93	0,0114
14	Pasuruan	4,42	0,71	0,0084
15	Sidoarjo	4,03	-0,13	-0,0901
16	Mojokerto	4,77	0,25	0,0118
17	Jombang	4,03	0,98	0,0046
18	Nganjuk	3,93	1,29	0,0079
19	Madiun	3,33	1,74	0,007
20	Magetan	4,17	1,15	0,005
21	Ngawi	4,59	1,63	0,0024
22	Bojonegoro	2,99	4,1	-0,0292
23	Tuban	4,19	0,97	0,0021
24	Lamongan	3,51	1,37	0,0032
25	Gresik	3,57	-0,93	0,0003
26	Bangkalan	4,91	0,92	0,0094
27	Sampang	5,78	1,62	0,0125
28	Pamekasan	4,26	1,12	0,0084
29	Sumenep	4,48	2,64	0,0109
	Rata rata kabupaten	4.496897	1,357,586	0,002493
30	Kediri	4,73	4,53	-0,0879
31	Blitar	4,31	0,36	0,001
32	Malang	4,98	-0,07	-0,0161
33	Probolinggo	5,79	-0,32	-0,0056
34	Pasuruan	4,44	0,33	0,0015
35	Mojokerto	3,65	0,62	-0,0067
36	Madiun	3,22	1,3	-0,0084
37	Surabaya	3,17	-0,06	-0,0742
38	Batu	5,09	-0,15	0,0039
	Rata-rata kota	4.375556	0,726667	-0,02139

Keterangan: IPM: Indeks Pembangunan Manusia (persen)

PE: Pertumbuhan Ekonomi (persen)

KP: Ketimpangan Pembangunan

Dari tabel diatas, wilayah yang mengalami peningkatan IPM, peningkatan pertumbuhan ekonomi dan penurunan ketimpangan pembangunan adalah Kabupaten Ponorogo, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Bojonegoro, Kota Kediri, Dan Kota Mojokerto. Dan wilayah yang mengalami peningkatan IPM, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan adalah Kabupaten Sidoarjo, Kota Malang, Kota Probolinggo, Kota Surabaya, dan Kota Batu. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM, peningkatan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan ketimpangan pembangunan adalah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Blitar, Kabupaten Kediri, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Probolinggo, Kabupaten, Pasuruan, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Jombang, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Tuban, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, Kota Blitar, dan Kota Pasuruan. Dan hanya satu wilayah yang mengalami peningkatan IPM, penurunan pertumbuhan ekonomi, dan peningkatan ketimpangan pembangunan, yaitu Kabupaten Gresik.

Meskipun mengalami perbedaan yang sangat banyak dari setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur tentang IPM, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan, tetapi rata-rata kabupaten dan kota di provinsi jawa timur apabila mengalami peningkatan IPM, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak

pada penurunan ketimpangan pembangunan. Maka, dari studi teori dan empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Manusia yang dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Manusia signifikan dan mempengaruhi secara negative terhadap ketimpangan pembangunan pada 38 kabupaten/kota di provinsi.

4) Analisis Ketimpangan Pembangunan Di Provinsi Jawa Timur

Ketimpangan di Provinsi Jawa Timur berasal dari perbedaan pertumbuhan ekonomi di berbagai sektor sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi di berbagai daerah, khususnya di wilayah kota dan wilayah kabupaten. Hal ini dapat terlihat pada tabel pertumbuhan PDRB persektor sebagai berikut:

Tabel 4.23 Pertumbuhan PDRB Persektor di Provinsi Jawa Timur

Sektor	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Pertanian	69.536.009,02	80.910.218,45	89.627.587,45	102.815.940,42	112.233.859,16	122.623.967,68	136027919,63
Pertambangan dan Penggalian	8.103.672,30	10.036.669,96	11.651.721,50	13.811.999,33	15.275.669,63	17.030.742,77	19794059,02
Industry pengolahan	120.974.195,01	137.966.414,65	154.363.456,10	176.922.161,82	193.256.482,06	214.024.729,37	239544520,36
Listrik, gas dan air bersih	7.631.896,04	7.030.764,09	8.546.731,79	9.789.252,59	10.625.414,01	11.768.641,20	12690733,03
Konstruksi	14.540.117,46	19.105.282,57	21.100.431,35	24.142.668,27	27.552.354,80	34.993.979,91	41295649,14
Perdagangan, hotel dan restouran	109.587.965,52	128.690.339,40	150.733.654,30	177.014.046,59	195.184.787,50	229.404.871,55	265235852,62
Pengangkutan dan komunikasi	22.309.962,36	25.290.593,23	28.576.726,61	32.649.780,82	37.785.346,57	42.947.758,98	50044951,42
Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	18.264.725,93	21.771.304,34	25.255.804,60	29.734.777,58	33.145.827,89	38.055.173,52	43570708,23
Jasa-jasa/Service	32.443.807,12	41.485.367,02	47.125.768,21	54.511.047,19	61.787.816,10	67.605.907,67	75636174,35

Sumber: Jawa timur dalam angka 2012

Dari tabel diatas, terlihat bahwa sumbangan PDRB yang terbesar adalah dari sektor industri. Kemudian yang kedua ada pada sektor perdagangan, hotel dan restouran. Sedangkan sektor pertanian yang merupakan mata pencaharian terbesar di Provinsi Jawa Timur ada di urutan ketiga. Oleh karena itulah terjadi

ketimpangan antara wilayah kota yang sebagian besar bekerja pada sektor industri dan perdagangan, dengan wilayah kabupaten yang rata-rata bekerja di sektor pertanian. Sehingga kemajuan pembangunan di wilayah kota lebih cepat dibanding dengan wilayah kabupaten. Hal ini dapat terlihat pada tabel PDRB kabupaten kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 sebagai berikut:

Tabel 4.24 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Yang Berlaku Kabupaten/ Kota di Jawa Timur Tahun 2005-2011

No	Kabupaten/ kota	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
KABUPATEN								
1	Pacitan	3410,60	3920,23	4391,58	5033,55	5541,49	6428,97	7056,16
2	Ponorogo	4554,12	5283,39	6000,32	6907,95	7740,33	9268,68	10265
3	Trenggalek	3650,89	4342,98	4892,27	5675,48	6338,48	7171,66	7878,83
4	Tulungagung	9536,30	11228,93	12653,28	14595,52	16092,03	18180,68	19918,62
5	Blitar	6809,24	8097,86	9194,64	10502,90	11579,81	12492,98	13591,26
6	Kediri	5879,78	6908,21	7648,44	8737,76	9543,10	10360,80	11223,95
7	Malang	7401,42	8610,04	9771,49	11235,77	12342,41	13724,47	15003,08
8	Lumajang	7794,44	8858,53	9955,90	11388,64	12521,27	14357,74	15732,54
9	Jember	5940,99	6629,67	7523,62	8845,47	9740,62	10834,30	11885,46
10	Banyuwangi	8663,56	10080,99	11405,63	13298,52	14824,74	16707,08	18363,6
11	Bondowoso	4170,20	4720,44	5339,43	6130,64	6745,62	7265,46	7901,72
12	Situbondo	7723,21	8798,19	9928,96	11407,97	12547,80	13577,35	14772,14
13	Probolinggo	8131,80	9436,91	10766,55	12369,36	13652,71	14817,93	16163,19
14	Pasuruan	6090,92	7162,66	8179,38	9429,73	10375,38	11280,91	12310,47
15	Sidoarjo	20533,59	23017,42	25621,87	28895,82	31271,64	32525,82	34902,92
16	Mojokerto	8246,71	9549,08	10769,99	12285,65	13450,32	15094,50	16480,86
17	Jombang	6379,25	7363,83	8293,20	9451,68	10203,20	12405,77	13666,26
18	Nganjuk	5942,91	6749,02	7706,23	8836,33	9717,60	10797,04	11809,05
19	Madiun	5438,54	6259,58	7066,48	8086,66	8853,42	9619,17	10459,07
20	Magetan	6574,34	7582,21	8527,05	9918,37	10883,30	12239,76	13404,15
21	Ngawi	4818,40	5660,37	6334,80	7240,30	7988,41	9218,17	10107,62
22	Bojonegoro	6268,69	7588,42	9195,54	11201,68	12389,14	15659,88	17677,75
23	Tuban	7711,62	9306,54	10689,00	12481,62	13852,55	15153,15	16614,8
24	Lamongan	4800,11	5693,68	6446,90	7411,14	8233,79	9392,98	10317,81

25	Gresik	17410,66	20565,25	23272,01	26665,64	29453,72	34428,00	37893,69
26	Bangkalan	4834,70	5474,41	6024,64	6758,72	7249,82	8675,31	9475,54
27	Sampang	3996,03	4595,22	4994,51	5574,17	5972,02	6929,62	7513,22
28	Pamekasan	3557,70	4129,07	4523,64	5077,16	5494,84	6588,60	7203,48
29	Sumenep	6608,45	7677,95	8599,64	9790,55	10710,41	11770,06	12793,09
KOTA								
30	Kediri	132351,25	151196,59	165693,18	188061,03	209297,96	242263,63	265030,4
31	Blitar	6692,05	8025,69	9021,35	10272,33	11401,87	13141,38	14420,3
32	Malang	20712,31	24485,13	27706,13	32172,73	34784,17	39292,76	42994,67
33	Probolinggo	12042,06	14047,41	15727,45	17767,28	19096,85	22583,00	24716,9
34	Pasuruan	8079,45	10550,04	11835,29	13470,33	14878,45	15759,58	17061,97
35	Mojokerto	13728,60	16275,54	18373,97	21135,74	23435,88	25134,58	27349,34
36	Madiun	8374,59	11166,82	12649,46	14669,89	16174,12	19380,64	21434,1
37	Surabaya	39801,85	46923,72	53716,43	62310,23	68756,24	74776,14	81739,25
38	Batu	9020,71	10166,16	11609,65	13435,44	14889,60	16898,00	18580,96
Jawa Timur		11057,37	12872,15	14554,10	16751,43	18420,94	20772,11	24360,87

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur

Namun dari tahun 2005-2011 terjadi penurunan ketimpangan pembangunan. Ini dikarenakan adanya faktor peningkatan PAD dan IPM di beberapa daerah Provinsi Jawa Timur. Adanya kenaikan PAD akan meningkatkan anggaran belanja daerah sehingga akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik daripada pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Ini dikarenakan anggaran tersebut dapat digunakan dalam mengoptimalkan dan menaikkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi seperti industri, perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya dengan cara memperbaiki infrastruktur yang ada. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya investasi yang masuk di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

**Tabel 4.25 Investasi (PMDN dan PMA) Di Kabupaten Dan Kota Provinsi
Jawa Timur Tahun 2005-2011**

No	Kabupaten/ kota	PMDN (2005-2010)	PMA (2005-2011)
KABUPATEN			
1	Pacitan	1.350	14650
2	Ponorogo		1950
3	Trenggalek	4.624	2000
4	Tulungagung		350
5	Blitar	162.269.800	0
6	Kediri	2258386	16857
7	Malang	17122576	448250
8	Lumajang	1444711	1250
9	Jember	46806	21075
10	Banyuwangi	16242	996608
11	Bondowoso	0	2890
12	Situbondo	122	1859
13	Probolinggo	106035	1544248
14	Pasuruan	5114381	990650
15	Sidoarjo	18311318	1350034
16	Mojokerto	1150889	622433
17	Jombang	5409	1009743
18	Nganjuk	1050	22500
19	Madiun	77	294525
20	Magetan	0	0
21	Ngawi	0	147941
22	Bojonegoro	449736	16619
23	Tuban	1539344	547301
24	Lamongan	8189109	465670
25	Gresik	32575832	3119306
26	Bangkalan	729	237280
27	Sampang	0	2000
28	Pamekasan	0	2100
29	Sumenep	2037550	426000
KOTA			
30	Surabaya	13935168	1576872
31	Batu	0	0

32	Beberapa kota	4009107	150580
Jawa Timur		275953469	14042792

Sumber: BPS Jawa Timur dalam angka 2012

Meskipun investasi besar banyak diperoleh oleh wilayah kota dan wilayah kabupaten yang tergolong maju seperti kota Surabaya, kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, dan Kabupaten Malang, namun investasi sudah tidak lagi terpusat pada wilayah kota atau maju. Ini dapat dilihat bahwa ada wilayah-wilayah kabupaten yang kurang maju juga mendapat investasi seperti kabupaten Sumenep, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Nganjuk, kabupaten Situbondo dan masih banyak lagi. Sehingga wilayah kabupaten mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan dibanding dengan wilayah kota. Hal ini dapat dilihat pada tabel pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:

Tabel 4.26 Jumlah Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

No	Kabupaten/kota	2005-2011	2005-2011
Kabupaten		PE	KP
1	Pacitan	3,04	0,0017
2	Ponorogo	1,94	-0,002
3	Trenggalek	2,03	-0,0004
4	Tulungagung	1,87	0,0071
5	Blitar	1,55	0,0088
6	Kediri	3,77	0,0125
7	Malang	1,33	0,0136
8	Lumajang	0,88	0,0095
9	Jember	0,58	0,0117
10	Banyuwangi	1,65	0,0056
11	Bondowoso	0,22	0,0065
12	Situbondo	0,15	0,0117
13	Probolinggo	0,93	0,0114
14	Pasuruan	0,71	0,0084

15	Sidoarjo	-0,13	-0,0901
16	Mojokerto	0,25	0,0118
17	Jombang	0,98	0,0046
18	Nganjuk	1,29	0,0079
19	Madiun	1,74	0,007
20	Magetan	1,15	0,005
21	Ngawi	1,63	0,0024
22	Bojonegoro	4,1	-0,0292
23	Tuban	0,97	0,0021
24	Lamongan	1,37	0,0032
25	Gresik	-0,93	0,0003
26	Bangkalan	0,92	0,0094
27	Sampang	1,62	0,0125
28	Pamekasan	1,12	0,0084
29	Sumenep	2,64	0,0109
Rata rata kabupaten		1.357586	0,002493
30	Kediri	4,53	-0,0879
31	Blitar	0,36	0,001
32	Malang	-0,07	-0,0161
33	Probolinggo	-0,32	-0,0056
34	Pasuruan	0,33	0,0015
35	Mojokerto	0,62	-0,0067
36	Madiun	1,3	-0,0084
37	Surabaya	-0,06	-0,0742
38	Batu	-0,15	0,0039
Rata-rata kota		0.726667	-0,02139

Keterangan: PE: Pertumbuhan Ekonomi (persen)

KP: Ketimpangan Pembangunan

Dengan melihat tabel diatas, pertumbuhan ekonomi di wilayah kabupaten mengalami peningkatan yang besar sekitar 1, 357586% dibanding dengan wilayah kota yang hanya sekitar 0,726667%. Dan perkembangan pertumbuhan ekonomi tersebut berdampak pada ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur antara kota dan kabupaten, yaitu sekitar -0,02139 untuk wilayah kota dan 0,002493 untuk wilayah kabupaten. Dengan begitu, wilayah kabupaten akan semakin berkembang dan ketimpangan pembangunan antara kabupaten dengan kota akan semakin berkurang. Oleh karena itu, dari studi teori dan empiris

tersebut maka dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah signifikan dan mempengaruhi secara negatif terhadap ketimpangan pembangunan pada 38 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur.

Selain itu juga, dana PAD dalam APBD juga digunakan sebagai peningkatan Sumber Daya Manusia. Ini dapat ditunjukkan dengan nilai IPM disetiap kabupaten dan kota. Adapun tabel dari peningkatan IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan kabupaten dan kota di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 sebagai berikut;

Tabel 4.27 Peningkatan IPM, Pertumbuhan Ekonomi, dan Ketimpangan Pembangunan Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2011

No	Kabupaten/kota	2005-2011	2005-2011	2005-2011
Kabupaten		IPM	PE	KP
1	Pacitan	5,27	3,04	0,0017
2	Ponorogo	5,43	1,94	-0,002
3	Trenggalek	4,67	2,03	-0,0004
4	Tulungagung	3,95	1,87	0,0071
5	Blitar	5,48	1,55	0,0088
6	Kediri	4,1	3,77	0,0125
7	Malang	4,96	1,33	0,0136
8	Lumajang	5,7	0,88	0,0095
9	Jember	4,93	0,58	0,0117
10	Banyuwangi	4,43	1,65	0,0056
11	Bondowoso	4,39	0,22	0,0065
12	Situbondo	5,42	0,15	0,0117
13	Probolinggo	4,72	0,93	0,0114
14	Pasuruan	4,42	0,71	0,0084
15	Sidoarjo	4,03	-0,13	-0,0901
16	Mojokerto	4,77	0,25	0,0118
17	Jombang	4,03	0,98	0,0046
18	Nganjuk	3,93	1,29	0,0079

19	Madiun	3,33	1,74	0,007
20	Magetan	4,17	1,15	0,005
21	Ngawi	4,59	1,63	0,0024
22	Bojonegoro	2,99	4,1	-0,0292
23	Tuban	4,19	0,97	0,0021
24	Lamongan	3,51	1,37	0,0032
25	Gresik	3,57	-0,93	0,0003
26	Bangkalan	4,91	0,92	0,0094
27	Sampang	5,78	1,62	0,0125
28	Pamekasan	4,26	1,12	0,0084
29	Sumenep	4,48	2,64	0,0109
Rata rata kabupaten		4.496897	1,357,586	0,002493
30	Kediri	4,73	4,53	-0,0879
31	Blitar	4,31	0,36	0,001
32	Malang	4,98	-0,07	-0,0161
33	Probolinggo	5,79	-0,32	-0,0056
34	Pasuruan	4,44	0,33	0,0015
35	Mojokerto	3,65	0,62	-0,0067
36	Madiun	3,22	1,3	-0,0084
37	Surabaya	3,17	-0,06	-0,0742
38	Batu	5,09	-0,15	0,0039
Rata-rata kota		4.375556	0,726667	-0,02139

Keterangan: IPM: Indeks Pembangunan Manusia (persen)

PE: Pertumbuhan Ekonomi (persen)

KP: Ketimpangan Pembangunan

Meskipun mengalami perbedaan yang sangat banyak dari setiap wilayah di Provinsi Jawa Timur tentang IPM, pertumbuhan ekonomi, dan ketimpangan pembangunan, tetapi rata-rata kabupaten dan kota di provinsi Jawa Timur apabila mengalami peningkatan IPM, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Ini karena Dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan ketimpangan pembangunan. Maka, dari studi teori dan empiris tersebut dapat disimpulkan bahwa Pembangunan Manusia yang dinyatakan dengan Indeks Pembangunan Manusia signifikan dan mempengaruhi

secara negative terhadap ketimpangan pembangunan pada 38 kabupaten/kota di provinsi.

5) Analisis Perbandingan Hasil Peneliti Dengan Peneliti Sebelumnya

Berdasarkan hasil analisis diatas, ada beberapa perbedaan dengan hasil peneliti sebelumnya. Hasil tersebut antara lain;

1. Ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur dari tahun 2005 sampai 2011 yang diukur dengan rumus indeks Wiliamson mengalami penurunan. Berbeda dengan peneliti Filzah Wajdi yang mengalami peningkatan dengan studi tempat yang berbeda.
2. Pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Berbeda dengan peneliti sebelumnya (Mopanga, 2010) yang mempunyai pengaruh positif terhadap ketimpangan pembangunan dengan studi kasus di Provinsi Gorontalo.
3. Untuk hasil variabel PAD, ada persamaan dengan peneliti sebelumnya (Soekarno, 2011) dengan variabel DAU. Dimana variabel keuangan mempunyai pengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Namun berbeda dengan Wantchekon dan Tamar (2002), dimana variabel keuangan mempunyai dampak positif dengan ketimpangan pembangunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 maka dapat disimpulkan sebagai berikut;

1. Ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa timur yang dihitung dengan menggunakan indeks Williamson selama tahun 2005-2011 mengalami penurunan. Ketimpangan pembangunan di provinsi Jawa Timur tergolong rendah dikarenakan nilai indeks Williamsonnya mendekati nilai 0.
2. Dari matrik korelasi Pearson, diperoleh hasil bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan pembangunan adalah negatif yaitu $-0,723$, dan nilai signifikansinya $0,067$ lebih besar $0,05$. Ini berarti bahwa terdapat hubungan negatif antara pertumbuhan ekonomi dengan ketimpangan dimana pertumbuhan ekonomi naik akan menyebabkan ketimpangan pembangunan turun. Dengan hasil ini, hipotesis Kuznets tentang U-terbalik di Provinsi Jawa Timur pada tahun 2005-2011 terbukti.
3. Model regresi pengaruh Produk Domestik Regional Bruto, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 tidak layak digunakan karena tidak memenuhi atau terjadi gejala uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heterokedesitas, dan uji autokorelasi. Oleh karena itu dilakukan uji sekali

lagi dengan mengabaikan variabel Produk Domestik Regional Bruto, dan Dana Alokasi Umum.

4. Model regresi pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Indeks Pembangunan Manusia terhadap ketimpangan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tahun 2005-2011 layak digunakan karena memenuhi atau tidak terjadi gejala uji asumsi klasik, yaitu uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas, dan uji autokorelasi.
5. Dari uji F menunjukkan bahwa variabel pendapatan asli daerah dan indeks pembangunan manusia secara bersamaan mempengaruhi variabel dependent ketimpangan pembangunan.
6. Dari hasil regresi, pendapatan asli daerah berpengaruh negatif sebesar $-4,220E-7$ atau $-0,0000004220$. Hal ini berarti bahwa pendapatan asli daerah meningkat sebesar Rp 1000000,00 per kapita, maka indeks wiliamson akan turun sebesar $0,0000004220$. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah yang semakin besar dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah.
7. Dari hasil regresi, indeks pembangunan manusia nilai sebesar 0,000. Hal ini berarti bahwa IPM meningkat sebesar 1% per kapita, maka indeks wiliamson tidak akan mengalami penurunan dikarenakan nilainya 0,000. Namun untuk kenaikan lebih dari 1% dimungkinkan indeks wiliamson

akan mengalami penurunan dikarenakan nilai signifikansi atau nilai tabel t -nya negatif. Hal ini membuktikan bahwa indeks pembangunan manusia yang semakin tinggi dan merata pada daerah Provinsi Jawa Timur akan mendorong terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi sehingga akan menurunkan tingkat ketimpangan pembangunan antar daerah.

8. Peningkatan PAD dan IPM meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur terutama di wilayah kabupaten, sehingga ketimpangan antara kabupaten dan kota akan semakin berkurang.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan dan kesimpulan yang disampaikan diatas, maka ada beberapa saran dari peneliti yaitu sebagai berikut;

1. Dari hasil penelitian, didapat tingkat ketimpangan yang cenderung menurun dan cenderung rendah selama tahun 2005-2011. Ini menandakan bahwa pembangunan di kabupaten dan kota Provinsi Jawa Timur cenderung merata. Hanya saja ada dua kota yang tingkat ketimpangannya sangat tinggi yaitu kota Kediri dan kota Surabaya. Oleh karena itu, perlu adanya mobiltas produksi (modal, teknologi dan tenaga kerja) dan bantuan pemerintah yang besar ke daerah-daerah yang kurang maju. Sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut dan pembangunan akan semakin merata.
2. Pendapatan Asli Daerah berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa pendapatan asli daerah naik,

maka ketimpangan pembangunan akan turun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu perlu menaikkan Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengolahan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah) yang digunakan sebagai APBD daerah untuk kegiatan atau program kebijakan pemerintah daerah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi sehingga ketimpangan pembangunan akan semakin menurun.

3. Indeks pembangunan Manusia berpengaruh negatif terhadap ketimpangan pembangunan. Hal ini membuktikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia naik, maka ketimpangan pembangunan akan semakin menurun. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu meningkatkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan meningkatkan pembangunan manusia seperti kualitas pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat. Dengan meningkatnya pembangunan manusia diharapkan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat dan pertumbuhan ekonomi daerah sehingga dapat mengurangi ketimpangan pembangunan antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Armida S, Alisjahbana. 2005. *Kesenjangan Regional di Indonesia*. Lembaga Penelitian SMERU.
- Arsyad.Lincolin. 1997. *Ekonomi Pembangunan*. Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN. Yogyakarta
- Barzelay, M.1991."*Managing Local Development, Lesson from Spain*". Policy Sciences,24,
- Brata, Aloysius Gunadi. 2002. *Pembangunan Manusia dan Kinerja Ekonomi Regionall di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Pembangunan. Kajian Ekonomi Negara Berkembang. Vol 7, No. 2. Hal 113-122.
- Boediono. 1992. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta
- Bungin, Burhan. (2008). *Penelitian kualitatif*. Jakarta: Kencana.
- Brojonegoro B, Sidik M 2003. *Dana Alokasi Umum, Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, LPEM- UI, Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2008. *PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Provinsi Jawa Timur Berbagai Tahun Terbitan*. Surabaya
- Capello, Roberta. 2007, *Regional Economics*, Routledge, New York.
- Ghozali, Imam. 2006. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Progam SPSS*. Semarang: badan Penerbit Universitas diponegoro.
- Hadi Sasana, 2005. *Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus di Kabupaten Banyumas*.
- Halim, Abdul. 2004. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta : Salemba Empat.
- Haq, Mahbul ul. 1976. *The Proverty Curtain*. Diterjemahkan oleh Masri Maris. Jakarta:PT Jaya Pirusa
- Irawan dan M. Suparmoko. 1988. *Ekonomika Pembangunan*.Yogyakarta: BPFE.
- Jhingan.ML. 1993. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: Raja GrafindoPersada.

Jhingan, M.L. 2010. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Juanda, B, 2009. *Ekonometrika Permodelan dan Pendugaan*. Bogor: IPB Press.

Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan: Perkembangan dan Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: LP3ES.

Kemenkeu. 2011. *Kementerian Keuangan. Dana Alokasi Umum 2009*. Jakarta

Kadajtmiko, 2002. "Dinamika Sumber Keuangan bagi Daerah dalam Rangka Otonomi Daerah", Prosiding Workshop Internasional Implementasi Desentralisasi Fiskal sebagai Upaya Memberdayakan Daerah dalam Membiayai Pembangunan Daerah, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, hal.69.

Lili, Masli. 2008. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Antar Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Barat*. Diakses tanggal 3 Maret 2010. Dari <http://www.stanim.ac.id/>

Mardiasmo. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Penerbit Andi. Yogyakarta.

Mangkoesebroto, Guritno, 1998. *Kebijakan Ekonomi Publik di Indonesia : Substansi dan Urgensi*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Umum.

Mudrajad. Kuncoro. 2002. *Analisis Spasial dan Regional Studi Aglomerasi dan Kluster Industri Indonesia*. Unit Penerbit dan Percetakan AMP YKPN. Yogyakarta

Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi dan Pembangunan Daerah Reformasi. Perencanaan. Strategi. dan Peluang*. Penerbit Erlangga. Jakarta

Mudrajad Kuncoro. 2006. *Ekonomi Pembangunan Teori.Masalah.dan kebijakan*. UPP STIM YKPN. Yogyakarta

Mohammad nazir. 2005. *Metode penelitian Bogor*: Ghalia Indonesia

Mopanga, Herwin. 2010. *Analisis Ketimpangan Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Gorontalo (thesis)*. Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor

Rustiadi, E, S. Hadi, 2007. *Pengembangan Agropolitan sebagai Strategi Pembangunan Perdesaan dan Pembangunan Berimbang*. <http://www.pu.go.id/ditjen-miskin/agro/berita/pengemb-agro.asp>

- Sadono. Sukirno. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, dan Dasar Kebijaksanaan*. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI dengan Bima Grafika. Jakarta
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Jakarta: Gahalia Indonesia
- Sidik, Mahfud et al, 2002, *Dana Alokasi Umum-Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Buku Kompas, Jakarta.
- Sjafrizal, 1997. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Regional Wilayah Indonesia Bagian Barat*, Jakarta, Jurnal Buletin Prisma.
- Sjafrizal. 2008. *Ekonomi Regional Teori dan Aplikasi*. Baduose Media. Padang Sumatera Barat
- Soeratno & Arsyad, L. (2003). *Metode penelitian : Untuk ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Akademi Manajemen Perusahaan YKPN.
- Soekarno. 2011. *Analisis Dampak Dana Alokasi Umum terhadap Ketimpangan Pembangunan 2004-2009*. IPB: Bogor
- Stiglitz, E.J. 2000. *Economics of the Public Sector*. W.W. Norton and Company, New York.
- Sudarmono, Mulyanto, 2006. *Analisis Transformasi Struktural, Pertumbuhan Ekonomi Dan Ketimpangan Antar Daerah Di Wilayah Pembangunan I Di Jateng*. Fakultas Ekonomi UNDIP. Semarang, Tesis.
- Sukirno, Sadono. 2004. *Makro Ekonomi. Edisi Ketiga*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumodiningrat, Gunawan. 2001. *Responsi Pemerintah Terhadap Kesenjangan Ekonomi – Studi Empiris Pada Kebijakan dan Program Pembangunan Dalam Rangka Pemberdayaan Masyarakat Indonesia*. Jakarta : PerPod.
- Suminta, Pradja. 2005. *Bahan Ajar Administrasi Pembangunan*. Surakarta: Program Studi Pendidikan Ekonomi Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret.
- Sumitro, Djojohadikusumo. 1987. *Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Pembangunan.*, Jakarta: Bagian Penerbitan: LP3ES.

Suparno. 2010. *Desentralisasi Fiskal Dan Pengaruhnya Terhadap Perekonomian Indonesia*. Tesis. IPB. Bandung

Sutarno dan Mudrajad Kuncoro. 2003. *Pertumbuhan Ekonomi dan Ketimpangan Antar Kecamatan di Kabupaten Banyumas 1993-2000*. Jurnal Ekonomi Pembangunan Kajian Ekonomi Negara Berkembang

Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.

Todaro, Michael P. 1994. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Todaro, Michael P. 1999. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.

Todaro.M. dan Smith. 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Pearson Education Limited. United Kingdom

Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi. Edisi ke Sembilan*. Jakarta: Erlangga.

Wajdi, filzah. 2011. *Analisis ketimpangan Pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan* IPB: Bogor

Wantchhekon, Leonardo & Asadurian, Tamar. 2002. *Transfer Dependence and Regional Disparitas: the Case of Nigeria*, Working Paper No. 152, Stanford University.

Undang Undang

UU Nomor 34 Tahun 2000 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah

Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Daerah

Peraturan Presiden Republik Indonesianomor 74Tahun 2005 tentang dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kotatahun Anggaran 2006

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2006 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota Tahun 2007

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2008

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2009

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor Tahun 2008 Tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota Tahun 2010

Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2011 tentang dana Alokasi Umum Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kotatahun Anggaran 2011

Undang-Undang nomor 32 tahun 1956 tentang perimbangan keuangan antar negara dengan daerah-daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

PERMENDAGRI No.13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

